



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH BUMBU**

Tahun 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada DLH Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) DLH Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan LAKIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023 yang mengacu kepada Rencana Strategi DLH Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan LAKIP DLH Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 ini telah dupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LAKIP DLH Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian DLH Kabupaten Tanah Bumbu telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.

Demikian disampaikan, diharapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DLH Kabupaten Tanah Bumbu, Kami mengharapkan sumbang saran pihak-pihak terkait atas kekurangan laporan ini, karena Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna.

Akhirnya kepada semua pihak yang terkait dan turut memberikan bantuan dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Batulicin, 25 Januari 2024

Kepala Dinas,



Rahmat Prpto Udoyo, S.Hut., M.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730228 199212 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman	
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		v
DAFTAR LAMPIRAN		vi
Bab I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Landasan Hukum	I-1
	1.3 Maksud dan Tujuan	I-3
	1.4 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu	I-4
	1.5 Gambaran Kondisi Lingkungan	I-8
	1.6 Sistematika Penyusunan LAKIP DLH Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023	I-8
Bab II	PERENCANAAN KINERJA	
	2.1. Rencana Strategis	II-1
	2.2. Indikator Kinerja Utama DLH Kab. Tanah Bumbu TA 2023	II-4
	2.3. Rencana Kinerja	II-6
	2.4. Rencana Aksi Pencapaian IKU DLH Kab. Tanah Bumbu TA 2023	II-6
	2.5. Perjanjian Kinerja	II-6
Bab III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Hasil Tindak Lanjut LHE SAKIP DLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2022 Oleh Inspektorat Kab. Tanah Bumbu	III-1
	B. Hasil Tindak Lanjut LHE SAKIP DLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2022 Oleh KEMENPANRB	III-5
	C. Capaian Kinerja DLH Kab. Tanah Bumbu TA 2023	III-7
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	IV-1
	B. Saran	IV-4

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Sesuai Status Kepegawaian	I - 7
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Tujuan	II - 4
Tabel 2.2	Matrik Indikator Kinerja Sasaran	II - 5
Tabel 2.3	Rincian Perjanjian Kinerja DLH Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023	II - 7
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	III - 7
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Utama Strategi Tahun 2023	III - 8
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja DLH Tahun 2023	III - 9
Tabel 3.4	Jumlah Parameter Kritis dan Indikator Faktor Pengaruh	III - 12
Tabel 3.5	Status Mutu Air Pemantauan Tahap I	III - 14
Tabel 3.6	Status Mutu Air Pemantauan Tahap II	III - 14
Tabel 3.7	Kategori Indeks Kualitas Air	III - 16
Tabel 3.8	Indeks Kualitas Air Periode Tahap I	III - 16
Tabel 3.9	Indeks Kualitas Air Periode Tahap II	III - 16
Tabel 3.10	Indeks Kualitas Air Tahun 2023	III - 17
Tabel 3.11	Indikator Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Indeks Kualitas Air Tahun 2023	III - 18
Tabel 3.12	Hasil Pemantauan Tahap I Kualitas Udara Ambien Metode Passive Sampler	III - 21
Tabel 3.13	Hasil Pemantauan Tahap II Kualitas Udara Ambien Metode Passive Sampler	III - 21
Tabel 3.14	Hasil Pemantauan Tahap III Kualitas Udara Ambien Metode Passive Sampler	III - 21
Tabel 3.15	Kategori Indeks Kualitas Udara	III - 24
Tabel 3.16	Nilai Rata Rata Kandungan NO ₂	III - 24
Tabel 3.17	Nilai Rata Rata Kandungan SO ₂	III - 24
Tabel 3.18	Indeks Kualitas Udara Tahun 2023	III - 25
Tabel 3.19	Indikator Faktor Pengaruh Parameter Indeks Kualitas Udara	III - 25
Tabel 3.20	Indikator Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	III - 25
Tabel 3.21	Evaluasi dan Analisis Atas Capaian Indikator-indikator Kinerja Utama	III - 41
Tabel 3.22	Target dan Capaian IKLH Tahun 2021 - 2026	III - 43
Tabel 3.23	Target dan Capaian Volume Sampah Terangkut Tahun 2021 - 2026	III - 45
Tabel 3.24	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2021 – 2023	III - 46
Tabel 3.25	Realisasi Keuangan Terhadap Capaian Sasaran IKU DLH	III - 49
Tabel 3.26	Efisiensi Program, Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2017 – 2023	III - 51
Tabel 3.27	Capaian Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2023	III - 53
Tabel 3.28	Nilai IKM UPTD Laboratorium Lingkungan Tahun 2019 - 2023	III - 88
Tabel 3.29	Nilai IKM UPTD Pengelolaan Persampahan Tahun 2019 - 2023	III - 88

Tabel 3.30	Tabel Belanja Langsung DLH Tahun 2023	III - 94
Tabel 3.31	Tabel Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2023	III - 94
Tabel 3.32	Realisasi Penerimaan Daerah pada DLH Kab. Tanah Bumbu 2023	III - 98
Tabel 3. 33	Perbandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2022- 2023	III - 98

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
Gambar 3.1	Peringkat Indeks Pencemar dan Status Mutu Air Hasil Pemantauan Tahap I	III - 13
Gambar 3.2	Peringkat Indeks Pencemar dan Status Mutu Air Hasil Pemantauan Tahap II	III - 14
Gambar 3.3	Grafik Trend Status Mutu Air	III - 15
Gambar 3.4	Grafik Trend Status Mutu Air Indeks Kualitas Air Periode Pemantauan Tahap I dan II	III - 17
Gambar 3.5	Grafik Trend Indeks Kualitas Air (IKA) Berdasarkan Target Renstra Tahun 2021 – 2023	III - 18
Gambar 3.6	Grafik Trend Parameter Nitrogen Dioksida (NO ₂)	III - 22
Gambar 3.7	Grafik Trend Parameter Sulfur Dioksida (SO ₂)	III - 23
Gambar 3.8	Grafik Trend Indeks Kualitas Air (IKU) Berdasarkan Target Renstra Tahun 2021 – 2023	III - 26
Gambar 3.9	Trend Nilai IKLH dari tahun 2021 – 2023	III - 44
Gambar 3.10	Perbandingan Nilai IKLH dengan Target IKLH dari tahun 2021 – 2023	III - 44

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Penetapan Kinerja DLH TA. 2023
- Lampiran 2 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DLH sesuai RENSTRA 2021-2026
- Lampiran 3 IKU DLH TA. 2023
- Lampiran 4 Rencana Kinerja Tahunan DLH TA. 2023
- Lampiran 5 Laporan Kinerja Interim/Triwulanan Tahun 2023
- Lampiran 6 Cascading/Pohon Kinerja Tahun 2023
- Lampiran 7 Matriks Keselarasan Tahun 2023
- Lampiran 8 Rencana Aksi Tahun 2023
- Lampiran 9 Pengukuran Kinerja DLH TA. 2023
- Lampiran 10 Daftar Penghargaan Yang Diterima DLH Tahun 2023
- Lampiran 11 Dokumentasi Kegiatan DLH Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

LAPORAN KINERJA (LKj) DLH KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023 dilaksanakan untuk mencapai visi-misi yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur pencapaian kinerja yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan tersebut, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan melalui Perpres Nomor 29 tahun 2014, Permenpan Nomor 53 tahun 2014 dan Permenpan no 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sehingga wajib menyampaikan LAKIP.

Pada tahun 2023, pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023 diukur melalui 3 sasaran program yang mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021 – 2026 dan rencana aksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023 tahun 2021 – 2026.

LAKIP merupakan bentuk dari Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan SKPD sebagai tolok ukur tercapai atau tidaknya suatu target dan sasaran / tujuan pelaksanaan program / kegiatan sesuai visi dan misi kegiatan yang dilaksanakan. Untuk itu dalam penyusunan LAKIP mutlak diperlukan adalah Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran DLH Kabupaten Tanah Bumbu serta penjabarannya dalam bentuk strategi kebijaksanaan yang diimplementasikan dalam program kerja yang terjabar menjadi kegiatan operasional yang rinci, spesifik dan terukur.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan LAKIP Tahun 2023 ini disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104)
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
7. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 208 Tahun 2000 tetang tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah
19. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/163 Tahun 2008 tentang Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 09 Maret 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 18 tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan LAKIP DLH Kabupaten Tanah Bumbu TA. 2023 adalah :

- a. Memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja DLH Kab. Tanah Bumbu
- b. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis dalam Rencana Strategis DLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2021–2026 yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan LAKIP DLH Kab. Tanah Bumbu TA. 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan DLH Kab. Tanah Bumbu dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama TA 2023.
- b. Memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam Renstra DLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2021–2026.

1.4. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu

Dalam rangka memenuhi kelengkapan Pemerintahan Kabupaten sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No: 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan maka dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No: 16 Tahun 2007 tanggal 12 Nopember 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang salah satunya adalah **Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah** Kabupaten Tanah Bumbu diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No : 20 Tahun 2011 tanggal 20 September 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang salah satunya adalah **Badan Lingkungan Hidup Daerah** Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu No. 25 tahun 2012 ditetapkan tugas pokok, fungsi uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Peraturan Daerah tersebut pada tanggal 15 September 2016 diperbaharui kembali dengan terbitnya Peraturan Daerah No.19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang salah satunya adalah **Dinas Lingkungan Hidup** Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 32 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu.

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan mencakup bagian dan bidang-bidang sebagai berikut :

1. Sekretariat
2. Bidang Tata Lingkungan
3. Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3
4. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan LH
5. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH
6. UPT Laboratorium Lingkungan
7. UPTD Pengelolaan Persampahan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas meliputi :

- a. Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan dibidang Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1.4.2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu No: 18 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup

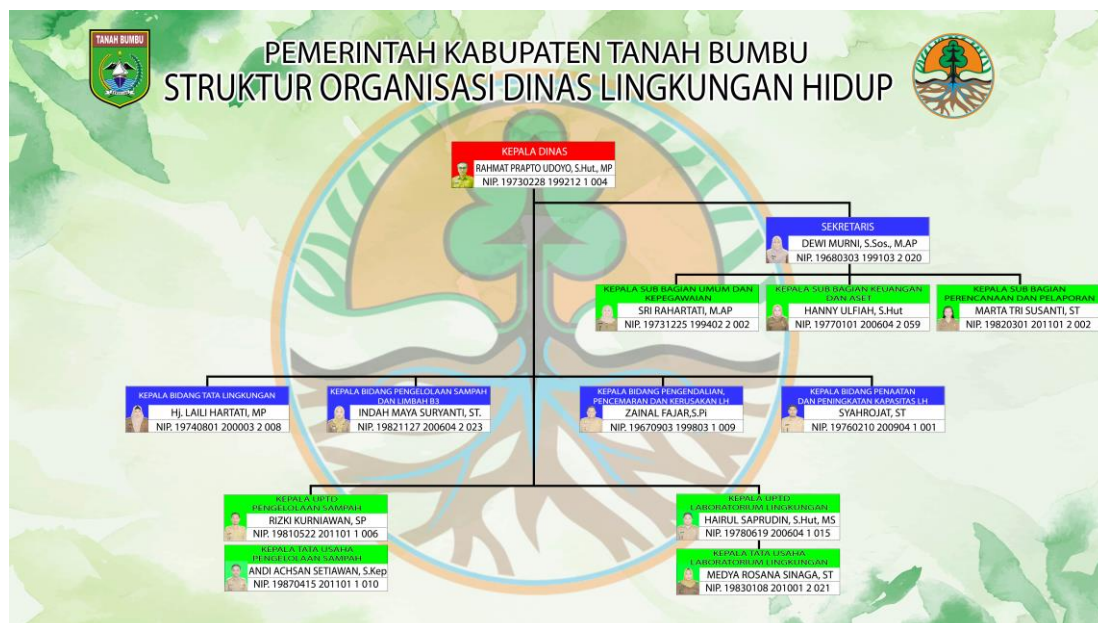
2. Sekretariat

Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Sub Bagian Informasi dan Pelaporan
3. Bidang Tata Lingkungan
Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Tata Lingkungan.
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3
Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3 mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan sampah dan LB3.
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan LH.
6. Bidang Penuaan dan Peningkatan kapasitas LH
Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas LH mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang penuaan dan peningkatan kapasitas LH.
7. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
Unit Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.
8. UPTD Pengelolaan Persampahan
Unit Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang
9. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

Secara rinci struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdapat pada gambar di bawah ini :



1.4.3. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan kegiatannya saat ini, DLH Kabupaten Tanah Bumbu didukung oleh 45 orang ASN ditambah 388 orang tenaga Non ASN.

Untuk menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan DLH Kabupaten Tanah Bumbu, kualitas dan kuantitas SDM mutlak diperlukan. Sampai sejauh ini keberadaan pegawai DLH Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Sesuai Status Kepegawaian

No	Uraian	Jumlah Pegawai	
		ASN	Non ASN
1	Kualifikasi Pendidikan		
	S2	9	1
	D.IV / S1	28	43
	D.II / D.III	3	5
	SLTA	5	73
	SLTP	0	47
	SD/Sederajat	0	219
	Total	45	388
2	Pangkat Golongan :		
	Golongan IV	7	0
	Golongan III	31	0
	Golongan II	6	0
	Total	44	0
3	Pejabat :		

No	Uraian	Jumlah Pegawai	
		ASN	Non ASN
	Struktural	13	0
	Fungsional	18	0
	Staf ASN dan Non ASN	13	388
	Total	45	388

1.5 Gambaran Kondisi Lingkungan

Berdasar kajian kondisi dan situasi Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2021-2026 (*Renstra DLH Kabupaten Tanah Bumbu 2021 – 2026*), dan potensi maupun isu strategis yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, dapat dirumuskan ada beberapa isu pokok strategis sesuai dengan tugas dan fungsi DLH Kabupaten Tanah Bumbu yang wajib mendapat perhatian bersama, yaitu :

1. Trend peningkatan IKLH
2. Belum optimalnya pengelolaan sampah

1.6 Sistematisa Penyusunan LAKIP DLH Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja DLH Kabupaten Tanah Bumbu maka disusunlah LAKIP Tahun 2023 yang berpedoman pada PERMENPANRB 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Ringkasan/Ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan simpulan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Bab IV – Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

LAPORAN KINERJA (LKj) DLH KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

RENSTRA DLH Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 - 2026 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan bagi DLH Kabupaten Tanah Bumbu untuk kurun waktu tahun 2021 - 2026. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan
2. Meningkatkan pengendalian kualitas Lahan
3. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Persampahan

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2021-2026 yang ingin dicapai yaitu :

- Meningkatnya upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup
- Meningkatnya pengelolaan lahan sesuai kewenangan
- Meningkatnya upaya penanganan dan pengurangan sampah

Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 6 (enam) Indikator, yaitu :

1. Indeks Kualitas Air (IKA)
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
3. Pemenuhan data dukung pengendalian emisi GRK
4. Peningkatan pengelolaan Lahan sesuai kewenangan
5. Persentase volume sampah terangkut
6. Persentase volume sampah yang direduksi

A. VISI

Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke arah mana organisasi akan dibawa. Visi yang baik harus realistis dan mampu menjadi tuntutan bagi organisasi agar eksis, unggul, antisipatif dan inovatif.

Visi Kabupaten Tanah Bumbu adalah “Membangun Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius dan Demokratis”,

B. M I S I

Misi adalah pernyataan eksplisit dari organisasi tentang apa saja yang harus dicapai dengan menyebutkan kegiatan spesifik yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan visinya. Adapun **Misi Kabupaten Tanah Bumbu adalah :**

1. Misi Kesatu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Berakhlak Mulia
2. Misi kedua, Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian
3. Misi Ketiga, Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
4. Misi Keempat, Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan agroindustry
5. Misi Kelima, Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel.

Misi pertama, memiliki tujuan :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran :
Meningkatnya Mutu Pendidikan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban
Meningkatnya Kualitas Kepemudaan
Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan
2. Mewujudkan Tanah Bumbu sebagai Serambi Madinah, dengan sasaran :
Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan
Meningkatnya Struktur Sosial yang Madani

Misi kedua, memiliki tujuan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dengan sasaran :

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan
2. Meningkatkan Sistem Irigasi Berkinerja Baik
3. Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Pemukiman
4. Meningkatkan Kualitas Air Minum dan Sanitasi
5. Menurunkan Resiko Terjadinya Bencana

Misi Ketiga, memiliki tujuan yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan dengan sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Air dan Udara
2. Meningkatkan Tutupan Lahan

Misi Keempat, memiliki tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dengan sasaran:

1. Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Wisata
2. Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian
3. Meningkatnya Iklim Investasi
4. Meningkatnya Sektor Industri dan Perdagangan

Misi Kelima, memiliki tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani, dengan sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
4. Meningkatnya Kemandirian Desa

Berdasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026, maka DLH Kabupaten Tanah Bumbu akan mendukung pelaksanaan misi ke-2 (dua) dan misi ke-3 (tiga) sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pada Misi ke-2, meskipun secara tidak langsung namun ada 1 (satu) Program yang dilaksanakan DLH yaitu Program Pengelolaan persampahan untuk mendukung terwujudnya Tujuan Daerah yaitu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang mantap, dengan indicator Infrastruktur yang mantap dan Sasaran Daerah yaitu Meningkatnya kualitas air minum dan sanitasi, dengan indicator Cakupan pelayanan air minum aman dan Cakupan akses sanitasi Layak.

Sedangkan terkait dengan Misi ke-3 Bidang Lingkungan Hidup yaitu : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Arif Dengan Memperhatikan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan”,

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

C.1 TUJUAN, STRATEGIS SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA DLH KAB. TANAH BUMBU TA. 2023

Tujuan OPD adalah "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup"

Sasaran OPD adalah "Meningkatnya upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup, Meningkatnya pengelolaan lahan sesuai kewenangan serta Meningkatnya upaya penanganan dan pengurangan sampah"

Tujuan dan sasaran strategis dimaksud dalam rangka pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
				2021	2026
1	Meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks kualitas air (IKA)	55	57,81
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,27	91,79
			Pemenuhan data dukung pengendalian emisi GRK	100	100
2	Meningkatkan pengendalian kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Peningkatan pengelolaan Lahan sesuai kewenangan	0	95.45
3	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	Persentase Volume sampah terangkut	74	70
			Persentase volume sampah yang direduksi	24	30

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA DLH KAB. TANAH BUMBU TA. 2023

Untuk mencapai sasaran tersebut disusun indikator keberhasilan pada DLH Kab.

Tanah Bumbu dengan Langkah - langkah :

- Menetapkan RKT (Rencana Kinerja tahunan)
- Menyampaikan rencana kerja dan anggaran

- Menyusun dokumen penetapan kinerja
- Menyusun pengukuran kinerja
- Menyusun Laporan Akuntabilitas kinerja, dan
- Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RENSTRA DLH Kab. Tanah Bumbu

Adapun indikator kinerja utama DLH Kab. Tanah Bumbu seperti termuat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Matrik Indikator Kinerja Sasaran

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
				2021	2026
1	Meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks kualitas air (IKA)	55	57,81
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,27	91,79
			Pemenuhan data dukung pengendalian emisi GRK	100	100
2	Meningkatkan pengendalian kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Peningkatan pengelolaan Lahan sesuai kewenangan	0	95.45
3	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	Persentase Volume sampah terangkut	74	70
			Persentase volume sampah yang direduksi	24	30

Untuk mencapai sasaran tersebut disusun indikator keberhasilan pada DLH Kab. Tanah Bumbu dengan langkah-langkah :

- Menetapkan RKT (Rencana Kinerja tahunan)
- Menyampaikan rencana kerja dan anggaran
- Menyusun dokumen penetapan kinerja
- Menyusun pengukuran kinerja
- Menyusun Laporan Akuntabilitas kinerja, dan
- Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RENSTRA DLH Kab. Tanah Bumbu

2.3. RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kinerja tahun 2023 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2023. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Penetapan Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2023. Rencana Kinerja DLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran.

2.4. RENCANA AKSI PENCAPAIAN IKU DLH KAB. TANAH BUMBU TA. 2023

Program DLH Kab. Tanah Bumbu TA. 2023 disusun dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta merupakan suatu rencana aksi nyata untuk pencapaian IKU yang sesuai dengan perencanaan kinerja dan dituangkan pada penetapan kinerja tahun 2023. Berdasarkan program-program tersebut selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2023. Rencana Aksi DLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran.

2.5. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja DLH Kab. Tanah Bumbu dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahunan. Dasar hukum penyusunan Penetapan Kinerja adalah Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Peraturan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk :

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi

- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward

DLH Kab. Tanah Bumbu telah membuat penetapan kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja DLH Kab. Tanah Bumbu ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Penetapan kinerja DLH Kab. Tanah Bumbu disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan mengacu pada Rencana Strategis DLH Kab. Tanah Bumbu.

Tabel 2. 3 Rincian Perjanjian Kinerja DLH Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
1	Meningkatnya Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	56,11	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 5. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH 7. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Indeks Kualitas Udara	91,48	
		Pemenuhan data dukung pengendalian emisi GRK	100%	
2	Meningkatnya pengelolaan lahan sesuai kewenangan	Peningkatan pengelolaan Lahan sesuai kewenangan	77,27%	
3	Meningkatnya Upaya Penanganan dan Pengurangan Sampah Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas dan Kapabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Volume Sampah terangkut	72%	
		Persentase Volume Sampah yang diReduksi	27%	
		Indikator SAKIP	79 (BB)	

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
				8. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 9. Pengelolaan Persampahan 10. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu telah membuat penetapan kinerja. Pada penetapan kinerja tersebut ada 10 (sepuluh) program dengan 18 (delapan belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN KINERJA (LKj) DLH KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. HASIL TINDAK LANJUT LHE SAKIP DLH KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2022 OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH BUMBU

Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP DLH Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu, ada beberapa Rekomendasi yang diberikan sebagai perbaikan antara lain :

1. Perencanaan Kinerja
Dokumen Perencanaan Kinerja dipublikasikan tepat waktu
2. Pengukuran Kinerja :
Pengumpulan data kinerja memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi);
3. Pelaporan Kinerja
 - a. Mendokumentasikan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi disertai dengan data dukung (dasar surat, foto kegiatan, absensi dan berita acara)
 - b. Laporan kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Membuat Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)

Dari beberapa Rekomendasi yang diberikan, berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SAKIP DLH) antara lain :

1. Untuk Dokumen Perencanaan Kinerja sudah dipublikasikan tepat waktu
2. Untuk Pengukuran Kinerja terutama dalam Pengumpulan Data Kinerja memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi), sampai saat ini masih belum bisa dilaksanakan.
3. Untuk Pelaporan Kinerja Melakukan pendokumentasian terhadap dokumen hasil reviu internal dan dokumen penyampaian Laporan Kinerja, berikut kami sampaikan dokumentasinya :

FOTO RAPAT INTERNAL DLH





RAPAT DENGAN INSPEKTORAT

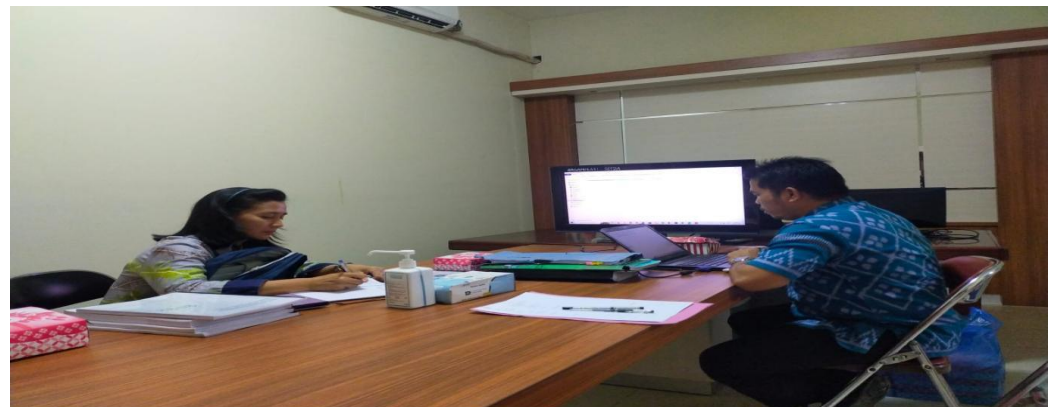


RAPAT DENGAN BAGIAN PEMERINTAHAN (TAPEM)





RAPAT DENGAN BAGIAN ORGANISASI (ORTAL)



4. Untuk Laporan kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja), akan dilaksanakan pada penyusunan SAKIP Tahun 2023
5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang digunakan antara lain :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
 - b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Pembangunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Pembangunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan masih belum menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

B. HASIL TINDAK LANJUT LHE SAKIP DLH KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2022 OLEH KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1162/AA.05/2022 Tanggal 6 Desember 2022 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022, telah dibuat berita acara tindak lanjut dari DLH Kab. Tanah Bumbu yang sudah diserahkan ke Bappeda Kab. Tanah Bumbu untuk selanjutnya disampaikan ke KEMENPANRB secara kolektif, antara lain :

1. PERENCANAAN KINERJA

1. Indikator Kinerja Belum Sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur/measurable, relevan dan cukup. Sebagai contoh pada indikator Dinas Lingkungan Hidup yaitu indikator “Pemenuhan Data Dukung Pengendalian Emisi GRK” untuk mengukur sasaran “Meningkatnya Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup”

Tanggapan DLH :

Sesuai Renstra DLH Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021 - 2026, untuk Sasaran Kinerja Meningkatkan Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup diukur keberhasilannya dari 3 Indikator Sasaran antara lain :

- a. Indeks Kualitas Air (IKA)
- b. Indeks Kualitas Udara (IKU)
- c. Pemenuhan Data Dukung Pengendalian Emisi GRK

Indikator Sasaran DLH sampai tahun 2026 akan tetap menggunakan 3 indikator sasaran tersebut berdasarkan kajian tim penyusun Renstra yang mengacu terhadap visi misi Bupati.

Untuk Indikator sasaran Pemenuhan Data Dukung Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca menjelaskan tentang keterpenuhan data yang berasal dari SKPD

terkait kegiatan - kegiatan yang cenderung menghasilkan emisi GRK skala kabupaten, yang nantinya data data tersebut akan digunakan untuk menghitung nilai emisi GRK skala Kabupaten.

Namun untuk kedepannya DLH akan melakukan reuiu terhadap indikator Sasaran pemenuhan data dukung pengendalian emisi GRK menjadi Indeks Respon Kinerja SKPD (IRKS-GRK) terhadap Penurunan Emisi GRK untuk menunjang Indikator Kinerja Utama Kabupaten yaitu Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Indikator Indeks Respon Kinerja SKPD Gas Rumah Kaca (IRKS-GRK) menggambarkan kinerja keterhubungan antar kinerja setiap SKPD dalam Upaya penurunan emisi GRK skala kabupaten sehingga untuk melaksanakan indikator tersebut diperlukan penyusunan secara sistematis dalam pembuatan baseline dan penentuan target.

Diproyeksikan indikator tersebut dapat digunakan pada Renstra tahun 2026 – 2031.

2. Penetapan target dalam Perencanaan Kinerja masih ditemukan target yang kurang menantang dan realistis

Tanggapan DLH :

Untuk Indikator Pemenuhan Data Dukung Pengendalian Emisi GRK dengan target sebesar 100 % dari tahun 2021 – 2026 sesuai RENSTRA dikarenakan untuk mendapatkan hasil perhitungan nilai emisi GRK yang seobjektif mungkin, maka data dukung yang harus dikumpulkan dari SKPD terkait harus memenuhi 100 %

2. PENGUKURAN KINERJA
3. PELAPORAN KINERJA

Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup.

Tanggapan DLH :

Untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) capaian tahun 2021 (92,79) melebihi target tahun 2021 (91,27) dan capaian tahun 2022 (93,54) melebihi target yang ditentukan untuk tahun 2022 (91,38), hal ini disebabkan karena pada saat penyusunan Renstra tahun 2021 – 2026 untuk target Indeks Kualitas Udara (IKU) mengacu terhadap Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 Tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.

C. CAPAIAN KINERJA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TA. 2023

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi DLH Kabupaten Tanah Bumbu. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang dilakukan untuk menilai apakah kebijakan yang telah ditempuh selama tahun 2023 dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dinas dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan pembangunan Kabupaten sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja Utama, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Persentase Capaian	Kategori Capaian	Nilai Means
1	Lebih dari 90 %	Sangat Berhasil	95,5
2	81 % sampai 90 %	Baik (Berhasil)	85,5
3	61 % sampai 80 %	Cukup (Berhasil)	70,5
4	Kurang dari 60 %	Kurang (Berhasil)	30,5

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing - masing indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing - masing indikator disajikan pada tabel pengukuran kinerja sasaran strategis tahun 2023. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun 2023 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Ada 3 (dua) Kinerja Utama, ada 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada DLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun Tabel Pengukuran Kinerja disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Utama Strategi Tahun 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	56,11	58,15	103,64	Sangat Berhasil
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,48	96,17	105,12	Sangat Berhasil
		Pemenuhan Data Dukung Pengendalian Emisi GRK	100	100	100	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Pengelolaan Lahan Sesuai Kewenangan	Peningkatan Pengelolaan Lahan Sesuai Kewenangan	77,27	100	129,41	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Upaya Penanganan Dan Pengurangan Sampah	Persentase Volume Sampah Terangkut	72%	76,59%	106,37%	Sangat Berhasil
		Persentase Volume Sampah Yang Direduksi	27%	17,05%	63,15%	Cukup Berhasil

C.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Pengukuran kinerja DLH Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menilai capaian kinerja, dilakukan dengan membandingkan secara relatif (%) realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan mengelompokkan dalam kategori penilaian kinerja.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

KINERJA UTAMA : MENINGKATNYA UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. INDEKS KUALITAS AIR 2. INDEKS KUALITAS UDARA 3. PEMENUHAN DATA DUKUNG PENGENDALIAN EMISI GRK
KINERJA UTAMA : MENINGKATNYA PENGELOLAAN LAHAN SESUAI KEWENANGAN	4. PENINGKATAN PENGELOLAAN LAHAN SESUAI KEWENANGAN
KINERJA UTAMA : MENINGKATNYA UPAYA PENANGANAN DAN PENGURANGAN SAMPAH	5. PERSENTASE VOLUME SAMPAH TERANGKUT
	6. PERSENTASE VOLUME SAMPAH TEREDUKSI

Kinerja Utama tersebut terdiri atas 6 (enam) indikator kinerja utama, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja DLH Tahun 2023

	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja	Kategori	Nilai Means
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	56,11	58,15	103,64	Sangat Berhasil	95,5
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,48	96,17	105,12	Sangat Berhasil	95,5
		Pemenuhan Data Dukung Pengendalian Emisi GRK	100	100	100	Sangat Berhasil	95,5
2	Meningkatnya Pengelolaan Lahan Sesuai Kewenangan	Peningkatan Pengelolaan Lahan Sesuai Kewenangan	77,27	100	129,41	Sangat Berhasil	95,5
3	Meningkatnya Upaya Penanganan Dan Pengurangan Sampah	Persentase Volume Sampah Terangkut	72%	76,59%	106,37%	Sangat Berhasil	95,5
		Persentase Volume Sampah Yang Direduksi	27%	17,05%	63,15%	Cukup Berhasil	70,5

Capaian Indikator Kinerja Utama (Sangat Berhasil)	= (5 x 95,5)/6	= 79,58
Capaian Indikator Kinerja Utama (Cukup Berhasil)	= (1 x 70,5)/6	= 11,75
Total rata-rata capaian Kinerja Utama		= 91,33

Secara keseluruhan, capaian kinerja utama Eselon II berada pada kategori SANGAT BERHASIL.

Dari tabel dan perhitungan diatas dapat diuraikan evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja utama tersebut :

Pada IKU pertama capaian Indeks Kualitas Air (IKA) melebihi target yang ditetapkan yaitu terealisasi pada kondisi SEDANG (58,15), sedangkan targetnya adalah IKA dalam kondisi SEDANG (56,11) atau dengan tingkat capaian sebesar 103,64%. IKU Kedua Indeks Kualitas Udara melebihi target yang ditetapkan sebesar 91,48 pada kategori kondisi udara SANGAT BAIK, terealisasi pada kondisi SANGAT BAIK (96,17) atau dengan tingkat capaian sebesar 105,12%. Sedangkan IKU ketiga yaitu Pemenuhan data dukung pengendalian emisi GRK, dari target sebesar 100% terealisasi sebesar 100% atau dengan tingkat capaian 100%. Dan untuk IKU keempat yaitu Persentase Tutupan Vegetasi terealisasi melebihi target yang ditetapkan sebesar 100% yaitu terealisasi sebesar 90,67% atau dengan tingkat capaian sebesar 90,67%. Berikut evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja utama tersebut :

- **INDEKS KUALITAS AIR (IKA)**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja	Kategori
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indeks Kualitas Air (IKA)	56,11	58,15	103,64	Sangat Berhasil

Indikator tersebut dilaksanakan melalui **Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan Hidup** dengan kegiatan utamanya adalah **Pemantauan Kualitas Lingkungan**.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang

merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Pemantauan oleh Kabupaten dilakukan 2 kali dalam 1 tahun pada musim hujan dan musim kemarau. Lokasi Pemantauan pada :

- a. 3 DAS (DAS Batulicin, Kusan dan Satui) pada hulu, tengah, hilir
- b. 21 Sungai pada hulu dan hilir

Dalam melakukan analisa penetapan status mutu air, metode yang digunakan adalah metode PI (*Pollution Index*) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perhitungan dilakukan berdasarkan parameter Indeks Kualitas Air sebanyak 8 (delapan) parameter yang meliputi pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform dengan menggunakan baku mutu berdasarkan mutu air kelas II yang tercantum dalam lampiran IV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui persamaan sebagai berikut :

$$IP_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_M^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_R^2}{2}}$$

Keterangan :

- IP_j = Pencemaran bagi peruntukan (j)
- L_{ij} = Konsentrasi baku peruntukan air (j)
- C_i = Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)
- (C_i/L_{ij})_M = Nilai maksimum C_i/L_{ij}
- (C_i/L_{ij})_R = Nilai rata - rata C_i/L_{ij}

Setelah didapatkan nilai IP_j maka dilakukan pengklasifikasian status mutu berdasarkan range nilai sebagai berikut :

- $0 \leq IP_j \leq 1$ = Baik (memenuhi baku mutu)
- $1 \leq IP_j \leq 5$ = Cemar ringan
- $5 \leq IP_j \leq 10$ = Cemar sedang
- $IP_j > 10$ = Cemar berat

Tabel. 3.4 Jumlah Parameter Kritis dan Indikator Faktor Pengaruh

No	Parameter	Jumlah Parameter Kritis		Indikator Faktor Pengaruh
		Tahap I	Tahap II	
1	pH	4	4	<ul style="list-style-type: none"> Limbah industri Limbah pertambangan Limbah rumah sakit dan pelayanan kesehatan Limbah domestik dari area pemukiman Air limpasan yang membawa kandungan pupuk dan pestisida Aktivitas vulkanik alamiah
2	Residu Tersuspensi (TSS)	16	17	<ul style="list-style-type: none"> Limbah industri Limbah pertambangan Limbah rumah sakit dan pelayanan kesehatan Limbah domestik dari area pemukiman Air limpasan yang membawa kandungan pupuk dan pestisida Air limpasan dari lahan terbuka
3	Biological Oksigen Demand (BOD)	0	1	<ul style="list-style-type: none"> Limbah industri Limbah rumah sakit dan pelayanan kesehatan Limbah domestik dari area pemukiman Air limpasan yang membawa kandungan pupuk dan pestisida Dekomposisi sampah organik
4	Chemical Oksigen Demand (BOD)	0	0	<ul style="list-style-type: none"> Limbah industri Limbah pertambangan Limbah rumah sakit dan pelayanan kesehatan Limbah domestik dari area pemukiman Air limpasan yang membawa kandungan pupuk dan pestisida Dekomposisi sampah organik
5	Oksigen Terlarut (DO)	0	3	<ul style="list-style-type: none"> Limbah industri Limbah pertambangan Limbah rumah sakit dan pelayanan kesehatan Limbah domestik dari area pemukiman Air limpasan yang membawa kandungan pupuk dan pestisida Dekomposisi mikroorganisme
6	Total Fosfat	0	0	<ul style="list-style-type: none"> Limbah domestik dari area pemukiman Air limpasan yang membawa kandungan pupuk dan pestisida Air limpasan dari lahan terbuka
7	Nitrit Sebagai N (NO ₂)	1	1	<ul style="list-style-type: none"> Limbah industri yang menggunakan bahan kimia nitrit Limbah domestik dari area pemukiman Air limpasan yang membawa kandungan pupuk dan pestisida Dekomposisi alamiah bahan organik ke perairan
8	Fecal Coliform	21	2	Limbah domestik dari area pemukiman dan peternakan
Total		42	28	

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah total parameter IKA hasil pemantauan tahap I yang melebihi baku mutu adalah sebanyak 42 parameter dan 366 parameter yang memenuhi baku mutu dari total 408 parameter. Berdasarkan hal tersebut didapatkan persentase parameter IKA yang memenuhi adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase parameter IKA yang memenuhi baku mutu} = \frac{\text{parameter IKA yang memenuhi baku mutu}}{\text{total parameter}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase parameter IKA yang memenuhi baku mutu} = \frac{366}{408} \times 100\%$$

$$\text{Persentase parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu} = 89,71\%$$

Untuk jumlah total parameter IKA hasil pemantauan tahap II yang melebihi baku mutu adalah sebanyak 28 parameter dan 380 parameter yang memenuhi baku mutu dari total 408 parameter. Berdasarkan hal tersebut didapatkan persentase parameter IKA yang memenuhi adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase parameter IKA yang memenuhi baku mutu} = \frac{\text{parameter IKA yang memenuhi baku mutu}}{\text{total parameter}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase parameter IKA yang memenuhi baku mutu} = \frac{380}{408} \times 100\%$$

$$\text{Persentase parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu} = 93.13\%$$

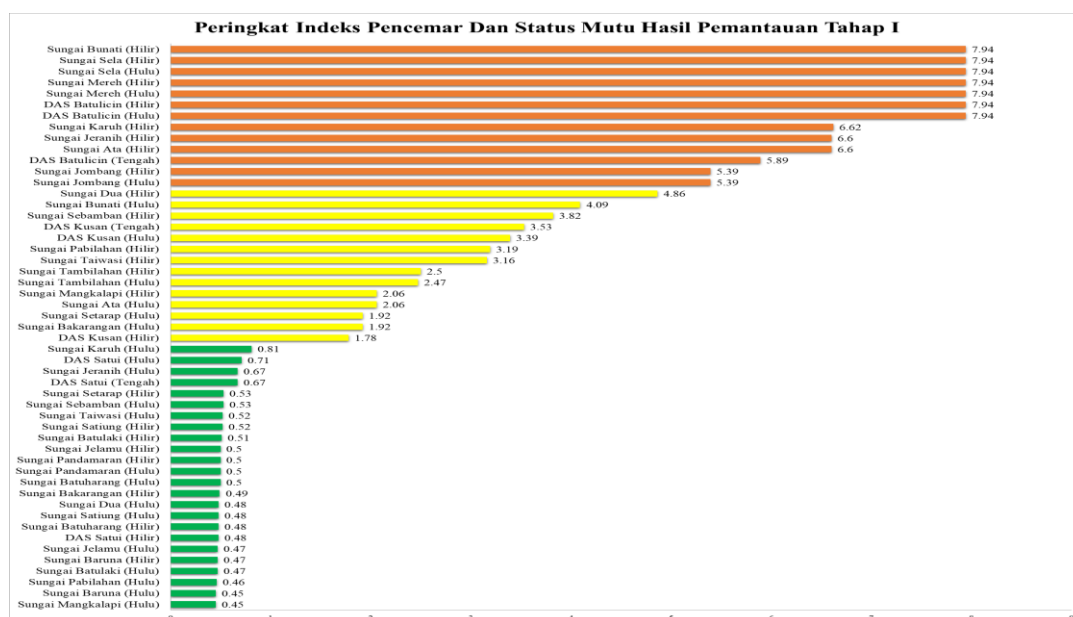
Hasil Pemantauan Tahap I, dari Target 56,11, didapatkan Nilai IKA sebesar 54,44 dengan status mutu hasil pemantauan kabupaten meliputi : 24 titik memenuhi, 14 titik cemar ringan, 13 titik cemar sedang serta status mutu hasil pemantauan provinsi meliputi : 1 titik memenuhi, 2 titik cemar ringan.

Hasil Pemantauan Tahap II, dari Target 56,11, didapatkan Nilai IKA sebesar 61,85 dengan status mutu hasil pemantauan kabupaten meliputi : 34 titik memenuhi, 15 titik cemar ringan, 2 titik cemar sedang serta status mutu hasil pemantauan provinsi meliputi : 3 titik cemar ringan.

Dari hasil pembobotan rata – rata dari IKA Tahap I sebesar 54,44 dan IKA Tahap II sebesar 61,85 maka didapatkan IKA Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 sebesar 58,15 (termasuk dalam kategori sedang) dengan capaian kinerja sebesar 103,64 %.

STATUS MUTU AIR DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DAN AIR SUNGAI

Dan dari hasil perhitungan terhadap hasil pemantauan kualitas air Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Air Sungai periode tahap I dan II sehingga didapatkan data – data sebagai berikut :

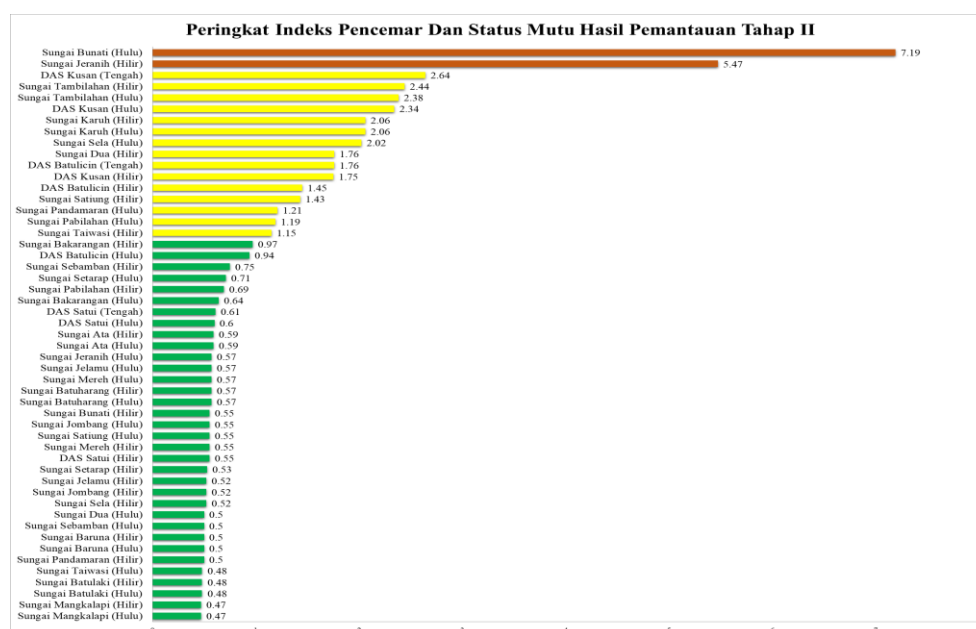


Gambar 3.1 Peringkat Indeks Pencemar Dan Status Mutu Air Hasil Pemantauan Tahap I

Tabel 3.5 Status Mutu Air Pemantauan Tahap I

No	Status Mutu Air	Jumlah Titik Pantau
1	Memenuhi	24
2	Cemar Ringan	14
3	Cemar Sedang	13
4	Cemar Berat	0
Total		51

Status mutu air terdiri dari status memenuhi dengan jumlah sebanyak 24 titik pantau, status cemar ringan sebanyak 14 titik pantau dan status cemar sedang sebanyak 13 titik pantau dengan total keseluruhan sebanyak 51 titik pantau. Kecenderungan sebaran cemar sedang berada pada titik pantau DAS Batulicin dan Sub DAS Batulicin.



Gambar 3.2. Peringkat Indeks Pencemar Dan Status Mutu Air Hasil Pemantauan Tahap II

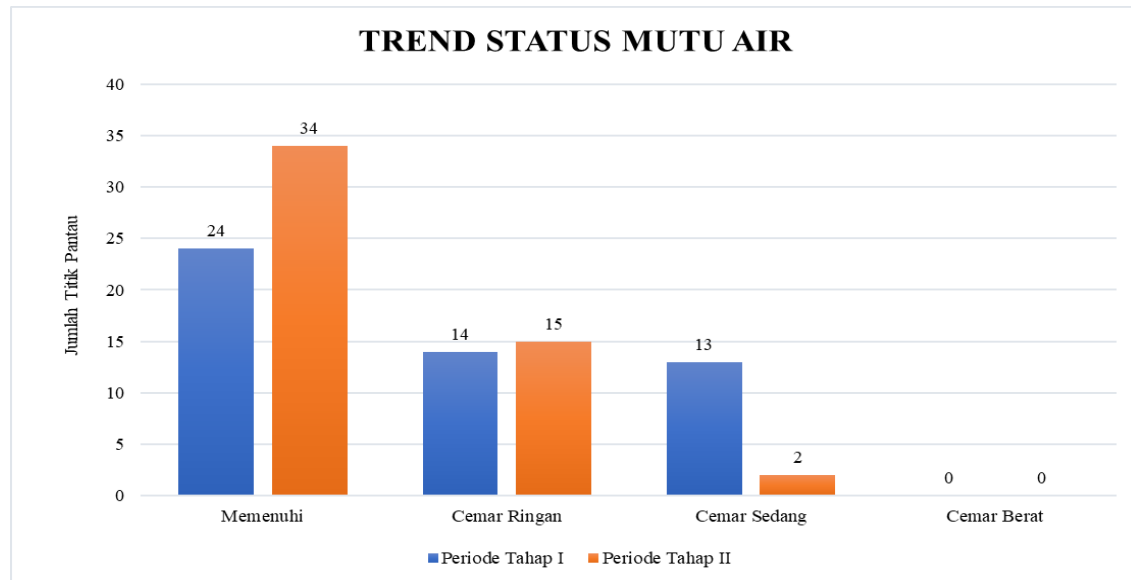
Tabel 3.6 Status Mutu Air Pemantauan Tahap II

No	Status Mutu Air	Jumlah Titik Pantau
1	Memenuhi	34
2	Cemar Ringan	15
3	Cemar Sedang	2
4	Cemar Berat	0
Total		51

Status mutu air terdiri dari status memenuhi dengan jumlah sebanyak 34 titik pantau, status cemar ringan sebanyak 15 titik pantau dan status cemar sedang

sebanyak 2 titik pantau dengan total keseluruhan sebanyak 51 titik pantau. Status cemar sedang berada pada titik pantau Sungai Bunati (hulu) dan Sungai Jeranih (hilir).

Dari hasil perhitungan indeks pencemar dan status mutu hasil pemantauan kualitas air Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Sungai periode tahap I dan II didapatkan grafik trend status mutu air seperti gambar di bawah ini :



Gambar 3.3 Grafik Trend Status Mutu Air

Status mutu air mengalami peningkatan yang baik dari periode tahap I ke periode tahap II dimana hal ini terlihat dengan adanya peningkatan titik pantau yang memiliki status memenuhi baku mutu dari 24 titik pantau menjadi 34 titik pantau dan penurunan titik pantau yang memiliki status cemar sedang dari 13 titik pantau menjadi 2 titik pantau.

Perhitungan Indeks Kualitas Air mengacu terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perhitungan dilakukan melalui penginputan parameter Indeks Kualitas Air sebanyak 8 (delapan) parameter yang meliputi pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform ke website ppkl.menlhk.go.id dengan mekanisme perhitungan pembobotan berdasarkan jumlah titik pantau pada setiap status mutu air dengan nilai bobot sebagai berikut :

- Memenuhi = 70
- Cemar ringan = 50
- Cemar sedang = 30
- Cemar berat = 10

Untuk kategori nilai Indeks Kualitas Air terbagi menjadi 5 (lima) kategori dengan angka rentang seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7 Kategori Indeks Kualitas Air

No	Kategori	Angka rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq IKA \leq 100$
2	Baik	$70 \leq IKA \leq 90$
3	Sedang	$50 \leq IKA \leq 70$
4	Kurang	$25 \leq IKA \leq 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq IKA \leq 25$

Perhitungan nilai IKA akan dilakukan berdasarkan setiap periode pemantauan untuk menggambarkan nilai indeks pada setiap perwakilan musim yang kemudian akan dilakukan pembobotan untuk mendapat nilai IKA selama 1 (satu) tahun. Dalam melakukan perhitungan IKA akan menggabungkan jumlah status mutu air permukaan hasil pemantauan Pemerintah Kabupaten dengan hasil Pemantauan Provinsi yang dilakukan pada titik pantau sungai yang berada di wilayah administrasi kabupaten. Dari hasil perhitungan maka didapatkan nilai IKA pada setiap periode pemantauan seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

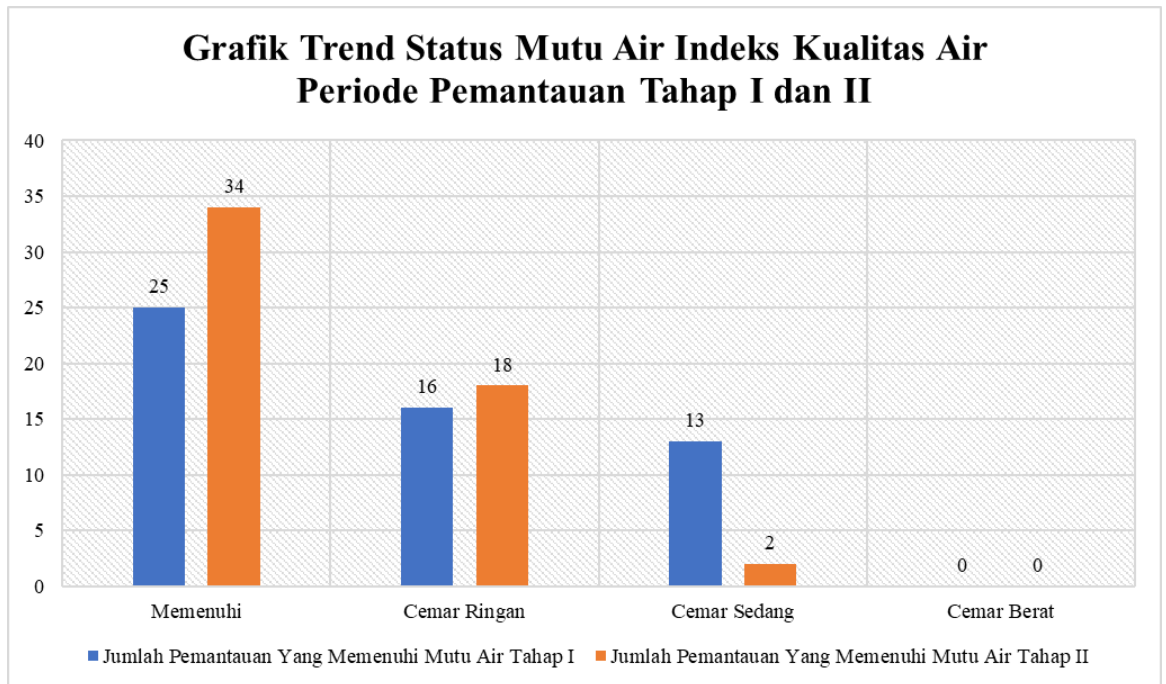
Tabel 3.8 Indeks Kualitas Air Periode Tahap I

No	Mutu Air	Jumlah Pemantauan Yang Memenuhi Mutu Air			Persentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks Per Mutu Air	Kategori
		Kabupaten	Provinsi	Total				
1	Memenuhi	24	1	25	0.46	70	32.41	Sedang
2	Cemar Ringan	14	2	16	0.30	50	14.81	
3	Cemar Sedang	13	0	13	0.24	30	7.22	
4	Cemar Berat	0	0	0	0.00	10	0.00	
		51	3	54	1.00		54.44	

Tabel 3.9 Indeks Kualitas Air Periode Tahap II

No	Mutu Air	Jumlah Pemantauan Yang Memenuhi Mutu Air			Persentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks Per Mutu Air	Kategori
		Kabupaten	Provinsi	Total				
1	Memenuhi	34	0	34	0.63	70	44.07	Sedang
2	Cemar Ringan	15	3	18	0.33	50	16.67	
3	Cemar Sedang	2	0	2	0.04	30	1.11	
4	Cemar Berat	0	0	0	0.00	10	0.00	
		51	3	54	1.00		61.85	

Dari hasil perhitungan bahwa diketahui bahwa nilai Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami peningkatan dari periode pemantauan tahap I ke tahap II sebesar 7.41 dengan faktor pendorong terjadinya peningkatan mutu air seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 3.4 Grafik Trend Status Mutu Air Indeks Kualitas Air Periode Pemantauan Tahap I dan II

Dari grafik di atas menggambarkan bahwa status mutu air memenuhi mengalami peningkatan sebesar 9 titik pantau dari 25 titik pantau pada periode tahap I menjadi 34 titik pantau pada periode tahap II dan status cemaran sedang mengalami penurunan sebesar 11 titik pantau dari 13 titik pantau pada periode tahap I menjadi 2 titik pantau pada periode tahap II.

Dengan melakukan pembobotan nilai status mutu air Indeks Kualitas Air (IKA) tahap I dan tahap II maka didapatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2023 seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.10 Indeks Kualitas Air Tahun 2023

No	Mutu Air	Jumlah Pemantauan Yang Memenuhi Mutu Air			Persentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks Per Mutu Air	Kategori
		Tahap I	Tahap II	Total				
1	Memenuhi	25	34	59	0.55	70	38.24	Sedang
2	Cemar Ringan	16	18	34	0.31	50	15.74	
3	Cemar Sedang	13	2	15	0.14	30	4.17	
4	Cemar Berat	0	0	0	0.00	10	0.00	
		54	54	108	1.00		58.15	

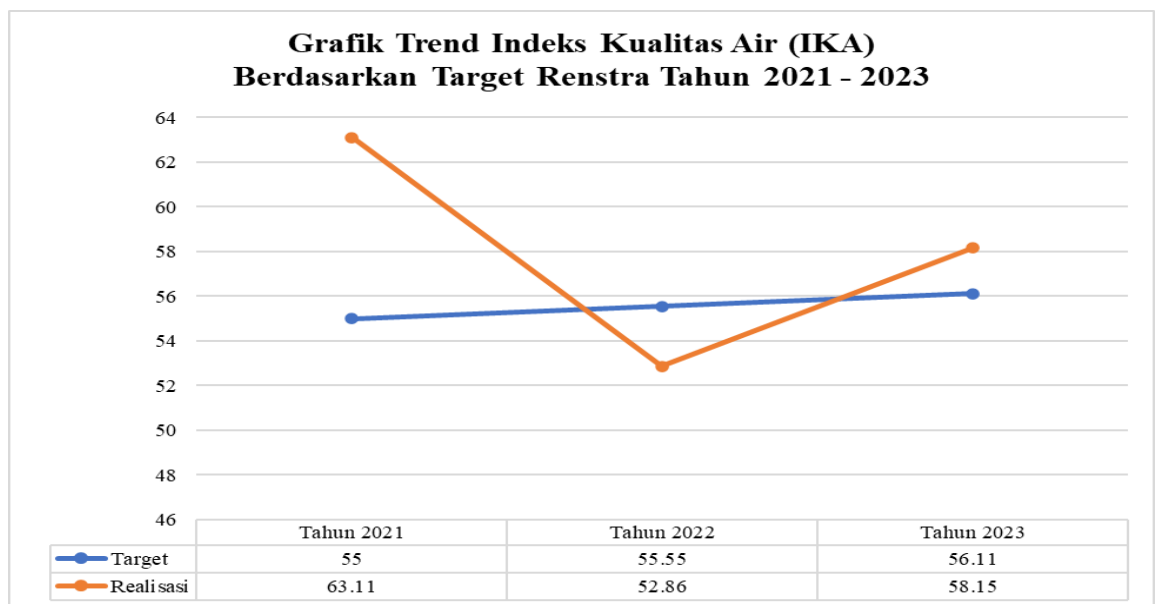
Memenuhinya nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dalam kategori sedang menggambarkan bahwa kualitas air memiliki tingkat pencemaran sedang dimana ada beberapa parameter kualitas air yang melebihi baku mutu namun belum mencapai

tingkat pencemaran yang parah. Untuk faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Indeks Kualitas Air (IKA) seperti yang terlihat di bawah ini :

Tabel 3.11 Indikator Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Indeks Kualitas Air Tahun 2023

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Dukungan APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu	Masih tingginya sebaran fecal coliform pada saat musim penghujan yang diindikasi berasal dari aliran resapan septik tank yang belum memenuhi standar
2	Dukungan UPT Laboratorium melalui personal pengambil contoh dan pengujian laboratorium	Masih ada beberapa titik pantau air yang memiliki status mutu cemar ringan dan berat yang diindikasi merupakan badan penerima yang berasal dari kegiatan pertambangan dan industri
3	Dukungan dari SKPD terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terkait program kegiatan terkait pengendalian, pengawasan dan pemulihan dalam peningkatan kualitas air	Belum optimalnya kegiatan reklamasi dan revegetasi yang dilakukan perusahaan
4	Dukungan dari bidang terkait Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu terkait program kegiatan terkait pengendalian, pengawasan dan pemulihan dalam peningkatan kualitas air	Masih banyak lahan – lahan akses terbuka dari kegiatan pertambangan ilegal
5	Dukungan dari stakeholder/pelaku usaha terkait program kegiatan terkait pengendalian dan pemulihan dalam peningkatan kualitas air	

Dengan melakukan evaluasi lebih lanjut terkait trend Indeks Kualitas Air (IKA) berdasarkan target Renstra Tahun 2021 – 2023 sehingga didapatkan grafik trend seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 3.5 Grafik Trend Indeks Kualitas Air (IKA) Berdasarkan Target Renstra Tahun 2021 – 2023

Pencapaian nilai IKA tertinggi dalam rentang Tahun 2021 – 2023 terjadi pada tahun 2021 sebesar 63.11 dari target 55 dimana hal ini disebabkan karena periode tersebut pemantauan hanya dilakukan pada 3 DAS dan 20 sungai dengan total titik pantau sebanyak 29 titik yang tersebar 3 titik pantau setiap DAS dan 1 titik pantau setiap sungai sehingga hasil IKA belum menggambarkan secara representatif karena data yang dimiliki masih sangat terbatas.

Dari hasil Rapat Kerja Teknis Pemantauan Tahun 2022 memutuskan bahwa untuk sebaran titik pantau pada sungai minimal berjumlah 2 titik pantau pada bagian titik hulu dan hilir sehingga terjadi penambahan jumlah titik pantau dari 29 titik menjadi 51 titik pantau di tahun 2022. Penambahan jumlah titik pantau ini memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan nilai IKA pada tahun 2022 sebesar 52.86 dan belum mencapai target 55.55. Faktor pengaruhnya adalah dengan semakin banyaknya sebaran titik pantau maka memberikan gambaran representatif terhadap kondisi kualitas air permukaan di Kabupaten Tanah Bumbu dan hal ini menjadi bahan evaluasi ternyata masih ada beberapa titik air permukaan yang memiliki tingkat pencemaran ringan – sedang.

Berdasarkan hasil capaian tahun 2022 yang menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan program kegiatan terkait pengendalian kualitas air maka nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 58.15 dari target sebesar 56.11 dimana hal ini menggambarkan implementasi program kegiatan terkait pengendalian kualitas air telah berjalan secara efektif dan efisien.

Indikasi factor pendorong tercapainya realisasi IKA disebabkan berbagai factor antara lain:

1. Menggambarkan bahwa program program terkait pengendalian pencemaran air di Kabupaten Tanah Bumbu sudah berjalan secara efektif dan efisien sehingga memberikan implikasi positif terhadap peningkatan kualitas air
2. Pengaruh musim kemarau yang memiliki curah hujan relative rendah sehingga menurunkan kuantitas air limpasan dari area area yang terbuka/kritis yang cenderung membawa material material yang dapat menyebabkan kekeruhan jika langsung mengalir ke badan air permukaan

Rekomendasi kedepannya untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebagai berikut :

1. Membuat Dokumen Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan
2. Membuat Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
3. Melakukan tinjau ulang terkait batas konsentrasi dan debit air limbah yang diperbolehkan dalirkan oleh pelaku usaha berdasarkan daya tampung badan air permukaan

4. Melakukan tindakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memiliki unit pengelolaan air limbah
5. Melakukan pemulihan terhadap badan air permukaan yang mengalami status cemar dengan melibatkan stakeholder

- **INDEKS KUALITAS UDARA**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja	Kategori
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,48	96,17	105,12	Sangat Berhasil

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu dengan parameter yang diuji antara lain parameter NO₂ dan SO₂ sebanyak 3 periode pemantauan dengan metode passive sampler dalam 1 (satu) tahun, 2 kali pemantauan oleh KLHK dan 1 kali pemantauan oleh DLH Provinsi pada 4 titik pantau mewakili transportasi, permukiman, industri, dan perkantoran.

Sejak Tahun 2021, metode perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) menggunakan metode perhitungan dari metode manual menggunakan aloritmexcel menjadi perhitungan secara online melalui website <https://ppkl.menlhk.go.id> dengan aloritmexcel terbaru. Dari target IKU tahun 2023 sebesar 91,48, capaian nilai IKU Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 96,17 (termasuk kategori sangat baik). Capaian kinerja IKU Tahun 2023 adalah sebesar 105,12% dari target 91.48

Pemantauan udara ambien dengan metode passive sampler dilakukan pada 1 titik pantau setiap kawasan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) periode yang terdiri dari sebagai berikut :

- Pemantauan udara ambien metode passive sampler periode tahap I dilakukan untuk mewakili periode musim hujan yang dilaksanakan bersama dengan tim Kementerian Lingkungan Hidup
- Pemantauan udara ambien metode passive sampler periode tahap II dilakukan untuk mewakili periode musim kemarau yang dilaksanakan bersama dengan tim Kementerian Lingkungan Hidup

- Pemantauan udara ambien metode passive sampler periode tahap III dilakukan untuk mewakili periode musim kemarau yang dilaksanakan bersama dengan tim Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

Dari hasil pemantauan periode tahap I, II dan III maka didapatkan kualitas udara ambien metode passive sampler seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.12 Hasil Pemantauan Tahap I Kualitas Udara Ambien Metode Passive Sampler

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Titik Pantau Kawasan			
				Perkantoran	Perumahan	Industri	Transportasi
1	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	µg/m ³	-	3.16	6.4	4.73	4.71
2	Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/m ³	-	4.52	4.72	4.11	8.97

Tabel 3.13 Hasil Pemantauan Tahap II Kualitas Udara Ambien Metode Passive Sampler

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Titik Pantau Kawasan			
				Perkantoran	Perumahan	Industri	Transportasi
1	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	µg/m ³	-	3.86	7.14	5.27	6.23
2	Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/m ³	-	4.34	5.18	5.75	10.52

Tabel 3.14 Hasil Pemantauan Tahap III Kualitas Udara Ambien Metode Passive Sampler

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Titik Pantau Kawasan			
				Perkantoran	Perumahan	Industri	Transportasi
1	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	µg/m ³	-	1.7	3.1	1.9	6.9
2	Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/m ³	-	1.7	1.2	1.3	1.2

Dari hasil pemantauan kualitas udara ambien metode passive sampler periode tahap I diketahui bahwa semua parameter kualitas udara ambien masih belum memiliki baku mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah sehingga didapatkan persentase parameter kualitas udara yang memenuhi adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase parameter kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu} = \frac{\text{parameter yang memenuhi baku mutu}}{\text{total parameter}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase parameter kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu} = \frac{8}{8} \times 100\%$$

$$\text{Persentase parameter kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu} = 100\%$$

Dari hasil pemantauan kualitas udara ambien metode passive sampler periode tahap II diketahui bahwa semua parameter kualitas udara ambien masih belum

memiliki baku mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah sehingga didapatkan persentase parameter kualitas udara yang memenuhi adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase parameter kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu} = \frac{\text{parameter yang memenuhi baku mutu}}{\text{total parameter}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase parameter kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu} = \frac{8}{8} \times 100\%$$

$$\text{Persentase parameter kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu} = 100\%$$

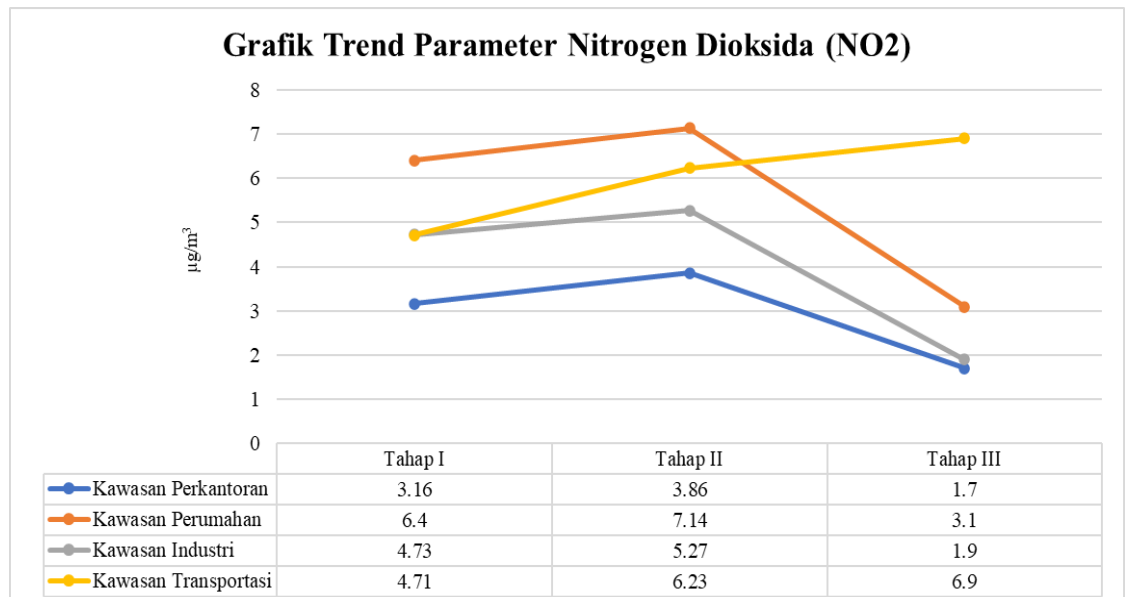
Dari hasil pemantauan kualitas udara ambien metode passive sampler periode tahap III diketahui bahwa semua parameter kualitas udara ambien masih belum memiliki baku mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah sehingga didapatkan persentase parameter kualitas udara yang memenuhi adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase parameter kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu} = \frac{\text{parameter yang memenuhi baku mutu}}{\text{total parameter}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase parameter kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu} = \frac{8}{8} \times 100\%$$

$$\text{Persentase parameter kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu} = 100\%$$

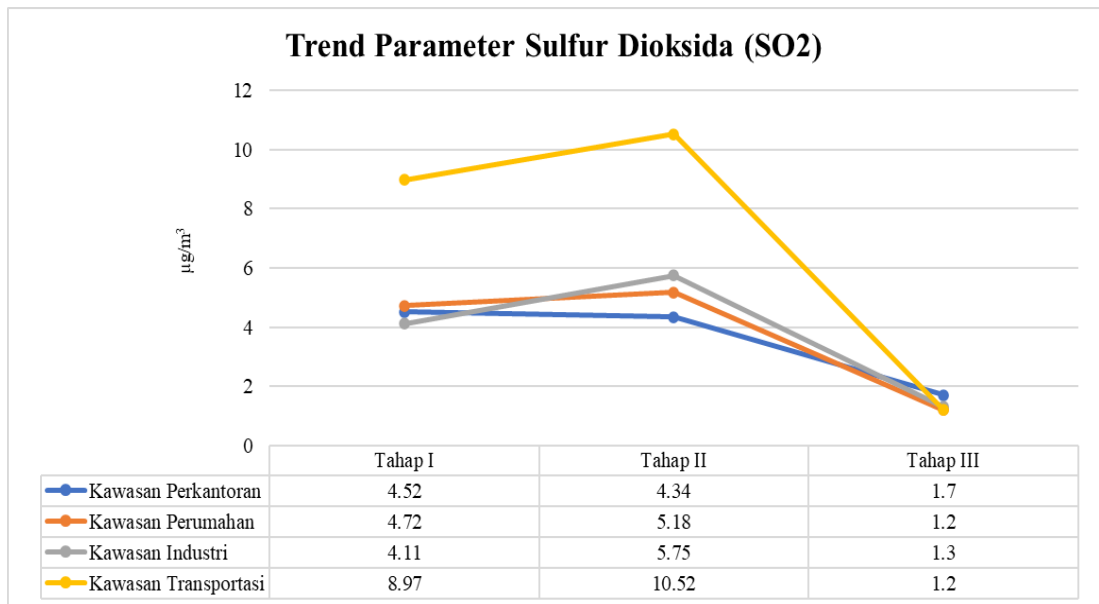
Untuk data trend kandungan parameter hasil pemantauan kualitas udara ambien metode passive sampler yang telah dilaksanakan pada tahap I, II dan III pada 4 kawasan seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 3.6 Grafik Trend Parameter Nitrogen Dioksida (NO₂)

Trend parameter kandungan nitrogen dioksida (NO₂) memiliki kecenderungan yang relatif sama dimana peningkatan terjadi pada periode tahap II dan menurun

pada periode tahap III namun anomali terjadi pada kawasan transportasi dimana trend terus meningkat hingga periode tahap III. Grafik trend tertinggi berada pada kawasan perumahan.



Gambar 3.7 Grafik Trend Parameter Sulfur Dioksida (SO₂)

Trend parameter kandungan sulfur dioksida (SO₂) memiliki kecenderungan yang relatif sama dimana peningkatan terjadi pada periode tahap II dan menurun pada periode tahap III. Grafik trend tertinggi berada pada kawasan transportasi.

ANALISA INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) mengacu terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perhitungan dilakukan melalui penginputan parameter Indeks Kualitas Udara sebanyak 2 (dua) parameter yang meliputi NO₂ dan SO₂ ke website pplk.menlhk.go.id dengan mekanisme perhitungan melalui rumusan sebagai berikut :

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{90} (I_{Eu} - 0.1) \right)$$

$$I_{Eu} = \frac{\text{Indeks } NO_2 + \text{Indeks } SO_2}{2}$$

$$\text{Indeks } NO_2 = \frac{\text{Rata - rata } NO_2}{\text{Baku Mutu}_{Eu}}$$

$$\text{Indeks } SO_2 = \frac{\text{Rata - rata } SO_2}{\text{Baku Mutu}_{Eu}}$$

Keterangan :

IKU = Indeks kualitas udara

I_{Eu} = Indeks udara model EU

Rata – rata NO₂ = Rerata hasil pengukuran NO₂ dari 4 lokasi
Rata – rata SO₂ = Rerata hasil pengukuran SO₂ dari 4 lokasi
Baku Mutu_{EU} = Baku mutu referensi model EU

Untuk kategori nilai Indeks Kualitas Udara terbagi menjadi 5 (lima) kategori dengan angka rentang seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.15 Kategori Indeks Kualitas Udara

No	Kategori	Angka rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq \text{IKU} \leq 100$
2	Baik	$70 \leq \text{IKU} \leq 90$
3	Sedang	$50 \leq \text{IKU} \leq 70$
4	Kurang	$25 \leq \text{IKU} \leq 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq \text{IKU} \leq 25$

Dari hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) mengacu terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan menggunakan data parameter hasil pemantauan kualitas udara metode passive sampler tahap I, II dan III yang meliputi parameter NO₂ dan SO₂ maka didapatkan nilai IKU seperti yang terlihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.16 Nilai Rata – rata Kandungan NO₂

No	Kawasan	Kandungan NO ₂ (µg/m ³)			Rata - rata
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	
1	Perkantoran	3.16	3.86	1.7	2.91
2	Perumahan	6.4	7.14	3.1	5.55
3	Industri	4.73	5.27	1.9	3.97
4	Transportasi	4.71	6.23	6.9	5.95
Rata - rata		4.75	5.63	3.40	4.59

Tabel 3.17 Nilai Rata – rata Kandungan SO₂

No	Kawasan	Kandungan SO ₂ (µg/m ³)			Rata - rata
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	
1	Perkantoran	4.52	4.34	1.7	3.52
2	Perumahan	4.72	5.18	1.2	3.70
3	Industri	4.11	5.75	1.3	3.72
4	Transportasi	8.97	10.52	1.2	6.90
Rata - rata		5.58	6.45	1.35	4.46

Tabel 3.18 Indeks Kualitas Udara Tahun 2023

No	Parameter	Rataan Per Parameter ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Baku Mutu E_u	Indeks Dibagi Baku Mutu ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Indeks	IKU	Kategori
1	NO ₂	4.59	40	0.11	0.17	96.17	Sangat Baik
2	SO ₂	4.46	20	0.22			

Dengan memenuhi nilai IKU dalam kategori sangat baik menunjukkan bahwa kualitas udara pada tingkat dianggap sangat baik dan tidak memberikan dampak berarti pada kesehatan manusia. Kecenderungannya, kandungan konsentrasi polutan udara berada dalam rentang yang rendah dan berada dalam level yang aman bagi kesehatan manusia. Namun jika ditinjau secara regional, sebaran kawasan yang dilakukan pengukuran belum mewakili kawasan regional secara menyeluruh karena hanya terbatas pada kawasan yang terletak di Kecamatan Batulicin dan Simpang Empat, selain itu parameter kunci yang dilakukan pengukuran hanya sebatas parameter NO₂ dan SO₂ dengan indikator faktor pengaruh seperti yang terlihat di bawah ini :

Tabel 3.19. Indikator Faktor Pengaruh Parameter Indeks Kualitas Udara

No	Parameter	Indikator Faktor Pengaruh
1	NO ₂	Berasal dari emisi kendaraan bermotor, industri, pembangkit listrik, pembakaran bahan fosil dan kandungan senyawa kimia yang mengandung nitrogen pada ozon di atmosfer
2	SO ₂	Berasal dari emisi kendaraan bermotor, industri, pembangkit listrik, pembakaran bahan fosil dan kandungan senyawa kimia yang mengandung nitrogen pada ozon di atmosfer

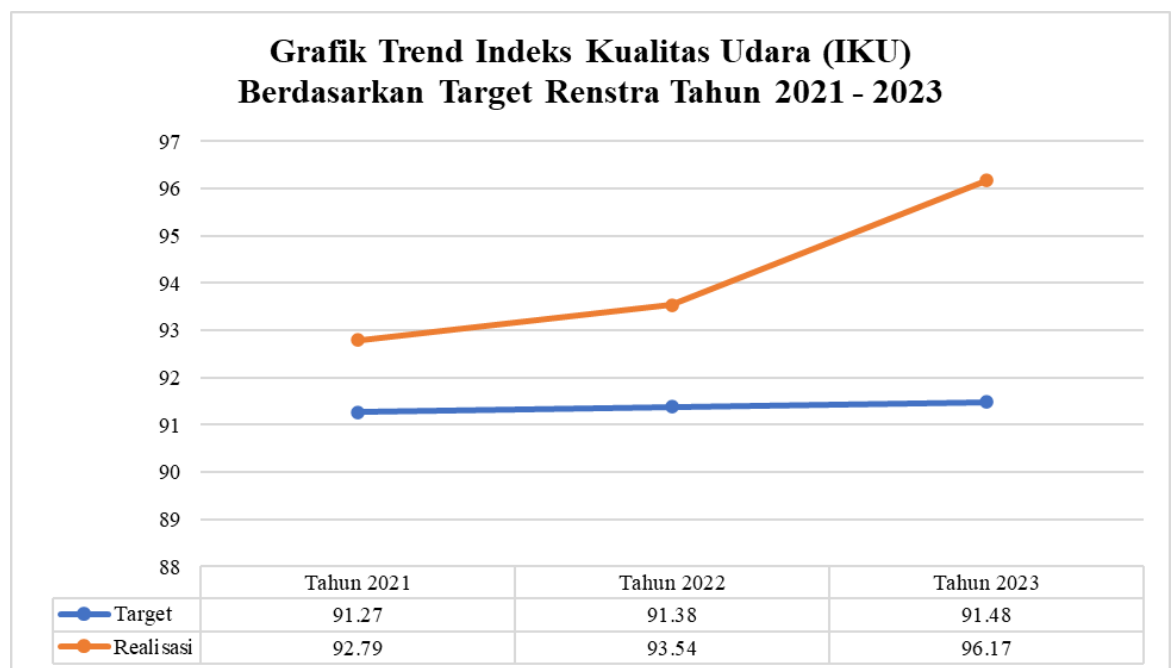
Untuk faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Indeks Kualitas Udara (IKU) seperti yang terlihat di bawah ini :

Tabel 3.20 Indikator Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Dukungan APBN Kementerian Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pemantauan tahap I dan II	Belum tersedianya anggaran APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk penambahan titik pantau pemantauan kualitas udara di Kabupaten Tanah Bumbu
2	Dukungan APBD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan pemantauan tahap III	Belum tersedianya alat Air Quality Monitoring System (AQMS) untuk pengukuran parameter PM 2.5 dan PM 10

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
3	Dukungan dari SKPD terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terkait program kegiatan terkait pengendalian, pengawasan dan pemulihan dalam peningkatan kualitas udara	Belum tersedianya ruang lingkup pengujian kualitas udara metode passive sampler pada UPT Laboratorium Lingkungan
4	Dukungan dari bidang terkait Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu terkait program kegiatan terkait pengendalian, pengawasan dan pemulihan dalam peningkatan kualitas udara	
5	Dukungan dari stakeholder/pelaku usaha terkait program kegiatan terkait pengendalian, pengawasan dan pemulihan dalam peningkatan kualitas udara	

Dengan melakukan evaluasi lebih lanjut terkait trend Indeks Kualitas Udara (IKU) berdasarkan target Renstra Tahun 2021 – 2023 sehingga didapatkan grafik trend seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 3.8 Grafik Trend Indeks Kualitas Air (IKU) Berdasarkan Target Renstra Tahun 2021 – 2023

Pencapaian nilai IKU tertinggi dalam rentang Tahun 2021 – 2023 terjadi pada tahun 2023 sebesar 96.17 dari target 91.48. Trend nilai IKU mengalami peningkatan yang menggambarkan bahwa kualitas udara mengalami perbaikan setiap tahunnya, namun jika ditinjau secara regional, sebaran kawasan yang dilakukan

pengukuran belum mewakili kawasan regional secara menyeluruh karena hanya terbatas pada kawasan yang terletak di Kecamatan Batulicin dan Simpang Empat sehingga belum dapat menggambarkan kualitas udara secara representatif untuk Kabupaten Tanah Bumbu.

Indikasi factor pendorong tercapainya realisasi IKU disebabkan berbagai factor antara lain :

1. Menggambarkan bahwa program program terkait pengendalian pencemaran udara di Kabupaten Tanah Bumbu sudah berjalan secara efektif dan efisien sehingga memberikan implikasi positif terhadap peningkatan kualitas udara.
2. Pengaruh musim kemarau yang cenderung mengakibatkan sebaran emisi bergerak vertical ke atmosfer sehingga pengaruh polutan cenderung lebih rendah terhadap kualitas udara ambien di atas permukaan.

Rekomendasi kedepannya untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) sebagai berikut :

1. Melakukan penambahan titik pantau pada area kawasan setiap kecamatan
2. Memasang alat Air Quality Monitoring System (AQMS) untuk pengukuran parameter PM 2.5 dan PM 10
3. Menambah ruang lingkup pengujian kualitas udara metode passive sampler pada UPT Laboratorium Lingkungan

Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) dapat dilihat melalui website <https://ppkl.menlhk.go.id>. Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah sebagai berikut :

1. **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**, dengan indikator kinerja Persentase Pemenuhan Data Dokumen Perencanaan LH diperoleh dari perhitungan data Lingkungan Hidup yang terpenuhi dibandingkan total kebutuhan data. Target 85% dan realisasi 100%.

Program Perencanaan Lingkungan Hidup adalah program yang bertujuan untuk penyusunan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan rencana program pengendalian dan pengelolaan LH. Dokumen perencanaan yang menjadi target penyusunan Tahun 2023 adalah berupa Dokumen IKPLHD dan IKLH untuk periode data Tahun 2022 serta penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 – 2045.

Indikator kinerja ini merupakan bentuk dari peran serta dinas dinas terkait dalam penyediaan data dukung untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan lingkungan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten.

Berdasarkan indikator dari kinerja ini adalah persentase Pemenuhan Data Dokumen Perencanaan LH dan data dokumen lingkungan hidup yang terpenuhi adalah 3 dan total kebutuhan data 3, jadi persentase data yang tersedia 100 % dari target 85% data yang terisi sehingga capaian kinerja sebesar 117,65%.

2. **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LH**, dengan indikator kinerja Persentase pemenuhan parameter kualitas Lingkungan diperoleh dari perhitungan Parameter Yang memenuhi baku mutu IKLH (Parameter IKA dan IKU) sebanyak 764 parameter dibandingkan total parameter IKLH (Parameter IKA dan IKU) yang diuji sebanyak 832 parameter dengan realisasi 91,83% dari target 86,67 % atau dengan capaian sebesar 105,95%.

Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah program yang bertujuan untuk mencapai sasaran Terwujudnya lingkungan yang bersih, hijau, lestari serta masyarakat dan industri yang berwawasan lingkungan. Adapun implementasi kegiatan utamanya di tahun 2023 meliputi :

1. Pemantauan kualitas lingkungan baik air, udara, tanah dan biomassa sebagai data penunjang pengukuran nilai IKLH Kabupaten Tanah Bumbu
2. Pembinaan Desa Program Kampung Iklim (PROKLIM) bekerjasama dengan beberapa pelaku usaha
3. Penyusunan Laporan Inventarisasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
4. Penanaman di Lahan Sangat Kritis di Areal Penggunaan Lain sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Program tersebut merupakan program utama dalam penyediaan data kualitas LH berupa nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) sehingga pencapaian indikator kinerja akan linear dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama baik tingkat OPD maupun Kabupaten yaitu nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Rumusan Indikator kinerja berdasarkan perhitungan persentase parameter kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu sebagai berikut :

$$\frac{(\text{Parameter yang memenuhi baku mutu IKLH (Parameter IKA + Parameter IKU)})}{\text{total parameter IKLH (Parameter IKA + Parameter IKU) yang diuji}} \times 100 \%$$

Dari hasil perhitungan pada Tahun 2023 untuk Indikator kinerja berupa persentase pemenuhan parameter kualitas Lingkungan dengan realisasi sebagai berikut :

1. Hasil realisasi triwulan III persentase parameter kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu adalah sebesar 89,95 % $((367+8)/(408+8))$ yang terdiri dari parameter IKA yang memenuhi baku mutu sebesar 89,95 % dan parameter IKU yang memenuhi baku mutu 100 %
2. Hasil realisasi triwulan IV persentase parameter kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu adalah sebesar 93,38 % $((381+8)/(408+8))$ yang terdiri dari parameter IKA yang memenuhi baku mutu sebesar 93,38 % dan parameter IKU yang memenuhi baku mutu 100 %

Sehingga hasil capaian sd TW IV didapatkan persentase pemenuhan parameter kualitas lingkungan tahun 2023 adalah sebesar 91,67 % dari 816 parameter pemantauan tahap I dan tahap II.

Ketercapaian persentase pemenuhan parameter kualitas lingkungan dikarenakan :

1. Anggaran pencegahan pencemaran, pemantauan, pemulihan, dan pengawasan yang cukup pada DPA Dinas Lingkungan Hidup.
2. Dukungan SOPD lain yang membantu dalam penanganan pemenuhan baku mutu parameter Indeks Kualitas Air seperti Fecal Coliform yang erat kaitannya dengan buang air besar sembarangan karena sumber dari Fecal Coliform yaitu kotoran manusia.
3. Dukungan pelaku usaha yang berkomitmen dalam menjaga kualitas lingkungan di sekitar area kegiatan

3. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3).

Target 2023 adalah sebesar 61,67% dengan formulasi perhitungan yaitu jumlah pelaku usaha yang memenuhi izin pengelolaan LB3 sebanyak 72 pelaku usaha dibandingkan total pelaku usaha yang menjadi target pengawasan yang berpotensi menghasilkan LB3 sebanyak 137 pelaku usaha dengan realisasi 52,55% atau dengan capaian 85,21%. Persentase pelaku usaha dan atau kegiatan yang memenuhi izin pengelolaan LB3 berupa rekomendasi izin penyimpanan sementara limbah B3. Tingkat capaian masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 61,67%. Hal ini disebabkan Terbatasnya OK Perjadin dan kurangnya pembinaan secara langsung ke Perusahaan, Perjadin terbagi dengan verifikasi permohonan rincian teknis yang kebanyakan baru dan tidak termasuk dalam daftar perusahaan yang menjadi target pengawasan serta target masih mengikuti pengawasan.

4. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH),**

dengan indicator Prosentase Pelaku Usaha yang taat dalam pengelolaan LH dengan formulasi adalah jumlah pelaku usaha yang dikategorikan taat dalam pengelolaan LH sesuai aturan yang berlaku dibandingkan dari total pelaku usaha yang dilakukan pengawasan dalam 1 tahun. Ditetapkannya target sebesar 100% merupakan arahan dari KLHK bahwa hal tersebut adalah kondisi ideal yang diharapkan bahwa semua pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH patuh menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan sebagaimana tertuang pada dokumen RKL-RPLnya.

Capaian tahun 2023 adalah sebesar 96,15%, yaitu sebanyak 125 pelaku usaha yang dikategorikan taat dibandingkan dari 130 pelaku usaha yang diawasi. Ketaatan pelaku usaha tersebut selain pada pelaku usaha yang aktif melakukan kegiatan namun juga kepada pelaku usaha yang tidak aktif didukung dengan surat pernyataan tidak aktif beroperasi namun tetap melaksanakan kewajibannya berupa penyampaian laporan pelaksanaan RKL-RPL nya. Capaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan karena masih ada beberapa pelaku usaha yang dikategorikan belum taat terhadap kewajiban pengelolaan LH.

Langkah ke depan yang diambil untuk peningkatan ketaatan dan penurunan jumlah pelaku usaha yang melanggar izin lingkungan dan izin PPLH adalah mengintensifkan kualitas dan kuantitas pengawasan, dengan kata lain memaksimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan kualitas lingkungannya. Serta melakukan pembinaan dan evaluasi yang kontinyu dalam memonitoring keberadaan perizinan PPLH dalam rangka meningkatkan dan membangun kualitas LH yang lebih baik serta peningkatan kesadaran pelaku usaha dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan LH.

5. **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH,**

dengan indikator kinerja Prosentase Jumlah MHA yang diakui.

Target tahun 2023 adalah 100%, dengan formulasi Jumlah MHA yang diakui / total jumlah lembaga MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA yang teridentifikasi. Tahapan kegiatan menuju pengakuan MHA adalah didahului dengan pembentukan Panitia MHA tingkat Kabupaten yang beranggotakan lintas SKPD dan lintas Sektor dan AMAN Kalsel, dan sejak tahun 2020 telah dilakukan inventarisasi serta identifikasi MHA pada 2 Lokasi yaitu Desa Temunih Kecamatan Kusan Hulu dan Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe. Dari kegiatan tersebut di tahun 2023

teridentifikasi 2 (dua) Balai Adat yang akan diusulkan sebagai MHA yaitu Balai Adat Tamunih Desa Tamunih Kec. Teluk Kepayang dan Balai Adat Alut Desa Gunung Raya Kec. Mantewe.

Target 2023 adalah sebanyak 1 (satu) Balai Adat yang diakui sebagai MHA dengan SK Penetapan Bupati/Perda tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan MHA Timanggung Anggut sudah ditandatangani oleh Bupati Tanah Bumbu sehingga terealisasi 1 buah SK Bupati tentang MHA.

6. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT, dengan indikator kinerja Persentase pelaku yang aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup, melalui keikutsertaan dalam lomba yang didalamnya juga terdapat kriteria penilaian bidang Lingkungan hidup maupun penerapannya dalam keseharian.

Target tahun 2023 adalah sebesar 80% dengan formulasi jumlah masyarakat yang aktif (sekolah + kelompok / desa + PSM pengelolaan sampah) / total jumlah masyarakat yang dibina yang telah mengikuti diklat.

Realisasi tahun 2023 adalah sebesar 100% yaitu karena ada (11 desa/ kelompok yang aktif + 9 sekolah yang ikut nominasi adiwiyata tk Prov &/ nasional + 5 KSM) / (13 desa/kelompok yang dibina +7 lomba Tingkat Provinsi/Nasional + 5 KSM yang dibina) atau sebanyak 25 pelaku yang tercatat aktif dalam pengelolaan LH dibandingkan dari 25 pelaku di masyarakat yang telah mengikuti diklat/pelatihan bidang lingkungan hidup. 25 Pelaku yang tercatat aktif diantaranya terdiri dari :

- a. 11 Lembaga yang aktif, antara lain :
 1. 4 Posyandu yang menang lomba posyandu tingkat Kabupaten yaitu :
 - a. Juara I: Posyandu Mekar Sari Desa Tegal Sari Kec. Satui
 - b. Juara II : Posyandu Mawar Indah Desa Muara Pagatan Tengah Kec. Kusan Hilir
 - c. Juara III : Posyandu Kamboja Desa Dwi Marga Utama Kec. Sungai Loban
 - d. Juara IV : Posyandu Harapan Maju Desa Maju Makmur Kec. Batulicin
 2. Lembaga Yang Aktif Terkait Lingkungan Hidup :
 1. Perwakilan lomba Posyandu tingkat Prov. Kalsel yaitu posyandu Mekar Sari Desa Tegal Sari Kec. Satui
 2. Perwakilan lomba HATINYA PKK tingkat Prov. Kalsel yaitu desa Sumber Wangi Kec. Karang Bintang

3. Pemenang lomba dasawisma tingkat Kabupaten tahun 2023 ada 3 yaitu:

- Juara I : Desa Sari Mulya Kec. Sungai Loban
- Juara II : Desa Karang Rejo Kec. Karang Bintang
- Juara III : Desa Bulurejo Kec. Mantewe

4. Perwakilan lomba desa ber-PHBS yaitu Desa Sari Mulya Kec. Sungai Loban

b. 9 Sekolah yang masuk Nominasi Adiwiyata:

1. 1 CSAN (SDN 1 Sari Mulya Kec. Sungai Loban) dan
2. 3 CSAM (SMPN 1 Simpang Empat, SMAN 1 Sungai Loban dan SMAN 1 Simpang Empat)
3. 5 sekolah CSAP tahun 2023 yaitu : SMPN 1 Kusan Hilir, SDN 1 Bayan Sari, SMPN 1 Kusan Hulu, SMPN 1 Satui, SDN Kerta Buwana Kec. Sungai Loban

c. 5 KSM yang aktif yaitu :

1. KSM Bina Lingkungan Asri Desa Bunati Kecamatan Angsana
2. KSM Sido Mukti Desa Karang Sari Kecamatan Kusan Hulu,
3. KSM Mutiara Bersujud Desa Sebamban Lama Kec. Sungai Loban,
4. KSM Berkah ZW Desa Batulicin Irigasi Kec. Karang Bintang dan
5. KSM Ar-Rahmah Desa Sepunggur Kec. Kusan Tengah.

7. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP, dengan indikator kinerja persentase penyelesaian pengaduan LH tahun berjalan.

Target Indikator tersebut adalah 100% di tahun 2023. Prosentase tersebut dihitung dari jumlah pengaduan selesai ditangani dibandingkan jumlah pengaduan yang selesai ditangani oleh Tim Pengaduan DLH setiap tahunnya serta dalam status selesai dengan keluarnya rekomendasi penyelesaian yang diinformasikan kepada pihak pengadu dan yang subyek sumber aduan. Pengaduan yang masuk diklasifikasikan dulu yang termasuk dalam pengaduan masalah lingkungan dan pengaduan yang bisa ditindaklanjuti adalah pengaduan dengan sumber pencemar yang izin usaha/izin lingkungannya dikeluarkan oleh Bupati Tanah Bumbu. Di Tahun 2023 sebanyak 10 pengaduan masuk dan ditindaklanjuti dan dalam status penyelesaian, sehingga capaiannya terhadap total jumlah aduan yang masuk sebesar 100%.

Dalam pelaksanaan program tersebut didukung dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan

formulasi jumlah pengaduan yang ditangani dibandingkan total jumlah pengaduan yang masuk. Dari target 100% pengaduan bidang LH yang ditindaklanjuti, terealisasi sesuai targetnya. Tahun 2023 sebanyak 10 pengaduan bidang LH yang ditindaklanjuti oleh Tim.

PEMENUHAN DATA DUKUNG PENGENDALIAN EMISI GRK

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja	Kategori
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pemenuhan Data Dukung Pengendalian Emisi GRK	100	100	100	Sangat Berhasil

Penyusunan laporan Inventarisasi GRK Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi mengenai data sumber emisi skala Kabupaten Tanah Bumbu dari 5 sector antara lain :

1. Limbah,
2. IPPU (*Industrial process and product uses*),
3. Energi
4. FOLU (*Forestry, and Other Land Uses*) dan
5. Pertanian

Realisasi data pendukung dari Instansi dan Stake Holder Terkait untuk penyusunan Dokumen Inventarisasi GRK Tahun 2023 untuk data tahun 2022 sudah terpenuhi sebesar 100 % Dimana data tersebut akan digunakan untuk perhitungan emisi GRK skala Kabupaten.

Dari permintaan data terhadap 11 Instansi Pemerintah dan 140 Perusahaan, data yang diterima oleh DLH Kabupaten Tanah Bumbu sudah memenuhi kebutuhan untuk melakukan perhitungan Inventarisasi GRK.

Kendala yang dihadapi adalah proses pengiriman data yang cukup lambat sehingga proses perhitungan Inventarisasi mengalami keterlambatan karena menunggu data tersebut.

Pada Tahun 2023 Perhitungan GRK menggunakan Aplikasi Sign Smart yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dari hasil analisa, faktor pengaruh yaitu Proyeksi grafik BAU tahun 2010 – 2030 yang dibuat hanya berdasarkan 3 sektor yang meliputi sektor energi, pertanian dan limbah sedangkan perhitungan emisi GRK pada aplikasi sign smart juga menghitung sektor kehutanan dan Industri.

Untuk Indikator sasaran Pemenuhan Data Dukung Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca menjelaskan tentang keterpenuhan data yang berasal dari SKPD terkait kegiatan - kegiatan yang cenderung menghasilkan emisi GRK skala kabupaten, yang nantinya data data tersebut akan digunakan untuk menghitung nilai emisi GRK skala Kabupaten. Namun untuk kedepannya DLH akan melakukan reuiu terhadap indikator Sasaran pemenuhan data dukung pengendalian emisi GRK menjadi Indeks Respon Kinerja SKPD (IRKS-GRK) terhadap Penurunan Emisi GRK untuk menunjang Indikator Kinerja Utama Kabupaten yaitu Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Indikator Indeks Respon Kinerja SKPD Gas Rumah Kaca (IRKS-GRK) menggambarkan kinerja keterhubungan antar kinerja setiap SKPD dalam Upaya penurunan emisi GRK skala kabupaten sehingga untuk melaksanakan indikator tersebut diperlukan penyusunan secara sistematis dalam pembuatan baseline dan penentuan target.

Diproyeksikan indikator tersebut dapat digunakan pada Renstra tahun 2026 – 2031.

Pada Tahun 2023 untuk realisasi program kampung iklim sebanyak 3 desa usulan baru dan 1 desa naik Tingkat dari Proklam Madya menjadi Proklam Utama.

3 Desa usulan baru tersebut yaitu Kelurahan Batulicin, Kelurahan Gunung Tinggi dan Desa Pulau Burung.

Kelurahan Batulicin dan Desa Pulau Burung mendapatkan penghargaan Proklam Utama, sedangkan Kelurahan Gunung Tinggi mendapatkan Apresiasi Proklam Madya.

1 Desa naik Tingkat yaitu Desa Al Kautsar mendapatkan Penghargaan Trophy Utama.

Dari target sebanyak 1 desa Lokasi ProKlim tercapai 3 Desa Lokasi Proklam sehingga capaian kinerjanya tahun 2023 adalah 300 %.

Adapun Pemenuhan Data Dukung Pengendalian Emisi GRK didukung oleh **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LH**, dengan kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan indicator Persentase Pemenuhan Data Kualitas Air, Udara dan Tanah (%) dengan target 67 % dan realisasi 96,57 % dan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen

Rekomendasi yang diberikan adalah :

1. Koordinasi dan penyamaan persepsi tentang penggunaan dana desa, bahwa dalam pedoman penggunaan dana desa sudah termasuk pengelolaan lingkungan, dana inilah yang harusnya digunakan untuk kegiatan proklam dimasing masing desa
2. Perlu dilakukan pengkajian berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelaporan, karena sifat data aktivitas sangat dinamis di masa depan.
3. Perlu dilakukan peningkatan koordinasi kelembagaan terkait dengan penyediaan data aktivitas, terutama data aktivitas pembangkit listrik dan produksi migas.

- a. Kategori kunci yang menjadi sumber utama emisi GRK sektor energi adalah kegiatan produksi dan distribusi batubara serta operasionalisasi peralatan penambangan batubara, maka secara normatif direkomendasikan beberapa aksi mitigasi:
 - Sesuai dengan Rencana Umum Energi Daerah Kalimantan Selatan, maka diupayakan penurunan produksi batubara 5% hingga tahun 2030.
- b. Mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) berbasis bioenergi pada pengoperasionalan peralatan penambangan batubara dengan target substitusi 20% pada 2030.

PENINGKATAN PENGELOLAAN LAHAN SESUAI KEWENANGAN

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja(%)	Kategori
1	Meningkatnya Pengelolaan Lahan Sesuai Kewenangan	Peningkatan Pengelolaan Lahan Sesuai Kewenangan	77,27	100	119,76	Sangat Berhasil

Indikator Peningkatan Pengelolaan Lahan Sesuai Kewenangan didukung **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**, dengan indikator persentase pengelolaan keanekaragaman hayati diperoleh dari perhitungan Jumlah Kehati yang dikelola sebesar 100 Ha dibandingkan total jumlah KEHATI yang ada sesuai dengan kewenangan Lingkungan Hidup sebesar 83,5 Ha dengan capaian 119,76%. Target 2023 adalah sebesar 72,73 % sudah terealisasi 119,76% atau dengan capaian 154,99 %

Semenjak pengelolaan RTH diserahkan ke DLH Kab Tanah Bumbu pada tahun 2022, belum ada luasan RTH yang valid. Dalam pengelolaan RTH tersebut sekaligus dilakukan inventarisir terkait lokasi dan luasan RTH diseluruh kabupaten Tanah Bumbu. Seiring perjalanan waktu secara bertahap penambahan area pelayanan dan pengelolaan RTH di beberapa titik akan lebih diintensifkan terutama pada fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah daerah tetapi belum terkelola secara maksimal. Sehingga secara berlanjut luasan RTH akan meningkat dengan adanya kegiatan inventarisasi dan pengelolaan yang lebih intensif terhadap obyek yg harus diperhatikan dengan memaksimalkan sumberdaya yg ada.

RTH yang saat ini dikelola oleh Dinas LH terdiri dari Taman, Median Jalan, sempadan jalan (bahu jalan) dan ada juga RTH yg pengelolaannya oleh instansi terkait dan masyarakat setempat seperti sarana olahraga, objek pariwisata, sempadan pantai dan area penghijauan. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ini melingkupi seluruh wilayah

kabupaten, pada Tahun 2023 ini cakupan kegiatan antara lain Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Batulicin, Kecamatan Kusan Tengah, Kecamatan Kusan Hilir, dan Kecamatan Satui.

Jika dilihat capaian tahun 2022 sebesar 83,5 dan capaian tahun 2023 sebesar 100 maka ada peningkatan capaian Peningkatan Pengelolaan Lahan Sesuai Kewenangan yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan DLH Kab. Tanah Bumbu sudah dijalankan secara efektif dan efisien.

PERSENTASE VOLUME SAMPAH YANG TERANGKUT

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Volume sampah yang terangkut	72%	76,59%	106,4%	Sangat Berhasil

Berdasarkan Undang-Undang no 18 Tahun 2008 pengelolaan sampah adalah kegiatan sistimatis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengurangan dan Penanganan sampah mempunyai target Nasional sebagaimana Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Kabupaten Tanah Bumbu Kebijakan dan Strategi (Jakstrada) terkait persampahan melalui Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 46 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Tanah Bumbu dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Berdasarkan hal tersebut di atas pada tahun 2023 target ditetapkan adalah 72 % untuk penanganan dan 27% untuk pengurangan, sehingga untuk target prosentase pengelolaan adalah 99%.

Data timbulan sampah tahun 2023 mengacu pada data timbulan sampah dengan dasar perhitungan yaitu jumlah penduduk Kabupaten Tanah Bumbu semester 1 tahun 2023 sebesar 62.732,73 ton/th.

Formulasi perhitungan volume sampah terangkut yaitu Total Volume sampah yang dapat ditangani (ton) dibandingkan Total Volume timbulan sampah kabupaten/kota (ton) x 100%.

Pada triwulan I-IV volume sampah yang terangkut ke TPA adalah 48.044,95 ton atau dengan persentase 76,59% dari total timbunan sampah se kabupaten Tanah Bumbu dengan volume 62.732,73 ton/tahun. Dari target sebesar 72% di tahun 2023, terealisasi melebihi target yaitu dengan tingkat capaian sebesar 106,4%. Tingginya

angka realisasi karena penambahan penduduk setiap tahunnya sehingga juga mempengaruhi angka volume timbunan sampah yang ada. Selain itu dengan beroperasinya TPA Satui, sehingga selama ini data volume sampah terdata dengan lebih optimal, dan bertambahnya jumlah kelompok desa yang mengelola sampah di area nya dan terkoneksi dengan layanan angkutan DLH.

Jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya, dimana di tahun 2022 capaian sebesar 75,69% dan di tahun 2023 capaian sebesar 76,59% maka ada penambahan jumlah sampah yang tertangani yang dibuang ke TPA akibat adanya penambahan jumlah penduduk.

INDIKATOR KINERJA VI, PERSENTASE VOLUME SAMPAH YANG DIREDUKSI :

	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja	Kategori	Nilai Means
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Meningkatnya Upaya Penanganan Dan Pengurangan Sampah	Persentase Volume Sampah Yang Direduksi	27%	17,05%	63,15%	Cukup Berhasil	70,5

Kondisi yang ingin dicapai terkait dengan pelayanan persampahan adalah wilayah Kab. Tanah Bumbu yang minim sebaran sampah, langkah tersebut diupayakan dicapai dengan peningkatan reduksi sampah dari berbagai kegiatan. Untuk formulasi IKU yang mengalami perubahan yaitu cakupan volume sampah yang direduksi menyesuaikan peraturan yang berlaku, yaitu dihitung dari Σ Volume Sampah yang direduksi (TPS/TPST/3R) / Σ Volume Sampah yang harusnya direduksi (TPS/TPST/3R) x 100%. Sesuai hasil kajian maka target yang ditetapkan di tahun 2023 adalah sebesar 27%, yaitu volume sampah yang di reduksi adalah 16.809,52 Ton/th dari total volume sampah yang harusnya direduksi sebanyak 62.732,73 Ton/th.

Pada triwulan I-IV pengurangan sampah dengan total volume 10.695,96 ton/thn atau persentase 17,05% atau Ton dari target sebesar 27%, atau dengan tingkat capaian sebesar 63,15%

Perhitungan persentase penanganan dan pengurangan sampah adalah dengan membandingkan dengan estimasi timbulan sampah di Kabupaten Tanah Bumbu yakni 62.732,73 Ton pada tahun 2023.

Dari capaian prosentase tersebut maka upaya kedepannya adalah perlu semakin meningkatkan penanganan sampah dengan lebih mengoptimalkan sarana prasarana persampahan yang saat ini untuk kegiatan operasional.

Terkhusus untuk pengurangan sampah upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan

sampah baik dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat, Bank sampah, juga memaksimalkan kinerja TPS 3R yang sudah terbangun agar upaya pengurangan sampah melalui pemilahan, pemanfaatan dan pembatasan timbulan sampah dengan menggerakkan peran serta semua pihak melalui pembatasan pemakaian plastik sekali pakai semakin tahun semakin meningkat. Diharapkan kedepan akan terbentuk 1 Desa 1 pengelolaan sampah sehingga permasalahan persampahan di Kabupaten Tanah Bumbu dapat teratasi.

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran adalah **PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**, dengan indicator Persentase Area Pelayanan Persampahan dengan formulasi Luas Area Terlayani / Total Luas Area Pemukiman. Dengan target 85,80 % dan realisasi 79,62 %. Total cakupan area layanan persampahan s.d tahun 2023 adalah pada 9 (Sembilan) Kecamatan yaitu Kecamatan Batulicin, Simpang Empat, Karang Bintang, Kusan Tengah, Kusan Hilir, Sungai Loban, Angsana, Satui, Kuranji, sedangkan 3 (tiga) Kecamatan lainnya yaitu Mantewe, Kusan Hulu dan Teluk Kepayang belum terjangkau layanan.

Pada Tahun 2023 target cakupan area pelayanan persampahan yang ditargetkan adalah seluas 1.244,74 Km² atau dengan angka persentase sebesar 85,77% dari Target Program Luas wilayah perkotaan, pemukiman dan ibukota kecamatan yakni seluas 1.451,22 Km². Jika dibandingkan capaian tahun 2022 cakupan area pelayanan persampahan di Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 79,05% atau dengan luas area layanan 1.147,24 km² atau ada penambahan target luasan ± 97,34 km². Tahun 2023, berdasarkan update data dari RTRW Kabupaten Tanah Bumbu, dilakukan evaluasi luasan area yang menjadi target layanan berdasarkan luasan desa/kelurahan yang masuk kategori perkotaan dan pemukiman. Updating data ini dilakukan untuk membenahan data target disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki DLH. Berdasarkan data yang sudah di pilah, dari luas administrasi Kabupaten Tanah Bumbu seluas 4871,39 Km², luas desa yang masuk area pemukiman seluas 3.032,98 Km² atau sebesar 62,26%, dan luas desa yang masuk area perkotaan seluas 1.494,25 Km² atau sebesar 29,23%. Mengingat dari data target yang ada s.d. 2022, ada 111 desa yang masuk dalam kategori pemukiman, baru 40 (luasan 1.055 Km²) diantaranya masuk dalam area layanan atau sebesar 36%. Jika dibandingkan dengan luas keseluruhan Kabupaten Tanah Bumbu yaitu 4871,39 km² luas area layanan yang sudah terlayani adalah 1057,93 km² atau sebesar 21,72%. Angka ini terlihat masih kecil sekali karena pelayanan kita difokuskan pada daerah perkotaan yang menjadi konsentrasi tempat tinggal penduduk yang banyak menghasilkan timbulan sampah dan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh DLH Kabupaten Tanah Bumbu. Pembenahan data ini

juga berimbas pada pembenahan target, yang semula total luasan target adalah sebesar 1.452,22 Km², saat ini menjadi 1.183,47 Km² dengan rincian target penambahan layanan di tahun 2023 seluas 34,23 Km², tahun 2024 seluas 32,27 Km², tahun 2025 seluas 53,51 Km² dan tahun 2026 seluas 5,53 Km², sehingga total target penambahan luas area layanan yaitu 125,54 Km². Dari realisasi s.d 2022 seluas 1.057,93 Km², dengan rencana perluasan area layanan seluas 125,54 Km², maka perubahan target total luas rea layanan yang akan dilayani adalah seluas 1.183,47 Km² s.d. tahun 2026. Namun karena belum ada nya perubahan dokumen perencanaan, maka angka target masih menggunakan angka sesuai dokumen perencanaan yang ada, namun untuk realisasinya menggunakan perhitungan yang sudah update.

Pada Triwulan IV cakupan area pelayanan persampahan bertambah di Desa Karang Sari Kecamatan Kusan Hulu karena sudah beroperasinya TPS3R Sido Mukti dengan luasan 8,16 km². Dari data tersebut jika ditambahkan dengan realisasi luas cakupan area layanan s.d tahun 2022 seluas 1.147,24 km², maka total luas area terlayani 1.155,40 Km², atau jika dibandingkan dengan total target layanan seluas 1.451,22 Km² s.d. tahun 2025, maka prosentase capaian luas area layanan s.d. tahun 2023 adalah sebesar 79,62%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 85,77%, maka tingkat capaiannya adalah sebesar 93%. Ada beberapa kendala dalam perluasan area layanan seperti masih terbatasnya sarana persampahan terutama armada angkut dan operasionalnya, serta jumlah petugas lapangan sehingga dalam rangka untuk perluasan layanan di tengah kendala yang ada perlu disusun strategi agar dengan rencana tersebut dapat direalisasikan meskipun tidak sepenuhnya dilakukan oleh DLH Kabupaten Tanah Bumbu, namun bisa melalui pelayanan persampahan dengan mengintegrasikan dari 1 desa ke desa lainnya khususnya desa yang sudah mandiri dalam pengelolaan sampah.

Upaya dan strategi untuk memperluas area cakupan layanan ke depannya masih terus dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah armada dan jumlah petugas lapangan agar berjalan efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan program, didukung dengan 1 Kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu Kegiatan Pengelolaan Sampah dengan indicator persentase sampah yang dikelola sebesar 99%, dihitung dari formulasinya akumulasi 72 % sampah tertangani dan 27% sampah tereduksi. Target tahun 2023 adalah sebesar 99%, yaitu 72% sampah tertangani dan 27% tereduksi.

Data timbulan sampah tahun 2023 mengacu pada data timbulan sampah dengan dasar perhitungan yaitu jumlah penduduk Kabupaten Tanah Bumbu semester 1 tahun 2023 sebesar 62.723,73 ton/th.

Formulasi perhitungan volume sampah terangkut yaitu Total Volume sampah yang dapat ditangani (ton) dibandingkan Total Volume timbulan sampah kabupaten/kota (ton) x 100%.

Pada triwulan I-IV volume sampah yang terangkut ke TPA adalah 48.044,95 ton atau dengan persentase 76,59% dari total timbunan sampah se kabupaten Tanah Bumbu dengan volume 62.732,73 ton/tahun. Dari target sebesar 72% di tahun 2023, terealisasi melebihi target yaitu dengan tingkat capaian sebesar 106,4%. Tingginya angka realisasi karena penambahan penduduk setiap tahunnya sehingga juga mempengaruhi angka volume timbunan sampah yang ada. Selain itu dengan beroperasinya TPA Satui, sehingga selama ini data volume sampah terdata dengan lebih optimal, dan bertambahnya jumlah kelompok desa yang mengelola sampah di area nya dan terkoneksi dengan layanan angkutan DLH.

Sedangkan untuk sampah tereduksi menyesuaikan peraturan yang berlaku, yaitu dihitung dari Σ Volume Sampah yang direduksi (TPS/TPST/3R) / Σ Volume Sampah yang harusnya direduksi (TPS/TPST/3R) x 100%. Sesuai hasil kajian maka target yang ditetapkan di tahun 2023 adalah sebesar 27%, yaitu volume sampah yang di reduksi adalah 16.809,52 Ton/th dari total volume sampah yang harusnya direduksi sebanyak 62.732,73,50 Ton/th.

Pada triwulan I-IV pengurangan sampah dengan total volume 10.695,96 ton/thn atau persentase 17,05% atau Ton dari target sebesar 27%, atau dengan tingkat capaian sebesar 63,15%

Perhitungan persentase penanganan dan pengurangan sampah adalah dengan membandingkan dengan estimasi timbulan sampah di Kabupaten Tanah Bumbu yakni 62.732,73 Ton pada tahun 2023.

Dari capaian prosentase tersebut maka upaya kedepannya adalah perlu semakin meningkatkan penanganan sampah dengan lebih mengoptimalkan sarana prasarana persampahan yang saat ini untuk kegiatan operasional.

Terkhusus untuk pengurangan sampah upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah baik dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat, Bank sampah, juga memaksimalkan kinerja TPS 3R yang sudah terbangun agar upaya pengurangan sampah melalui pemilahan, pemanfaatan dan pembatasan timbulan sampah dengan menggerakkan peran serta semua pihak melalui pembatasan pemakaian plastik sekali pakai semakin tahun semakin meningkat. Diharapkan kedepan akan terbentuk 1 Desa 1 pengelolaan sampah sehingga permasalahan persampahan di Kabupaten Tanah Bumbu dapat teratasi.

C.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DAN TAHUN SEBELUMNYA SERTA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERTUANG PADA RENSTRA DLH DAN RPJMD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2021-2026

Berikut evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja utama tersebut:

Tabel 3.21 Evaluasi dan Analisis Atas Capaian Indikator-indikator Kinerja Utama

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target				Realisasi			Tingkat Capaian			Tingkat Capaian 2023 Dibandingkan Akhir RPJMD (2026) (%)
			2021	2022	2023	2026	2021	2022	2023	2021	2022 (%)	2023	
1	Meningkatnya Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	55	55,55	56,11	57,81	63,11	52,86	58,15	114,75	105,09	103,64%	100,59%
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,27	91,38	91,48	91,79	92,79	93,54	96,17	101,66	102,36	105,13%	104,77%
		Pemenuhan Data Dukung Pengendalian Emisi GRK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%
2	Meningkatnya Pengelolaan Lahan Sesuai Kewenangan	Peningkatan Pengelolaan Lahan Sesuai Kewenangan	0	72,73	77,27	95,45	0	83,5	100	0	114,81	129,42%	104,77%
3	Meningkatnya Upaya Penanganan Dan Pengurangan Sampah	Persentase Volume Sampah Terangkut	74	73%	72%	70%	72,43%	75,69%	76,59%	97,87	103,68	106,38%	109,41%
		Persentase Volume Sampah Yang Direduksi	24	26%	27%	30%	16,86	16,63%	17,05%	70,25	63,96	63,15%	56,83%

Perhitungan total capaian tahun 2021 :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama (Sangat Berhasil)} = (5 \times 95,5)/6 = 79,58$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama (Cukup Berhasil)} = (1 \times 70,5)/6 = 11,75$$

$$\text{Total rata-rata capaian Kinerja Utama} = 91,33$$

Sedangkan Perhitungan total capaian tahun 2022 :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama (Sangat Berhasil)} = (5 \times 95,5)/6 = 79,58$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama (Cukup Berhasil)} = (1 \times 70,5)/6 = 11,75$$

$$\text{Total rata-rata capaian Kinerja Utama} = 91,33$$

Sedangkan Perhitungan total capaian tahun 2023 :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama (Sangat Berhasil)} = (5 \times 95,5)/6 = 79,58$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama (Cukup Berhasil)} = (1 \times 70,5)/6 = 11,75$$

$$\text{Total rata-rata capaian Kinerja Utama} = 91,33$$

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian Kinerja Utama dengan 6 (enam) indikator Kinerja Utama pada tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan total rata-rata capaian Kinerja Utama sebesar 91,33 atau disimpulkan Sangat Berhasil.

Jika dibandingkan dari tahun 2021 sampai dengan 2023 yang rata-rata capaiannya 91,33 dari 6 indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu, ada 1 indikator kinerja utama yang masih belum mencapai target yaitu Persentase Volume Sampah Yang Direduksi meskipun sebenarnya dari tahun ke tahun ada peningkatan volume sampah yang direduksi.

Penjelasan untuk masing masing indicator kinerja utama antara lain :

- Pada indicator nilai Indeks Kualitas Air ada perubahan pengambilan titik pemantauan yang sebelumnya di tahun 2021 dari 3 DAS (hulu, hilir, tengah) dan 20 sungai (1 titik), pada tahun 2022 menjadi 3 DAS (hulu, hilir, tengah) dan 21 sungai (hulu dan hilir) yang mengakibatkan semakin banyak titik yang dipantau.
- Pada indicator nilai Indeks Kualitas Udara ada peningkatan nilai untuk pemantauan indeks kualitas udara di 4 lokasi yang mewakili transportasi, permukiman, industri, dan perkantoran
- Pada indicator Pemenuhan data dukung penyusunan GRK selalu terpenuhi sebesar 100 % dimana data tersebut akan digunakan untuk perhitungan emisi GRK skala Kabupaten.
- Pada indicator Peningkatan Pengelolaan Lahan Sesuai Kewenangan ada peningkatan luasan lahan RTH yang dikelola di tahun 2022 dan 2023
- Pada indicator Persentase Volume Sampah Terangkut ada peningkatan volume sampah yang terangkut di tahun 2021, 2022 maupun 2023 yang menunjukkan pengangkutan sampah ke TPA oleh petugas kebersihan semakin bertambah.
- Pada indicator Persentase volume sampah tereduksi ada peningkatan volume sampah tereduksi di tahun 2021, 2022 maupun 2023 yang menunjukkan bahwa Upaya pengurangan sampah yang dilakukan dengan melibatkan peran serta Masyarakat mengalami peningkatan.

C.3. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI DAN TARGET SESUAI DENGAN STANDARD NASIONAL YAITU IKK BIDANG LH TAHUN 2023 DAN TAHUN SEBELUMNYA

DLH Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut DLH Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi sesuai Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Lingkungan Hidup, yakni :

IKK Bidang LH :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten
2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota
3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Berikut hasil pelaksanaan 3 (tiga) IKK Bidang LH s.d. tahun 2023 :

- **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten**

Indikator bidang Lingkungan Hidup yang diangkat sebagai indikator kinerja daerah dalam rangka mendukung pencapaian Misi Ketiga Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu yaitu “**Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan**” adalah Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Berikut target IKLH tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026 dan capaiannya :

Tabel 3.22 Target dan Capaian IKLH Tahun 2021 - 2026

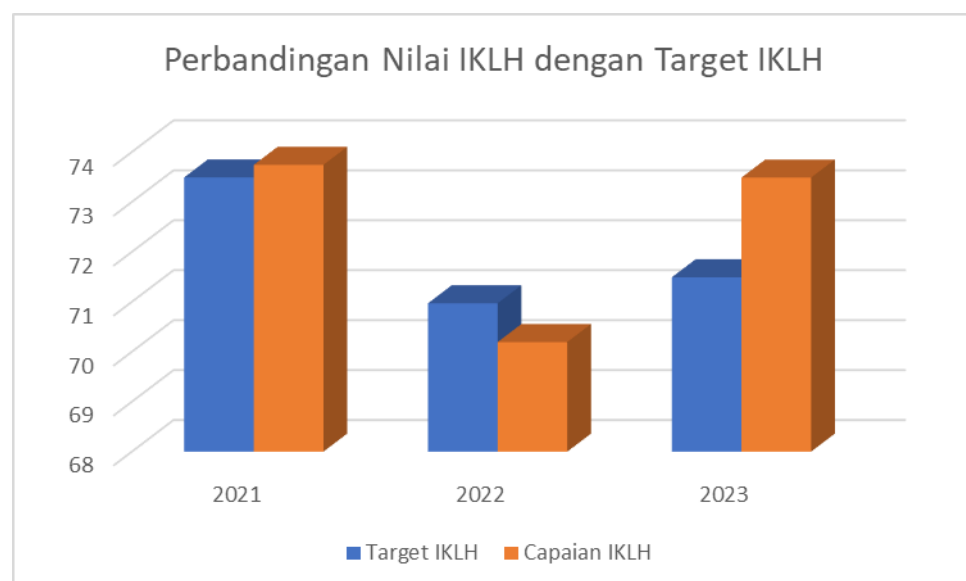
Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja						Capaian		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	73,49	70,97	71,49	72,03	72,57	73,11	73,74	70,19	73,49

Nilai IKLH dijadikan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program-program kegiatan bidang lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh DLH Kab. Tanah Bumbu maupun SKPD terkait dan juga dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan program di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka perbaikan optimalisasi kualitas lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu selama 3 tahun mendatang. Trend Nilai IKLH dari tahun 2021 – 2023 ditampilkan dalam

bentuk Gambar 3.9. Nilai IKLH dijadikan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program-program kegiatan bidang lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh DLH



Gambar 3.9 Trend Nilai IKLH dari tahun 2021 – 2023



Gambar 3.10 Perbandingan Nilai IKLH dengan Target IKLH dari tahun 2021 – 2023

Perbandingan Nilai IKLH dengan Target IKLH dari tahun 2021 – 2023 ditampilkan dalam Gambar 3.10.

Rekomendasi dalam mempertahankan dan meningkatkan nilai IKLH Kabupaten Tanah Bumbu serta dalam rangka peningkatan nilai Indeks kualitas Air, Indeks

kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan yang akan berdampak pada peningkatan nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) maka dilakukan beberapa rencana kegiatan diantaranya :

1. Peningkatan pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan
2. Peningkatan pembinaan & pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi berdampak pada penurunan Indeks kualitas Lingkungan
3. Peningkatan pembinaan & pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi berdampak pada penurunan Indeks kualitas Lingkungan
4. Peningkatan koordinasi antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan kualitas lingkungan

- **Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten**

Tabel 3.23 Target dan Capaian Volume Sampah Terangkut Tahun 2021 – 2026

Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja						Capaian		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023
Persentase Volume Sampah Terangkut (%)	74	73	72	71	70	70	72,43	75,69	76,59

Persentase Volume Sampah Terangkut didapatkan dari perhitungan :

$$\text{Penanganan Sampah} = \frac{\text{Volume sampah yang ditangani}}{\text{Potensi timbulan sampah}} \times 100 \%$$

Capaian tahun 2023 meningkat sebesar 0,9% jika dibandingkan dengan tahun 2022 dimana prosentase pengelolaan sampah di ditangani sebesar 76,59%.

Faktor utama yang mendukung capaian IKK ini adalah rutinnnya dilakukan pengangkutan sampah yang masuk pada 3 TPA (TPA Sungai Dua, TPA Betung (Kusan Hilir) dan TPA Satui). Prosentase sampah yang terangkut tergantung dari jumlah sampah yang timbul di area pelayanan persampahan, sehingga semakin banyak timbulan sampah diarea pelayanan persampahan, semakin besar prosentase sampah yang terangkut. Faktor lainnya adalah juga dilakukan kegiatan pembinaan pada kelompok/pelaku-pelaku yang berperan pada pengelolaan sampah yaitu Depo, TPST, TPS 3R, GSS dan sumber lain belum terdata seluruhnya. Tahun mendatang akan dilakukan pembenahan pencatatan jumlah sampah yang dikelola selain di TPA serta peningkatan peran serta masyarakat maupun dunia usaha dalam rangka pengelolaan persampahan.

- **Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten**

IKK tersebut dihitung dengan formulasi : Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten / Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan x 100%

Capaian tahun 2021, 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.24 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2021 – 2023

No	Indikator	Jumlah		
		2021	2022	2023
1	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten	5	5	5
2	Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	120	125	130
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	4,16%	4%	3,85%

Sebagaimana tabel di atas jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan terus meningkat, dari tahun 2021 sebanyak 120, kemudian pada tahun 2022 sebanyak 125 dan terus meningkat pada tahun 2023 sebanyak 130.

Sedangkan jika dilihat dari Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten dari segi jumlah menurun tetapi dari segi prosentase meningkat hal tersebut dikarenakan jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan.

Bahwa untuk meningkatkan ketaatan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan akan dapat dicapai jika pelaku usaha tersebut dalam status kegiatan aktif, atau dalam kondisi tidak aktif namun dengan menyampaikan surat pernyataan tidak aktif dan tetap melaksanakan kewajiban lingkungannya seperti tetap menyampaikan laporan pelaksanaan RKL RPL nya. Langkah kedepannya untuk meningkatkan ketaatan dengan penurunan jumlah pelaku usaha yang melanggar izin lingkungan dan izin PPLH adalah dengan :

Mengintensifkan kualitas dan kuantitas pengawasan, dengan kata lain memaksimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan kualitas lingkungannya. Serta melakukan pembinaan dan evaluasi yang kontinyu dalam memonitoring keberadaan

perizinan PPLH dalam rangka meningkatkan dan membangun kualitas LH yang lebih baik serta peningkatan kesadaran pelaku usaha dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan LH

C.4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

ALTERNATIF/SOLUSI :

Selama tahun 2023 dan tahun -tahun sebelumnya, pelaksanaan kegiatan pada DLH Kab.Tanah Bumbu umumnya sudah berjalan dengan baik dalam arti mengarah kepada kesesuaian IKK Bidang LH. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka terwujudnya pencapaian kinerja adalah mengevaluasi kembali usulan – usulan dana untuk menunjang Program dan kegiatan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu agar hasil yang diharapkan berhasil guna dan tepat waktu.

Berdasarkan pelaksanaan program pembangunan bidang lingkungan hidup pada beberapa resiko yang sering ditemui/terjadi sehingga capaian program/kegiatan tidak maksimal, diantaranya :

1. Belum optimalnya pengelolaan sampah
2. Masih minimnya pohon peneduh di kiri dan kanan jalan
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah
4. Masih belum tepat sasaran kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau CSR Perusahaan
5. Masih kurangnya minat dan semangat desa maupun sekolah dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca
6. Masih rendahnya luasan tutupan lahan dan masih banyaknya lahan kritis dan sangat kritis
7. Terkait layanan UPTD Laboratorium :
 1. Masih kurangnya sarana dan prasarana
 2. Belum tersedianya mobil lapangan laboratorium

Rekomendasi yang diberikan adalah :

1. Melakukan Kerjasama dengan PT. Indocement Tungal Prakarsa, Tbk sebagai Penyedia Bahan Bakar Alternatif dari Hasil Pengelolaan Sampah Domestik
2. Implementasi Program ADIPURA Lokal Tingkat Kecamatan/Desa/ Kelurahan dengan Goal terwujudnya lingkungan yang lebih bersih asri sebagai perwujudan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai SERAMBI MADINAH

3. Melaksanakan Kerjasama dengan KPH Kusan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dengan melibatkan Perusahaan Pemegang IPPKH dalam kegiatan penghijauan dan penanaman kanan kiri jalan sebagai Kabupaten Penyangga menuju Ibukota Negara (IKN)
4. Mensosialisasikan Kembali secara massif instruksi bupati dan surat edaran sebagai bentuk implementasi dari Perda No 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah terkait tertib jam buang dan tempat pembuangan sampah khususnya area pertokoan dan perkantoran sehingga diharapkan masyarakat membuang sampah antara jam 18.00 wita s.d. jam 05.00 Wita
5. Mendorong pembentukan minimal 1 kelompok pengelola persampahan di Tiap Desa/Kelurahan
6. Mensinergikan data kemiskinan dengan sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau CSR Perusahaan agar tepat sasaran
7. Mensinergikan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau CSR Perusahaan terhadap Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui kegiatan Program Kampung Iklim (PROKLIM), ADIWIYATA dan Peningkatan Luasan Tutupan Vegetasi
8. Inventarisasi kondisi kualitas lingkungan sebagai bahan dalam penyusunan baku mutu kualitas lingkungan tingkat daerah
9. Melaksanakan Kerjasama dengan KPH Kusan terkait penyediaan bibit dalam kegiatan rehabilitasi lahan sangat kritis di lahan akses terbuka
10. Pada saat melaksanakan kegiatan perjalanan dinas dalam kabupaten/atau dalam daerah, personil DLH melakukan penanaman bibit di lokasi kegiatan
11. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, dan pengelolaan RTH
12. Memprioritaskan pengambilan sampel dan pengujian terkait pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup

C.5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dari pencapaian rata-rata 5 (lima) indikator kinerja utama dengan nilai means 95,5 atau pada kategori Sangat Berhasil, dan 1 (satu) indikator kinerja utama dengan nilai means 70,5 atau pada kategori Cukup Berhasil, dapat dilihat adanya efisiensi penggunaan anggaran. Ringkasan penggunaan anggaran dalam mencapai IKU sebagaimana perjanjian kinerja DLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25 Realisasi Keuangan Terhadap Capaian Sasaran IKU DLH

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi Keuangan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
Meningkatnya Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	56,11	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	158.509.800	483.276.200	470.209.918	
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	48.786.800	90.889.800	83.850.158	
			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	48.786.800	90.889.800	83.850.158	
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	109.723.000	392.386.400	386.359.760	
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	109.723.000	-	-	
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	392.386.400	392.386.400	386.359.760	
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,48	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	669.617.000	645.022.000	637.936.022	
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	563.347.000	537.402.000	530.316.022	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	358.315.000	339.715.000	335.804.022	
	Pemenuhan Data Dukung Pengendalian Emisi GRK	100	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	205.032.000	197.687.000	194.512.000	
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	106.270.000	107.620.000	107.620.000	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	106.270.000	107.620.000	107.620.000	
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	15.514.000	24.694.000	24.694.000
				Penyimpanan Sementara Limbah B3	15.514.000	24.694.000	24.694.000
				Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	15.514.000	24.694.000	24.694.000
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	189.552.300	209.892.300	204.770.508
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	189.552.300	209.892.300	204.770.508
				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	14.009.300	14.009.300	13.709.300
				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	175.543.000	195.883.000	191.061.208
				PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	25.341.500	25.341.500	23.011.500
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				14.171.500	14.171.500	13.401.500	

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi Keuangan
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
			Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	14.171.500	14.171.500	13.401.500
			Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	11.170.000	11.170.000	9.610.000
			Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	11.170.000	11.170.000	9.610.000
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	68.403.700	74.603.700	72.253.700
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68.403.700	74.603.700	72.253.700
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	40.905.000	42.405.000	40.205.000
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	27.498.700	32.198.700	32.048.700
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	17.322.100	17.322.100	13.721.300
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	17.322.100	17.322.100	13.721.300
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	17.322.100	17.322.100	13.721.300
Meningkatnya Pengelolaan Lahan Sesuai Kewenangan	Peningkatan Pengelolaan Lahan Sesuai Kewenangan	77,27	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.678.263.250	5.168.892.500	4.919.037.850
			Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.678.263.250	5.168.892.500	4.919.037.850
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.678.263.250	5.168.892.500	4.919.037.850
Meningkatnya Upaya Penanganan Dan Pengurangan Sampah	Persentase Volume Sampah Terangkut	72	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.515.199.160	14.639.216.160	13.815.703.993
			Pengelolaan Sampah	10.515.199.160	14.639.216.160	13.815.703.993
	Persentase volume sampah yang direduksi	27	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	8.226.450.760	8.596.550.760	8.292.663.209
			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	121.833.000	173.327.000	159.511.214
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.166.915.400	5.869.338.400	5.363.529.570	
Total				15.337.722.810	21.288.260.460	20.181.338.791

Dari table di atas terlihat bahwa total rencana anggaran (setelah perubahan) Rp. 21.288.260.460,-, terealisasi sebesar Rp. **20.181.338.791,-** atau sebesar 94,46%. Dari realisasi tersebut terlihat efisiensi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran (IKU) DLH Kab. Tanah Bumbu TA. 2023 yaitu :
Rp. 21.288.260.460,-, Rp. **20.181.338.791,-** = Rp. 1.106.921.669

Serapan anggaran tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan serapan anggaran tahun 2022 yaitu sebesar 94,26%.

Terlihat dalam penggunaan anggaran terjadi peningkatan yang diimbangi juga peningkatan realisasi fisik kegiatan. Dari sisi efisiensi terlihat juga adanya penghematan penggunaan dana pada input dalam menghasilkan output kegiatan. Berarti sangatlah jelas keberhasilan kinerja yang telah dicapai DLH Kab. Tanah Bumbu tahun 2023 sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Berikut gambaran efisiensi program dan kegiatan dari tahun ke tahun :

Tabel 3. 22 Efisiensi Program, Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2017 – 2023

ITEM	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	EFISIENSI
JUMLAH PROGRAM	4 Program	5 Program	6 Program	4 Program	8 Program	9 Program	9 Program	Perbandingan jumlah program urusan wajib Lingkungan Hidup dari tahun 2017-2023 terlihat adanya penambahan jumlah program
JUMLAH KEGIATAN	16 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	10 Kegiatan	15 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	Perbandingan jumlah kegiatan penunjang urusan Lingkungan Hidup dari tahun 2017 – 2022 terlihat adanya penambahan dan pengurangan jumlah kegiatan, di rentang waktu tahun 2018 – 2019 dari 17 kegiatan menjadi 10 kegiatan saja di tahun 2020 dan 15 kegiatan di tahun 2021 serta 17 Kegiatan di tahun 2022 dan 2023
PAGU ANGGARAN(Rp) / SEBELUM PERUBAHAN	5.276.759.000	4.930.192.000	6.595.609.880	6.403.443.640	10.939.879.473	12.370.112.123	15.337.722.810	Secara anggaran sebelum/sesudah perubahan ada terlihat peningkatan pagu 2017-2023. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor dalam pencapaian target kinerja yaitu adanya perluasan wilayah layanan area persampahan, penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, meningkatnya dana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebagai upaya mempertahankan/meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lahan.
PAGU ANGGARAN(Rp) / SESUDAH PERUBAHAN	4.604.719.000	4.478.242.000	6.972.007.741	5.505.092.000	11.704.813.973,00	14.269.681.940	21.288.260.460	
REALISASI ANGGARAN (Rp)	4.195.635.633	3.982.389.832	6.364.683.769	5.194.187.011	11.340.144.525	13.449.905.628	20.181.338.791	Dari total rencana anggaran dan angka realisasi tersebut terlihat efisiensi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran (IKU) DLH Kab. Tanah Bumbu TA. 2017 - 2023. Serapan anggaran tersebut dalam rangka pencapaian kinerja DLH sebesar 94,46 % di tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan serapan anggaran tahun 2017 sebesar 91,12%, sebesar 88,93% di tahun 2018, sebesar 91,29% di tahun 2020, 96,88% di tahun 2021, 94,26 % di tahun 2022 dan 94,46% di tahun 2023
SISA ANGGARAN (Rp.)	409.083.367	495.852.168	607.323.972	310.904.989	364.669.448	819.776.312	1.106.921.669	
% SERAPAN ANGGARAN	91,12%	88,93%	91,29%	94,35%	96,88%	94,26%	94,46%	

C.6. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

- EVALUASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan diarahkan terhadap indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari : Input, Output dan Outcome. Hasil evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan capaian kinerja antara 80% sampai dengan 100% yang mempunyai makna baik.

Hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan DLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja Program dan kegiatan yang dianalisis yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.27 Capaian Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2023

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rumus Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Keterangan	FAKTOR PENDORONG/FAKTOR PENGHAMBAT
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)		79	78,73	99,66%	Dilakukan Survey Kepuasan Pelayanan Sekretariat Yang Terdiri dari 9 pertanyaan melalui google form terhadap 100 orang karyawan DLH. Dari hasil Survey yang paling tinggi nilai nya dengan point 328, tentang pertanyaan 'Tingkat kepuasan terhadap layanan pemberian hak-hak pegawai (Gaji, Tunjangan, dll)' sedangkan dengan nilai terendah dengan point 293, tentang pertanyaan 'Tingkat kepuasan terhadap kinerja tindakan pemberian disiplin punishment bagi pegawai yang tidak disiplin'.	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (%)		100	100	100,00%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)		2	2	100,00%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		5	5	100,00%		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik (%)		100	100	100,00%		

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rumus Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Keterangan	FAKTOR PENDORONG/ FAKTOR PENGHAMBAT
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		44	45	102,27%		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		1	1	100,00%		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		100	100	100,00%		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		5	5	100,00%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)		2	2	100,00%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		341	341	100,00%		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)		100	100	100,00%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	12	100,00%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	12	100,00%		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)		100	100	100,00%		

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rumus Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Keterangan	FAKTOR PENDORONG/ FAKTOR PENGHAMBAT
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		56	44	78,57%		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	1	100,00%		
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Akreditasi Badan Layanan Usaha Daerah (Nilai)		236	239	101,27%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		1	1	100,00%		
2	PROGRAM PERENCANAAN LH							
	PROGRAM : PERENCANAAN LH	Persentase Pemenuhan data dok perencanaan LH	Data Dokumen Lingkungan Hidup yang terpenuhi/total kebutuhan data.	85%	100,00%	117,65%	Dokumen perencanaan yang menjadi target penyusunan Tahun 2023 adalah berupa Dokumen IKPLHD dan IKLH untuk periode data Tahun 2022 serta penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 – 2045. Indikator kinerja ini merupakan bentuk dari peran serta dinas dinas terkait dalam penyediaan data dukung untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan lingkungan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten.	
			Data Dokumen Lingkungan Hidup yang terpenuhi		3		Dokumen IKLH, IKPLHD, KLHS RPJPD Kab. Tanah Bumbu 2025 2045	
			Total kebutuhan data.		3			

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rumus Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Keterangan	FAKTOR PENDORONG/ FAKTOR PENGHAMBAT
	Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Data Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Data Lingkungan Hidup yang terpenuhi/total kebutuhan data.	85%	96,72%	113,79%	Data IKLH dan IKPLHD	
			Data Lingkungan Hidup yang terpenuhi		59		Data Lahan Gambut tidak ada dikarenakan Kab. Tanah Bumbu tidak memiliki Lahan Gambut Tabel terkait Evaluasi Kerusakan Tanah Di Lahan Kering Akibat Erosi Air tidak tersedia	
			Total kebutuhan data.		61			
	Sub Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup		1	1	100%	Penyusunan dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tanah Bumbu untuk periode data Tahun 2022	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Data Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Data Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang terpenuhi/total kebutuhan data.	100%	100%	100%		
			Data Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang terpenuhi		220			
			Total kebutuhan data.		220			
	Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun		1	1	100%	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 – 2045.	
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH							
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH	Persentase pemenuhan parameter kualitas Lingkungan	Parameter yang memenuhi baku mutu IKLH (Parameter IKA + Parameter IKU) / total parameter IKLH (Parameter IKA + Parameter IKU) yang diuji	86,67%	91,83%	105,95%	3 DAS meliputi DAS Batulicin, Kusan dan Satu serta titik bagian hulu dan hilir pada 21 sungai Pemantauan air dan udara sebagai dasar penentuan Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara di aplikasi IKLH KLHK	Ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rumus Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Keterangan	FAKTOR PENDORONG/ FAKTOR PENGHAMBAT
			Parameter yang memenuhi baku mutu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Parameter Indeks Kualitas Air + Parameter Indeks Kualitas Udara)		764		Perhitungan Tahap I (367+8)/(408+8) Perhitungan Tahap II ((381+8)/(408+8)	
			Total parameter IKLH (Parameter IKA + Parameter IKU) yang diuji		832			
	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Data Kualitas Air, Udara dan Tanah	Parameter kualitas air, udara, dan tanah yang memenuhi baku mutu / total jumlah parameter sampel kualitas air, udara, dan tanah yang diuji	67%	96,19%	143,56%	<p>Dilakukan pemantauan kualitas air pada 3 daerah aliran sungai (hulu, tengah, hilir) dan 21 anak sungai (hulu dan hilir) pada 2 tahap.</p> <p>Tahap I (51 titik) dilakukan pada awal tahun 2023 untuk mewakili data kualitas air sungai pada kondisi musim penghujan dan dilakukan pengujian pada 32 parameter.</p> <p>Tahap II (51 titik) dilakukan pada semester II 2023 untuk mewakili data kualitas air sungai pada kondisi musim kemarau dan dilakukan pengujian pada 34 parameter kualitas lingkungan. Hasil pengujian menunjukkan pada tahap I, sebanyak 1562 parameter memenuhi baku mutu dari total 1632 parameter kualitas lingkungan. Sedangkan hasil pengujian pada tahap II, sebanyak 1675 parameter memenuhi baku mutu dari total 1734 parameter kualitas lingkungan.</p> <p>Dilakukan pemantauan kualitas udara pada 4 lokasi yang mewakili area permukiman, transportasi, perkantoran dan industri dengan masing-masing 2 parameter uji (total 8 parameter pada setiap tahap)</p> <p>Tahap I sebanyak 8 parameter memenuhi baku mutu dari 8 parameter yang diuji</p> <p>Tahap II sebanyak 8 parameter memenuhi baku mutu dari 8 parameter yang diuji</p> <p>Data pemantauan kualitas air dan udara</p>	Ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rumus Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Keterangan	FAKTOR PENDORONG/ FAKTOR PENGHAMBAT
							dengan jumlah parameter yang lebih lengkap sebagai data dukung pengendalian pencemaran lingkungan di Kab. Tanah Bumbu, misalnya berkaitan dengan parameter logam untuk kegiatan pertambangan batubara Kualitas air tahap I 32 parameter	
			Parameter kualitas air, udara, dan tanah yang memenuhi baku mutu		3253			
			Total jumlah parameter sampel kualitas air, udara, dan tanah yang diuji		3382			
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		1	1	100%	Dokumen Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan	
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		1	1	100%	1 Dokumen Inventarisasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	
	Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase lahan sangat kritis di sempadan sungai yang dipulihkan	Luas lahan sangat kritis yang dipulihkan di sempadan sungai / luas lahan sangat kritis di sempadan sungai yang direncanakan untuk dipulihkan	40%	54,00%	135,00%		
Luas lahan sangat kritis yang dipulihkan di sempadan sungai				5,4				

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rumus Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Keterangan	FAKTOR PENDORONG/ FAKTOR PENGHAMBAT
			Luas lahan sangat kritis di sempadan sungai yang direncanakan untuk dipulihkan		10			
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 dokumen	1	1	100%		
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah kehati yang dikelola / total jumlah kehati yang ada sesuai dengan kewenangan LH	77,27%	119,76%	154,99%		1. Adanya penambahan Anggaran di Anggaran Perubahan 2. Terkelolanya RTH yang sebelumnya belum dikelola secara maksimal
			Jumlah kehati yang dikelola		100		Luasan 100 ha tersebut merupakan jumlah seluruh luasan Ruang Terbuka Hijau berupa taman dan sempadan jalan yang telah dikelola.	
			Total jumlah kehati yang ada sesuai dengan kewenangan LH		83,5			
	Kegiatan : Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Keaneekaragaman Hayati yang dikelola sesuai dengan kewenangan	Jumlah Keaneekaragaman Hayati yang dikelola sesuai dengan kewenangan (Lokasi)	18	18	100,00%	Merupakan titik lokasi taman dalam kategori RTH dengan sebaran se Kab Tanah Bumbu sebanyak 18 titik lokasi	
			Jumlah taman yang yang dikelola		18 lokasi			
			Jumlah taman kehati yang teridentifikasi		18 lokasi			
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)		100	100	100,00%		
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rumus Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Keterangan	FAKTOR PENDORONG/FAKTOR PENGHAMBAT
	PROGRAM : PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memenuhi ijin Pengelolaan Limbah Bahan Beracun (%)	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memenuhi Ijin Pengelolaan LB3/Total Pelaku Usaha Yang Menjadi Target Pengawasan	61,54%	52,55%	85,40%	Belum mencapai target yang ditetapkan yaitu belum semua pelaku usaha yang menjadi target pengawasan memenuhi ijin pengelolaan LB3 (memiliki rintel LB3 dan/atau memiliki ijin sebelumnya yang masih berlaku), hal ini perlu ditingkatkan dengan pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif, adanya perubahan beberapa kewenangan dari berbagai sektor pelaku usaha juga mempengaruhi proses pengurusan rintel LB3. Rencana tindak lanjut untuk peningkatan realisasi di tahun berikutnya yaitu dengan koordinasi lintas bidang berkaitan dengan pembenahan database pelaku usaha berpotensi penghasil LB3, instensitas pengawasan dan juga koordinasi dengan pelaku usaha.	
			Jumlah Pelaku Usaha Yang Memenuhi Ijin Pengelolaan LB3		72			
			Total Pelaku Usaha Yang Menjadi Target Pengawasan		137			
	KEGIATAN : PENYIMPANAN SEMENTARA LB3	Persentase tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang disediakan oleh pelaku usaha	Pelaku Usaha Yang Memiliki Perencanaan / Sudah Memiliki Fisik Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) LB3	100%	45,58%	45,58%	Belum tercapainya target dikarenakan belum semua pelaku usaha memiliki fisik TPS LB3 dari beberapa yang sudah melakukan perencanaan. Ada yang masih dalam proses pembangunan setelah finalisasi kajian rincian teknis TPS LB3 nya. Rencana tindak lanjut untuk peningkatan realisasi di tahun berikutnya yaitu dengan koordinasi lintas bidang berkaitan dengan pembenahan database pelaku usaha berpotensi penghasil LB3, instensitas pengawasan dan juga koordinasi dengan pelaku usaha.	
			Total Pelaku Usaha Yang Diwajibkan Punya TPS LB3		98			
			Persentase Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) LB3 Yang Disediakan Pelaku Usaha		215			
	SUB KEGIATAN : VERIFIKASI LAPANGAN UNTUK MEMASTIKAN PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	Laporan hasil verlap LB3	1	1	100%	Terealisasi sebanyak 1 Laporan hasil verifikasi atas 22 rekam rintel penyimpanan LB3 pelaku usaha	

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rumus Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Keterangan	FAKTOR PENDORONG/ FAKTOR PENGHAMBAT
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat pengelolaan LH	Jumlah pelaku usaha yang taat / total jumlah pelaku usaha yang diawasi	100%	96,15%	96,15%	Belum terealisasi 100% mengingat adanya kendala dukungan manajemen dari beberapa pelaku usaha yang tidak taat/melanggar	
			Jumlah pelaku usaha yang taat		125			
			Total jumlah pelaku usaha yang diawasi		130			
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan terhadap ijin lingkungan	Jumlah yang diawasi / total jumlah ijin lingkungan	100%	48,87%	48,87%	Belum mencapai target 100 % dikarena terbatas nya jumlah PPLHD	
			Jumlah yang diawasi		130			
			Total jumlah ijin lingkungan		266			
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)		25	24	96%	Terealisasi 24 dokumen dengan perincian : Persetujuan teknis sebanyak 15 produk, Surat Kelayakan Operasi (SLO) sebanyak 4 produk dan Surat Keterangan Air Limbah sebanyak 5 produk.	
	Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup , Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)		1	1	100%	Terealisasi sebanyak 1 laporan dengan jumlah pelaku usaha yang diawasi sebanyak 130 pelaku usaha/kegiatan	
7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH							

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rumus Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Keterangan	FAKTOR PENDORONG/ FAKTOR PENGHAMBAT
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase jumlah MHA yang diakui	Jumlah MHA yang diakui / total jumlah lembaga MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisonal dan hak MHA yang teridentifikasi	100%	100%	100%	Program Tercapai dengan keluarnya SK Bupati No. 188.46/472/DLH/2023 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan MHA Timanggung Anggut di Desa Tamunih Kec Teluk Kepayang Kab Tanah Bumbu tanggal 11 Desember 2023.	
			Jumlah MHA yang diakui		1	1	SK Penetapan Bupati/Perda tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan MHA Timanggung Anggut sudah ditandatangani oleh Bupati Tanah Bumbu	
			Total jumlah lembaga MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisonal dan hak MHA yang teridentifikasi		1	1	lembaga MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisonal dan hak MHA yang teridentifikasi pada balai adat Alut Desa Gunung Raya Kec Mantewe	
	Kegiatan : Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Pengakuan Lembaga MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang di akui	Jumlah usulan pengakuan dan penetapan MHA / total jumlah lembaga MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisonal dan hak MHA yang dibina	1 lokasi	1	100%	Kegiatan Tercapai dengan 1 kali pelatihan Penggalan Data Dukung, komunitas adat, hukum adat, pemetaan peta dan lay out pembagiaan ruang pada calon MHA di desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe dengan narasumber AMAN Prov Kalsel pada tanggal 3-5 September 2023	
			Jumlah usulan pengakuan dan penetapan MHA		1		2023 teridentifikasi 2 (dua) Balai Adat yang akan diusulkan sebagai MHA yaitu Balai Adat Tamunih Desa Tamunih Kec. Teluk Kepayang dan Balai Adat Alut Desa Gunung Raya Kec. Mantewe.	
			Total jumlah lembaga MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisonal dan hak MHA yang dibina		1			

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rumus Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Keterangan	FAKTOR PENDORONG/ FAKTOR PENGHAMBAT
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)		1	1	100%	Terealisasi sebanyak 1 Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH berupa rapat-rapat koordinasi dan SK Bupati tentang pengakuan MHA	
	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Peningkatan kapasitas MHA dan Kearifan lokal, Pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah MHA yang difasilitasi berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta penyediaan sapsras MHA / total jumlah MHA yang dibina	50%	50%	100%	Terealisasi Pelatihan data dukung komunitas adat, hukum adat, pemetaan peta dan lay out pembagiaan ruang pada calon MHA di desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe dg narsum AMAN Prov. Kalsel pada tanggal 5-7 Sept 2023. Sasaran pelatihan komunitas adat desa Gunung Raya (4 balai adat)	
			Jumlah MHA yang difasilitasi berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta penyediaan sapsras MHA		1		Pelatihan pemberdayaan MHA pada tahun 2023 terlaksana 1 kali	
			Total jumlah MHA yang dibina		2		MHA yang dibina adalah MHA Timanggung Anggung di Desa Tamunih Kec Teluk Kepayang dan calon MHA Timanggung Huban di Desa Gunung Raya Kec Mantewe	
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)		1	1	100%	Terealisasi 1 dokumen berupa kegiatan pelatihan pemberdayaan MHA	

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rumus Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Keterangan	FAKTOR PENDORONG/ FAKTOR PENGHAMBAT
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pelaku yang aktif dalam pengelolaan LH (%)	Jumlah pelaku yang aktif (sekolah+kelompok/desa+P SM pengelolaan sampah) / total jumlah pelaku yang dibina yang telah mengikuti diklat	80%	100%	125%	Melebihi target karena tahun 2023 untuk sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM dan sub kegiatan pendampingan Gerakan Peduli LH didukung dan sebagian difasilitasi oleh pihak ketiga sebagai pendamping sekolah maupun memfasilitasi pelaksanaan pelatihan.	peran beberapa skpd dan pihak ketiga ikut serta dalam melakukan diklat (pelatihan, penyuluhan, bimtek, sosialisasi dll)
			Jumlah pelaku yang aktif (sekolah+kelompok/desa+P SM pengelolaan sampah)		25		Target Pelaku yang aktif adalah 13 lembaga, 7 sekolah, 5 KSM	
			Total jumlah pelaku yang dibina yang telah mengikuti diklat		25		Pelaku yang dibina yang diberikan Diklat adalah 11 lembaga, 9 sekolah, 5 KSM	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi bidang Lingkungan Hidup	Jumlah pelaku yang mengikuti diklat atau pelatihan / total jumlah pelaku yang dibina (sekolah+kelompok/desa+P SM pengelolaan sampah)	33,33%	124,00%	372,04%	Kegiatan melebihi target karena pelatihan, penyuluhan maupun Bimtek sebagian besar bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT. TIA, PT. BIB, PT. AI, DWP Kab & TP PKK Kab	
			Jumlah pelaku yang mengikuti diklat atau pelatihan		93		Pelaku yg diberikan Diklat merupakan kegiatan gabungan bbrp bidang : 51 sekolah, 29 lembaga, 13 PSM	
			Total jumlah pelaku yang dibina (sekolah+kelompok/desa+P SM pengelolaan sampah)		75		Target : 25 sekolah, 35 kelompok, 15 PSM	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH (Lembaga)		35	44	126%	Sub Kegiatan melebihi target karena jumlah kelompok yang terdaftar meningkat kapasitasnya terkait PPLH bertambah di tahun 2023 yaitu adanya Bimtek Sekolah Ramah Anak (SRA) dimana DLH diminta menjadi narasumber SRA yang terkait LH	

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rumus Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Keterangan	FAKTOR PENDORONG/FAKTOR PENGHAMBAT
	Sub Kegiatan : Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)		1	1	100%	Terealisasi 1 dokumen berupa dokumen berisi kegiatan rapat koordinasi, sosialisasi & pelatihan, pendampingan sekolah dan pemantauan evaluasi Adiwiyata	
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian pengaduan LH tahun berjalan	Jumlah pengaduan yang selesai ditangani /total jumlah pengaduan yang ditangani	100%	100%	100%	Tingkat penyelesaian diukur dengan indikasi penyelesaian secara teknis dan tidak ada pengaduan ulang	
Jumlah pengaduan yang selesai ditangani				10				
Total jumlah pengaduan yang ditangani				10				
	Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan yang ditangani / total jumlah pengaduan yang masuk	100%	100%	100%	Jumlah pengaduan yang masuk dan teregistrasi telah ditindaklanjuti secara keseluruhan.	
Jumlah pengaduan yang ditangani			10	10				
Total jumlah pengaduan yang masuk				10				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab/ Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani (Dokumen)		1	1	100%	Terealisasi sebanyak 1 dokumen tindaklanjuti dan penyelesaian tahun 2023	
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rumus Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Keterangan	FAKTOR PENDORONG/ FAKTOR PENGHAMBAT
	PROGRAM : PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Area Pelayanan Persampahan (%)	Luas area terlayani / total luas area layanan perkotaan	85,80%	79,62%	92,80%	Belum mencapai target yang ditetapkan, ada beberapa kendala dalam perluasan area layanan seperti masih terbatasnya sarana persampahan terutama armada angkut dan operasionalnya, serta jumlah petugas lapangan sehingga dalam rangka untuk perluasan layanan di tengah kendala yang ada perlu disusun strategi agar dengan rencana tersebut dapat direalisasikan meskipun tidak sepenuhnya dilakukan oleh DLH Kabupaten Tanah Bumbu, namun bisa melalui pelayanan persampahan dengan mengintegrasikan dari 1 desa ke desa lainnya khususnya desa yang sudah mandiri dalam pengelolaan sampah.	
			Luas area terlayani	1244,74 km2	1155,4 Km2		Upaya dan strategi untuk memperluas area cakupan layanan ke depannya masih terus dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah armada dan jumlah petugas lapangan agar berjalan efektif dan efisien	
			Total luas area layanan perkotaan	1451,22 Km2	1451,22 Km2			
	KEGIATAN : PENGELOLAAN SAMPAH	Persentase Sampah yang dikelola	Volume sampah yang ditangani + Volume sampah yang direduksi / total volume timbulan sampah tahun N	99%	93,64%	94,58%	Dari capaian prosentase belum mencapai target yang ditetapkan, maka upaya kedepannya adalah perlu semakin meningkatkan penanganan sampah dengan lebih mengoptimalkan sarana prasarana persampahan yang saat ini untuk kegiatan operasional.	

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rumus Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Keterangan	FAKTOR PENDORONG/ FAKTOR PENGHAMBAT
							<p>Terkhusus untuk pengurangan sampah upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah baik dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat, Bank sampah, juga memaksimalkan kinerja TPS 3R yang sudah terbangun agar upaya pengurangan sampah melalui pemilahan, pemanfaatan dan pembatasan timbulan sampah dengan menggerakkan peran serta semua pihak melalui pembatasan pemakaian plastik sekali pakai semakin tahun semakin meningkat. Diharapkan kedepan akan terbentuk 1 Desa 1 pengelolaan sampah sehingga permasalahan persampahan di Kabupaten Tanah Bumbu dapat teratasi</p>	
			Prosentase volume sampah tertangani	72%	76,59%			
			Persentase volume sampah direduksi	27%	17,05%			
	SUB KEGIATAN 1 : PENANGANAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMILAHAN, PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN PENGOLAHAN, DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Volume sampah yang masuk ke TPA	53.416,77 ton	48.044,95 ton	89,94%	<p>Persentase didapatkan dengan membandingkan Jumlah Sampah yang terangkut ke TPA dengan target jumlah sampah yang terangkut ke TPA.</p> <p>Untuk saat ini data sampah yang terangkut ke TPA berdasarkan data sampah yang masuk ke TPA Sungai Dua, TPA Betung (Kusan Hilir) dan TPA Satui.</p>	

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rumus Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Keterangan	FAKTOR PENDORONG/ FAKTOR PENGHAMBAT
	TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA						Prosentase sampah yang terangkut tergantung dari jumlah sampah yang timbul di area pelayanan persampahan, sehingga semakin banyak timbulan sampah di area pelayanan persampahan, semakin besar prosentase sampah yang terangkut, namun demikian akan diupayakan untuk mengurangi prosentase yang diangkut ke TPA dengan cara melakukan pemilahan.	
	SUB KEGIATAN 2 : PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Jumlah Pelaku / Kelompok pengelola sampah	6 kelompok	6 Kelompok	100%	1 KSM "Bina Lingkungan Asri" di Desa Bunati Kecamatan Angsana, 1 KSM "Sido Mukti" berada pada wilayah Desa Karang Sari Kecamatan Kusan Hulu, 1 Bank Sampah "Berseri" Desa Rejosari Kecamatan Mantewe, 1 KSM "Tegas Berseri" di Desa Tegal Sari Kecamatan Satui, 1 KSM " Bina Lingkungan Bersama" di Desa Muara Pagatan dan 1 Bank Sampah "Cinta Bumi" di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban	
	SUB KEGIATAN 3 : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Jumlah sarana yang di pelihara	2 Unit	2 Unit	100%	Pemeliharaan di 2 TPA	
		TOTAL CAPAIAN				96,40%		

Berdasarkan kategori *scoring* Dari table tersebut di atas, pencapaian kinerja DLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2023 sebesar 96,40 %, dapat disimpulkan termasuk kategori **SANGAT BAIK**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar 95,31%, tahun 2019 sebesar 101,88%, tahun 2020 sebesar 104,98% dan tahun 2021 sebesar 95,98 %, tahun 2022 sebesar 96,00 % dan tahun 2023 sebesar 96,40% maka pencapaian kinerja di tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya meskipun bisa dikatakan sama-sama pada kategori SANGAT BAIK/BERHASIL dalam pencapaiannya baik itu dari tingkat pelaksanaan program kegiatan sampai pada pencapaian kinerja utamanya.

Hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan DLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja Program dan kegiatan yang dianalisis yaitu sebagai berikut :

1. **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**, dengan indikator kinerja Persentase Pemenuhan Data Dokumen Perencanaan LH diperoleh dari perhitungan data Lingkungan Hidup yang terpenuhi dibandingkan total kebutuhan data. Target 85% dan realisasi 100%.

Program Perencanaan Lingkungan Hidup adalah program yang bertujuan untuk penyusunan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan rencana program pengendalian dan pengelolaan LH. Dokumen perencanaan yang menjadi target penyusunan Tahun 2023 adalah berupa Dokumen IKPLHD dan IKLH untuk periode data Tahun 2022 serta penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 – 2045. Indikator kinerja ini merupakan bentuk dari peran serta dinas dinas terkait dalam penyediaan data dukung untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan lingkungan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten.

Berdasarkan indikator dari kinerja ini adalah persentase Pemenuhan Data Dokumen Perencanaan LH dan data dokumen lingkungan hidup yang terpenuhi adalah 3 dan total kebutuhan data 3, jadi persentase data yang tersedia 100 % dari target 85% data yang terisi sehingga capaian kinerja sebesar 117,65%.

Dalam pencapaian program tersebut, didukung melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan, diantaranya :

- a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dengan indicator Persentase Pemenuhan Data Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) diperoleh dari data lingkungan hidup yang terpenuhi sebanyak 59 data dibagi total kebutuhan data sebanyak 61 data dengan realisasi 96,72% dari target 100%.

Dengan Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Dengan indikator Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota dan Persentase terpenuhinya 100% target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen.

- b. Kegiatan: Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan indicator Persentase Pemenuhan Data Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diperoleh dari data Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang terpenuhi sebanyak 220 data dibagi total kebutuhan data sebanyak 220 data dengan realisasi 100 % sesuai target.

Dengan Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Dengan indikator Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun dan Persentase terpenuhinya 100% target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 – 2045.

Dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil kegiatan dan sub kegiatan, maka dapat disimpulkan adanya kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

2. **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LH**, dengan indikator kinerja Persentase pemenuhan parameter kualitas Lingkungan diperoleh dari perhitungan Parameter Yang memenuhi baku mutu IKLH (Parameter IKA dan IKU) sebanyak 764 parameter dibandingkan total parameter IKLH (Parameter IKA dan IKU) yang diuji sebanyak 832 parameter dengan realisasi 91,83% dari target 86,67 % atau dengan capaian sebesar 105,95%.

Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah program yang bertujuan untuk mencapai sasaran Terwujudnya lingkungan yang bersih, hijau, lestari serta masyarakat dan industri yang berwawasan lingkungan. Adapun implementasi kegiatan utamanya di tahun 2023 meliputi :

1. Pemantauan kualitas lingkungan baik air, udara, tanah dan biomassa sebagai data penunjang pengukuran nilai IKLH Kabupaten Tanah Bumbu
2. Pembinaan Desa Program Kampung Iklim (PROKLIM) bekerjasama dengan beberapa pelaku usaha
3. Penyusunan Laporan Inventarisasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
4. Penanaman di Lahan Sangat Kritis di Areal Penggunaan Lain sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Program tersebut merupakan program utama dalam penyediaan data kualitas LH berupa nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) sehingga pencapaian indikator kinerja akan linear dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama baik tingkat OPD maupun Kabupaten yaitu nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Rumusan Indikator kinerja berdasarkan perhitungan persentase parameter kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu sebagai berikut :

$$\left(\text{Parameter yang memenuhi baku mutu IKLH (Parameter IKA + Parameter IKU)} / \text{total parameter IKLH (Parameter IKA + Parameter IKU) yang diuji} \right) \times 100 \%$$

Dari hasil perhitungan pada Tahun 2023 untuk Indikator kinerja berupa persentase pemenuhan parameter kualitas Lingkungan dengan realisasi sebagai berikut :

1. Hasil realisasi triwulan III persentase parameter kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu adalah sebesar 89,95 % $\left(\frac{(367+8)}{(408+8)} \right)$ yang terdiri dari parameter IKA yang memenuhi baku mutu sebesar 89,95 % dan parameter IKU yang memenuhi baku mutu 100 %
2. Hasil realisasi triwulan IV persentase parameter kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu adalah sebesar 93,38 % $\left(\frac{(381+8)}{(408+8)} \right)$ yang terdiri dari parameter IKA yang memenuhi baku mutu sebesar 93,38 % dan parameter IKU yang memenuhi baku mutu 100 %

Sehingga hasil capaian sd TW IV didapatkan persentase pemenuhan parameter kualitas lingkungan tahun 2023 adalah sebesar 91,67 % dari 816 parameter pemantauan tahap I dan tahap II.

Ketercapaian persentase pemenuhan parameter kualitas lingkungan dikarenakan :

1. Aggaran pencegahan pencemaran, pemantauan, pemulihan, dan pengawasan yang cukup pada DPA Dinas Lingkungan Hidup.
2. Dukungan SOPD lain yang membantu dalam penanganan pemenuhan baku mutu parameter Indeks Kualitas Air seperti Fecal Coliform yang erat kaitannya dengan buang air besar sembarangan karena sumber dari Fecal Coliform yaitu kotoran manusia.
3. Dukungan pelaku usaha yang berkomitmen dalam menjaga kualitas lingkungan di sekitar area kegiatan

Dengan adanya penambahan titik pantau kualitas air permukaan mulai tahun 2020 dari 29 titik menjadi 51 titik pantau, hal ini dapat memberikan gambaran kualitas air permukaan lebih komprehensif sehingga kedepannya data ini dapat digunakan

sebagai data dasar penyusunan program maupun indicator evaluasi program program yang berhubungan dengan pengendalian air.

Langkah – langkah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target dengan melakukan koordinasi secara internal dan eksternal terkait kualitas air hasil pemantauan sebagai data awal dan bahan evaluasi program kegiatan yang berjalan bagi internal Dinas maupun pihak eksternal

Dalam pencapaian program tersebut, didukung melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan, diantaranya :

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan indicator Persentase Pemenuhan Data Kualitas Air, Udara dan Tanah (%) dengan perhitungan Parameter kualitas air, udara, dan tanah yang memenuhi baku mutu sebanyak 3253 parameter dibagi total jumlah parameter sampel kualitas air, udara, dan tanah yang diuji sebanyak 3382 parameter dengan realisasi sebesar 96,19 % dari target 67% atau dengan capaian 143,56%.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemantauan kualitas air, udara dan tanah dengan realisasi sebagai berikut :

8. Hasil realisasi triwulan II persentase parameter kualitas air, udara dan tanah (tahap I) adalah sebesar $95,73 \% (1562+8)/(1632+8)$
9. Hasil realisasi triwulan IV persentase parameter kualitas air, udara dan tanah (tahap II) adalah sebesar $96,61 \% (1675+8)/(1734+8)$

Sehingga hasil capaian sd TW IV didapatkan Persentase pemenuhan data kualitas air, udara tahun 2023 adalah sebesar 96,19 %.

Perhitungan realisasi menggunakan pembobotan rata – rata dari hasil pemantauan tahap I dan tahap II pada setiap titik pantau yang terdiri dari 3 DAS meliputi DAS Batulicin, Kusan dan Satui serta titik bagian hulu dan hilir pada 21 sungai (51 titik pantau kualitas air) dan 4 titik pantau kualitas udara dengan parameter hasil pemantauan yang terdiri dari 32 parameter kualitas air sedangkan pada tahap II terdiri dari 34 parameter kualitas air dan parameter kualitas udara terdiri dari parameter NO₂ dan SO₂ dan baku mutu yang digunakan mengacu Sungai Kelas II dan baku mutu udara nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tercapainya persentase pemenuhan data parameter kualitas air, udara dan tanah merupakan salah satu ukuran keberhasilan Pemerintah dalam peningkatan kualitas air dan udara namun jika ditinjau berdasarkan

pengunaan Baku Mutu Sungai Kelas II sebagai pembanding untuk acuan daerah yang belum memiliki baku mutu lokal maka nilai tersebut tersebut masih belum dapat menggambarkan secara objektif dikarenakan baku mutu yang relative rendah dan titik pantau dalam satu aliran sungai minimal mewakili daerah hulu dan hilir akan menjadi factor yang mempengaruhi hasil realisasi sehingga diperlukan review ulang terkait penyusunan target berdasarkan hasil pemantauan dengan jumlah titik pantau yang baru pada tahun 2023 untuk dapat memproyeksikan dengan menggunakan metode regresi linear.

Yang terdiri dari sub kegiatan antara lain :

- a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Yang Dilaksanakan Pada Media Tanah, Air dan Udara
Target tahun 2023 adalah 1 dokumen dengan Indikator Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut dan terealisasi 1 dokumen.
- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen, target kinerja 1 dokumen terealisasi 1 dokumen.
Penyusunan laporan Inventarisasi GRK Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi mengenai data sumber emisi skala Kabupaten Tanah Bumbu dari 5 sector antara lain :
 1. Limbah,
 2. IPPU (*Industrial process and product uses*),
 3. Energi
 4. FOLU (*Forestry, and Other Land Uses*) dan
 5. Pertanian

Pada Tahun 2023 Perhitungan GRK menggunakan Aplikasi Sign Smart pada www.signsmart.menlhk.go.id yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Realisasi Inventarisasi GRK pada Tahun 2023 yaitu untuk data tahun 2022, didapatkan emisi GRK Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 72,61 (Gg CO₂) dengan pencapaian realisasi penurunan emisi GRK sebesar 97,818 %, lebih tinggi dari target penurunan sebesar 23,4 %.

Dari hasil analisa, faktor pengaruh yaitu Proyeksi grafik BAU tahun 2010 – 2030 yang dibuat hanya berdasarkan 4 sektor yang meliputi sektor energi, transportasi, pertanian dan limbah sedangkan perhitungan emisi GRK pada aplikasi sign smart juga menghitung sektor kehutanan dan Industri.

Kontribusi Emisi GRK tertinggi pada sektor energi sebesar 731,82 (Gg CO₂) dan pengurangan emisi GRK tertinggi berada pada sektor kehutanan yaitu -849,69 (Gg CO₂).

Kendala yang dihadapi adalah proses pengiriman data yang cukup lambat sehingga proses perhitungan Inventarisasi mengalami keterlambatan karena menunggu data tersebut.

Pada tahun 2023 terbentuk 8 desa program kampung iklim meliputi :

- a. Kategori Proklam Utama : Desa Pulau Burung Kec. Simpang Empat, Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin,
- b. Kategori Proklam Madya : Kelurahan Gunung Tinggi, Kec. Batulicin
- c. Kategori Proklam Pratama :
 1. Desa Sarimulya, Kec. Mantewe
 2. Desa Teluk Kepayang, Kec. Teluk Kepayang
 3. Desa Wonorejo, Kec. Kusan Hulu
 4. Desa Karang Sari, Kec. Kusan Hulu
 5. Desa Ringkit, Kec. Kuranji

Dan juga ada Desa Proklam yang naik Tingkat dari kategori Proklam Madya menjadi kategori Proklam Utama dan mendapatkan Penghargaan berupa Trophy Utama dari KLHK yaitu Desa Al Kautsar Kec. Satui

2. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Persentase lahan sangat kritis di sempadan sungai yang dipulihkan dengan target 40 %, terealisasi sebesar 54% atau dengan capaian sebesar 135 % yaitu perhitungan realisasi penanaman dari tahun 2022 sd 2023 seluas (2 Ha + 3.4 ha) dibagi rencana luasan yang dipulihkan seluas 10 ha dikali 100%. Indikator Luas lahan sangat kritis di sempadan sungai yang direhabilitasi yaitu penanaman dan pemeliharaan berupa 3400 batang bibit tanaman buah dan kayu kehutanan Dimana bibit tersebut diperoleh dari hasil Kerjasama DLH Kab. Tanah Bumbu dengan KPH Kusan dengan luasan 3,4 Ha di Sempadan Sungai Satui (Desa Beruntung Raya Kecamatan Satui). Total luas keseluruhan lahan yang direhabilitasi mulai tahun 2022 yaitu seluas 5,4 Ha, hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas lahan dan kualitas air.

Capaian ini didapat dari pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi terealisasi 1 dokumen.

Dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil kegiatan dan sub kegiatan, maka dapat disimpulkan adanya kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

4. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3).

Target 2023 adalah sebesar 61,67% dengan formulasi perhitungan yaitu jumlah pelaku usaha yang memenuhi izin pengelolaan LB3 sebanyak 72 pelaku usaha dibandingkan total pelaku usaha yang menjadi target pengawasan yang berpotensi menghasilkan LB3 sebanyak 137 pelaku usaha dengan realisasi 52,55% atau dengan capaian 85,21%. Persentase pelaku usaha dan atau kegiatan yang memenuhi izin pengelolaan LB3 berupa rekomendasi izin penyimpanan sementara limbah B3. Tingkat capaian masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 61,67%. Hal ini disebabkan Terbatasnya OK Perjadin dan kurangnya pembinaan secara langsung ke Perusahaan, Perjadin terbagi dengan verifikasi permohonan rincian teknis yang kebanyakan baru dan tidak termasuk dalam daftar perusahaan yang menjadi target pengawasan serta target masih mengikuti pengawasan.

Dalam pencapaian program tersebut, didukung oleh 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan indikator Persentase Tempat Penyimpanan Sementara LB3 yang disediakan oleh Pelaku Usaha, dari target 100% pelaku usaha usaha yang menyediakan TPS B3 dibanding total pelaku usaha yang wajib mempunyai TPS B3, terealisasi 45,58%, yaitu sebanyak 98 pelaku usaha yang menyediakan TPS LB3 dibanding total 215 pelaku usaha yang wajib mempunyai TPS LB3 dalam 1 Tahun. Belum tercapainya target dikarenakan Terbatasnya OK Perjadin dan kurangnya pembinaan secara langsung ke pihak pelaku usaha, dari 215 Tidak semua masuk dalam target pengawasan sehingga tidak ada kunjungan rutin dan Perusahaan merasa santai serta Perjadin terbagi antarakegiatan pembinaan dan verifikasi permohonan rintek yang kebanyakan baru dan tidak termasuk dalam daftar Perusahaan yang menjadi target pengawasan.

Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan) terealisasi sebanyak 1 laporan atau dengan capaian 100%.

Dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil kegiatan dan sub kegiatan, maka dapat disimpulkan adanya kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

- 5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH),** dengan indikator Prosentase Pelaku Usaha yang taat dalam pengelolaan LH dengan formulasi adalah jumlah pelaku usaha yang dikategorikan taat dalam pengelolaan LH sesuai aturan yang berlaku dibandingkan dari total pelaku usaha yang dilakukan pengawasan dalam 1 tahun. Ditetapkannya target sebesar 100% merupakan arahan dari KLHK bahwa hal tersebut adalah kondisi ideal yang diharapkan bahwa semua pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH patuh menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan sebagaimana tertuang pada dokumen RKL-RPLnya.

Capaian tahun 2023 adalah sebesar 96,15%, yaitu sebanyak 125 pelaku usaha yang dikategorikan taat dibandingkan dari 130 pelaku usaha yang diawasi. Ketaatan pelaku usaha tersebut selain pada pelaku usaha yang aktif melakukan kegiatan namun juga kepada pelaku usaha yang tidak aktif didukung dengan surat pernyataan tidak aktif beroperasi namun tetap melaksanakan kewajibannya berupa penyampaian laporan pelaksanaan RKL-RPL nya. Capaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan karena masih ada beberapa pelaku usaha yang dikategorikan belum taat terhadap kewajiban pengelolaan LH.

Langkah ke depan yang diambil untuk peningkatan ketaatan dan penurunan jumlah pelaku usaha yang melanggar izin lingkungan dan izin PPLH adalah mengintensifkan kualitas dan kuantitas pengawasan, dengan kata lain memaksimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan kualitas lingkungannya. Serta melakukan pembinaan dan evaluasi yang kontinyu dalam memonitoring keberadaan perizinan PPLH dalam rangka meningkatkan dan membangun kualitas LH yang lebih baik serta peningkatan kesadaran pelaku usaha dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan LH.

Dalam pencapaian program tersebut, didukung dengan pelaksanaan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Persentase Pelaksanaan Pengawasan terhadap ijin lingkungan dengan formulasi jumlah yang diawasi dibandingkan total jumlah ijin lingkungan. Target tahun 2023 adalah 100%, terealisasi sebesar 48,87%, dimana capaian ini didapatkan dari 130 pelaku usaha yang telah dilakukan pengawasan secara aktif dan langsung dibandingkan 266 pelaku usaha yang berijin lingkungan dan

aktif. Terhadap persetujuan teknis harapannya ialah semua persetujuan teknis yang telah diterbitkan dapat pula memenuhi persyaratan untuk penerbitan surat kelayakan operasional ditahun yang sama. Adapun 2 sub kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian kegiatan dan program adalah :

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dengan indicator kinerja Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen) dari target 25 dokumen terealisasi 24 dokumen atau capaian sebesar 96%,
- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) terealisasi 1 laporan atau dengan capaian sebesar 100% sesuai targetnya.

Dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil kegiatan dan sub kegiatan, maka dapat disimpulkan adanya kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

6. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH, dengan indikator kinerja Prosentase Jumlah MHA yang diakui.

Target tahun 2023 adalah 100%, dengan formulasi Jumlah MHA yang diakui / total jumlah lembaga MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA yang teridentifikasi. Tahapan kegiatan menuju pengakuan MHA adalah didahului dengan pembentukan Panitia MHA tingkat Kabupaten yang beranggotakan lintas SKPD dan lintas Sektor dan AMAN Kalsel, dan sejak tahun 2020 telah dilakukan inventarisasi serta identifikasi MHA pada 2 Lokasi yaitu Desa Temunih Kecamatan Kusan Hulu dan Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe. Dari kegiatan tersebut di tahun 2023 teridentifikasi 2 (dua) Balai Adat yang akan diusulkan sebagai MHA yaitu Balai Adat Tamunih Desa Tamunih Kec. Teluk Kepayang dan Balai Adat Alut Desa Gunung Raya Kec. Mantewe.

Target 2023 adalah sebanyak 1 (satu) Balai Adat yang diakui sebagai MHA dengan SK Penetapan Bupati/Perda tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan MHA Timanggung Anggut sudah ditandatangani oleh Bupati Tanah Bumbu sehingga terealisasi 1 buah SK Bupati tentang MHA.

Dalam pencapaian program tersebut, didukung oleh 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, dengan indicator Jumlah Pengakuan Lembaga MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang di akui (lokasi) dengan realisasi 1 MHA Timanggung Anggut.

Adapun sub kegiatannya adalah Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH, dengan indicator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen) terealisasi sebanyak 1 dokumen.

- b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dengan indicator Persentase Peningkatan kapasitas MHA dan Kearifan lokal, Pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (%) dan sub kegiatannya Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH dengan indicator Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen) terealisasi 1 dokumen atau sebesar 100%

Dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil kegiatan dan sub kegiatan, maka dapat disimpulkan adanya kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

- 7. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**, dengan indikator kinerja Persentase pelaku yang aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup, melalui keikutsertaan dalam lomba yang didalamnya juga terdapat kriteria penilaian bidang Lingkungan hidup maupun penerapannya dalam keseharian.

Target tahun 2023 adalah sebesar 80% dengan formulasi jumlah masyarakat yang aktif (sekolah + kelompok / desa + PSM pengelolaan sampah) / total jumlah masyarakat yang dibina yang telah mengikuti diklat.

Realisasi tahun 2023 adalah sebesar 100% yaitu karena ada (11 desa/ kelompok yang aktif + 9 sekolah yang ikut nominasi adiwiyata tk Prov &/ nasional + 5 KSM) / (13 desa/kelompok yang dibina +7 lomba Tingkat Provinsi/Nasional + 5 KSM yang dibina) atau sebanyak 25 pelaku yang tercatat aktif dalam pengelolaan LH dibandingkan dari 25 pelaku di masyarakat yang telah mengikuti diklat/pelatihan bidang lingkungan hidup. 25 Pelaku yang tercatat aktif diantaranya terdiri dari :

a. 11 Lembaga yang aktif, antara lain :

1. 4 Posyandu yang menang lomba posyandu tingkat Kabupaten yaitu :
 - a. Juara I: Posyandu Mekar Sari Desa Tegal Sari Kec. Satui
 - b. Juara II : Posyandu Mawar Indah Desa Muara Pagatan Tengah Kec. Kusan Hilir
 - c. Juara III : Posyandu Kamboja Desa Dwi Marga Utama Kec. Sungai Loban
 - d. Juara IV : Posyandu Harapan Maju Desa Maju Makmur Kec. Batulicin
2. Lembaga Yang Aktif Terkait Lingkungan Hidup :
 1. Perwakilan lomba Posyandu tingkat Prov. Kalsel yaitu posyandu Mekar Sari Desa Tegal Sari Kec. Satui
 2. Perwakilan lomba HATINYA PKK tingkat Prov. Kalsel yaitu desa Sumber Wangi Kec. Karang Bintang
 3. Pemenang lomba dasawisma tingkat Kabupaten tahun 2023 ada 3 yaitu:
Juara I : Desa Sari Mulya Kec. Sungai Loban
Juara II : Desa Karang Rejo Kec. Karang Bintang
Juara III : Desa Bulurejo Kec. Mantewe
 4. Perwakilan lomba desa ber-PHBS yaitu Desa Sari Mulya Kec. Sungai Loban
- 3.9 Sekolah yang masuk Nominasi Adiwiyata:
 1. 1 CSAN (SDN 1 Sari Mulya Kec. Sungai Loban) dan
 2. 3 CSAM (SMPN 1 Simpang Empat, SMAN 1 Sungai Loban dan SMAN 1 Simpang Empat)
 3. 5 sekolah CSAP tahun 2023 yaitu : SMPN 1 Kusan Hilir, SDN 1 Bayan Sari, SMPN 1 Kusan Hulu, SMPN 1 Satui, SDN Kerta Buwana Kec. Sungai Loban
4. 5 KSM yang aktif yaitu :
 1. KSM Bina Lingkungan Asri Desa Bunati Kecamatan Angsana

2. KSM Sido Mukti Desa Karang Sari Kecamatan Kusan Hulu,
3. KSM Mutiara Bersujud Desa Sebamban Lama Kec. Sungai Loban,
4. KSM Berkah ZW Desa Batulicin Irigasi Kec. Karang Bintang dan
5. KSM Ar-Rahmah Desa Sepunggur Kec. Kusan Tengah.

Program tersebut didukung dengan pelaksanaan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi bidang Lingkungan Hidup (%) dan target indicator kinerja sebesar 33,33% terealisasi 124% yaitu sebanyak 93 pelaku yang mengikuti pelatihan dibandingkan total 75 pelaku yang dibina baik sekolah, kelompok/desa dan peran serta masyarakat pengelolaan sampah dengan jumlah pelatihan sebanyak 11.

Rincian Jumlah Lembaga yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup antara lain :

No	Nama Lembaga	Jenis Diklat/Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1	Lapas Kelas III Batulicin	Pelatihan pengolahan sampah organik berbasis Ecoenzyme Kerjasama dengan PT. Tunas Inti Abadi	Selasa / 31 Januari 2023	Aula Pertemuan Lapas Kelas III Batulicin
2	Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kab. Tanah Bumbu	Sosialisasi Perempuan Sehat Dan Cantik dengan Eco Enzyme Pada Kegiatan Pertemuan Rutin Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Tanah Bumbu Kerjasama dengan PT. Tunas Inti Abadi	Kamis / 9 Februari 2023	Aula Sekretariat PKK, Kapet
3	SMAN 1 Sungai Loban SMPN 1 Kusan Hulu SMPN 2 Sungai Loban SDN 1 Batu Meranti SDN 1 Sari Mulya SDIT Dhia El Widad Kec Sungai Loban	Pembuatan Biopori dan Sosialisasi Pemilahan Serta Pengolahan Sampah kerjasama dengan PT. Borneo Indobara	Selasa / 28 Februari 2023	Ruang Pertemuan SMAN 1 Sungai Loban
4	SMAN 1 Sungai Loban SMPN 1 Kusan Hulu SMPN 2 Sungai Loban SDN 1 Batu Meranti SDN 1 Sari Mulya SDIT Dhia El Widad Kec Sungai Loban	Pengolahan Eco Enzyme Kerjasama dengan PT. Tunas Inti Abadi	Rabu / 15 Maret 2023	Ruang Pertemuan SMAN 1 Sungai Loban
5	Perwakilan desa Proklim sebanyak 12 desa, yaitu : 1. Kepala Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana 2. Kepala Desa Angsana Kecamatan Angsana 3. Kepala Desa Banjarsari Kecamatan	Monitoring Hasil Pelatihan Eco Enzyme Kerjasama dengan PT. Tunas Inti Abadi	Kamis / 16 Maret 2023	Aula Kantor DLH

No	Nama Lembaga	Jenis Diklat/Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
	Angsana 4. Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Mantewe 5. Kepala Desa Sebamban Lama Kecamatan Sungai Loban 6. Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Angsana 7. Kepala Desa Purwodadi Kecamatan Angsana 8. Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Satui 9. Kepala Desa Tibarau Panjang Kecamatan Kusan Hulu 10. Kepala Desa Al - Kautsar Kecamatan Satui 11. Kepala Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang 12. Kepala Desa Mustika Kecamatan Kuranji			
6	Perwakilan sekolah Adiwiyata sebanyak 15 sekolah yaitu : 1. SDN Kerta Buwana Kec. Sungai Loban 2. SMPN 1 Kusan Hilir 3. SDN 1 Bayansari Kec. Angsana 4. SMPN 1 Satui 5. SMPN 1 Kusan Hulu 6. SDIT Ar-Rasyid Kec. Batulicin 7. SDN 1 Angsana Kec. Angsana 8. SMPN 7 Kusan Hilir 9. SMPN 4 Mantewe 10. SDIT Dhia El Widad Kec. Sungai Loban 11. SDN 8 Kampung Baru Kec. Simpang Empat 12. SDN 1 Sarimulya Kec. Sungai Loban 13. SMPN 1 Sungai Loban 14. SMPN 1 Simpang Empat 15. SMAN 1 Angsana	Monitoring Hasil Pelatihan Eco Enzyme Kerjasama dengan PT. Tunas Inti Abadi	Kamis / 16 Maret 2023	Aula Kantor DLH
7	Perwakilan TPS 3R/KSM sebanyak 13 buah yaitu : 1. KSM Mapesa 2. KSM Bersahaja 3. KSM Bina Banua 4. KSM Karya Bersama 5. KSM AR-Rahmah 6. KSM Sirenreng 7. KSM Mutiara Bersujud 8. KSM Berkat ZW 9. KSM Hidayah Makmur 10. KSM Batulicin Sejahtera Mandiri	Monitoring Hasil Pelatihan Eco Enzyme Kerjasama dengan PT. Tunas Inti Abadi	Kamis / 16 Maret 2023	Aula Kantor DLH

No	Nama Lembaga	Jenis Diklat/Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
	11. KSM Kopel 12. KSM Bina Lingkungan Asri 13. BUMDES AL-Kautsar			
8	TP PKK Desa Setarap & TP PKK Kec. Satui Kader PKK Setarap Perwakilan masyarakat stunting & masyarakat miskin	Pengolahan Kompos di Desa Lokus Peningkatan Kualitas Keluarga & salah satu desa lokus Stunting 2023 (Desa Setarap)	Jum'at / 16 Juni 2023	Aula Kantor Desa Setarap Kec Satui
9	Perwakilan masyarakat Desa Pulau Burung	Pengolahan sampah plastik di Desa Proklam (Desa Pulau Burung) Kerjasama dengan PT Arutmin Indonesia	Kamis / 20 Juli 2023	Desa Pulau Burung Kec Simpang Empat
10	24 CSAK (SDN Indralokajaya, SDN 4 Sekapuk, SMAN 1 Kuranji, SDN 2 Sepunggur, SMPN 4 Satap Karbin, SDN 2 Bayansari, SMPN 3 Satap Angsana, SD Negeri 2 Sari Utama, SMPN 1 Kuranji, MTs. Darul Azhar, SMP IT Al-Asmaul Husna, SDN 2 Marga Mulya, MTsN 3 Tanah Bumbu, SMPN 2 Mantewe, SDN 1 Sukadamai, SMPN 4 Sungai Loban, SDN 1 Batuah, SMKS Insan Luhur Nusantara, SD Katolik St. Vincent, SMPN 4 Kusan Hilir, SDIT Al Fath Kec Batulicin, SMPN 4 K Hilir, SDN Rejowinangun Kec Karang Bintang, SMPN 2 Mantewe)	Sosialisasi Adiwiyata dan Pelatihan Folder Bukti Calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten (CSAK) bagi 21 sekolah se-Tanah Bumbu	Selasa / 8 Agustus 2023	Ruang Rapat DLH Kab. Tanah Bumbu
11	TP PKK Desa Setarap & TP PKK Kec. Satui Kader PKK Setarap Perwakilan masyarakat stunting & masyarakat miskin	Pengolahan Sampah Non Organik di Desa Lokus Peningkatan Kualitas Keluarga & salah satu desa lokus Stunting 2023 (Desa Setarap)	Jum'at / 11 Agustus 2023	Aula Kantor Desa Setarap Kec Satui
12	1. Balai adat Alut 2. Balai adat Biajuy 3. Balai adat Tuyan 4. Balai adat Kuluman	Pelatihan Penggalan Data Dukung, komunitas adat, hukum adat, pemetaan peta dan lay out pembagian ruang pada calon MHA di desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe	Selasa - Kamis / 3 - 5 September 2023	Rumah warga pada Balai adat Biajuy
13	1. TP PKK Kec (12 Kec) 2. TP PKK Kab Tanah Bumbu	Pengolahan minyak jelantah pada pelatihan pengolahan sampah rumah tangga di Pertemuan PKK se-Tanah Bumbu Kerjasama dengan TP PKK Kab Tanah Bumbu	Jum'at / 29 September 2023	Aula Koramil Kusan Hilir

Realisasi melebihi target dikarenakan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu Sebagian besar bekerjasama dengan pihak ketiga

antara lain PT. tunas Inti Abadi, PT. Borneo Indobara, PT. Arutmin Indonesia, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten dan Tim Penggerak PKK Kab. Tanah Bumbu.

Adapun 2 sub kegiatannya adalah:

- Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan dengan indikator Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH (Lembaga), dengan realisasi sebanyak 44 kelompok/desa yang dibina dari target 35 kelompok/desa atau dengan capaian sebesar 100%.

44 kelompok/desa yang dibina antara lain :

1. Desa Sungai Loban Kec. Sungai Loban,
2. Desa Pulau Salak Kec. Kusan Hilir,
3. Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat),
4. 1 lembaga sasaran pelatihan eco enzyme (Lapas Kelas III Batulicin Kec. Kusan Tengah) dan
5. 1 desa lokus peningkatan kualitas keluarga (Desa Setarap Kec. Satui).
6. Posyandu Mekar Sari Desa Tegal Sari Kec. Satui,
7. Posyandu Kelapa Desa Bunati Kec. Angsana,
8. Posyandu Semangat Desa Anjirbaru Kec. Kusan Hulu,
9. Posyandu Sayang Anak Desa Tapus Kec. Teluk Kepayang,
10. Posyandu Mawar Desa Barokah Kec. Simpang Empat,
11. Posyandu Mawar Indah Desa Muara Pagatan Tengah Kec. Kusan Hilir, Posyandu Harapan Maju Desa Maju Makmur Kec. Batulicin,
12. Posyandu Nusa Indah Desa Sepakat Kec. Mantewe,
13. Posyandu Rosella Desa Karang Rejo Kec. Karang Bintang,
14. Posyandu Mekar Jaya Desa Sepunggur Kec. Kusan Tengah,
15. Posyandu Kamboja Desa Dwi Marga Utama Kec. Sungai Loban dan
16. Posyandu Melati Desa Waringin Tunggal Kec. Kuranji.
17. Desa Sumber Wangi Kec. Karang Bintang
18. Desa Purwodadi Kec. Angsana,
19. Desa Muara Tengah Pagatan Kec. Kusan Hilir,
20. Desa Sepunggur Kec. Kusan Tengah,
21. Desa Sari Mulya Kec. Sungai Loban dan
22. Desa Sungai Cuka Kec. Satui
23. Posyandu Mekar Sari Desa Tegal Sari Kec. Satui.
24. Posyandu Mekar Sari Desa Tegal Sari Kec. Satui.

25. Desa Setarap Kec. Satui.
26. Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat,
27. Desa Bulurejo Kec. Mantewe,
28. Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin,
29. Desa Karang Rejo Kec. Karang Bintang,
30. Desa Harapan Jaya Kec. Kusan Hulu,
31. Desa Mustika Kec. Kuranji dan
32. Desa Hatiif Kec. Teluk Kepayang.
33. Desa Sari Mulya Kec. Sungai Loban
34. Desa Pandan Sari Kec. Karang Bintang
35. SMPN 4 Sungai Loban,
36. SMPN 3 Angsana,
37. SMPN 4 Simpang Empat,
38. SMPN 8 Satui,
39. SDN Pacakan Kec. Kusan Hulu,
40. SDN 1 Manunggal Kec. Karang Bintang,
41. SDN 1 Batuah Kec. Kusan Hilir,
42. SDN 1 Teluk Kepayang,
43. SDN Mustika Kec. Kuranji,
44. SDN Saring Sungai Bubu Kec. Kusan Tengah.

Realisasi melebihi target dikarenakan kegiatan merupakan Kerjasama dengan dinas lain. Untuk tahun 2023, ada pembinaan dan bimtek sekolah ramah anak dari Dinas P3AP2KB.

- Sub Kegiatan : Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup, dengan Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen), realisasi kinerja sesuai targetnya yaitu sebanyak 1 dokumen

Dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil kegiatan dan sub kegiatan, maka dapat disimpulkan adanya kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

8. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP, dengan indikator kinerja persentase penyelesaian pengaduan LH tahun berjalan.

Target Indikator tersebut adalah 100% di tahun 2023. Prosentase tersebut dihitung dari jumlah pengaduan selesai ditangani dibandingkan jumlah pengaduan yang selesai ditangani oleh Tim Pengaduan DLH setiap tahunnya serta dalam status

selesai dengan keluarnya rekomendasi penyelesaian yang diinformasikan kepada pihak pengadu dan yang subyek sumber aduan. Pengaduan yang masuk diklasifikasikan dulu yang termasuk dalam pengaduan masalah lingkungan dan pengaduan yang bisa ditindaklanjuti adalah pengaduan dengan sumber pencemar yang izin usaha/izin lingkungannya dikeluarkan oleh Bupati Tanah Bumbu. Di Tahun 2023 sebanyak 10 pengaduan masuk dan ditindaklanjuti dan dalam status penyelesaian, sehingga capaiannya terhadap total jumlah aduan yang masuk sebesar 100%.

Dalam pelaksanaan program tersebut didukung dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan formulasi jumlah pengaduan yang ditangani dibandingkan total jumlah pengaduan yang masuk. Dari target 100% pengaduan bidang LH yang ditindaklanjuti, terealisasi sesuai targetnya. Tahun 2023 sebanyak 10 pengaduan bidang LH yang ditindaklanjuti oleh Tim. Adapun sub kegiatannya adalah Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah pengaduan Masyarakat terhadap RPPLH Kabupaten/Kota Yang Ditindaklanjuti/ditangani, terealisasi sesuai targetnya, dimana dari 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen.

Dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil kegiatan dan sub kegiatan, maka dapat disimpulkan adanya kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

STRATEGI DAN PROGRAM KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM & KEPEGAWAIAN

1. Menyusun rencana pengadaan perangkat *mobile* sesuai dengan jumlah yang diperlukan, terutama untuk pejabat yang menggunakan aplikasi SRIKANDi
2. Melakukan sosialisasi secara rutin mengenai fitur – fitur dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI
3. Membuat buku panduan (*manual book*) penggunaan aplikasi SRIKANDI dan penggunaan tanda tangan elektronik
4. Memverifikasi dan mengevaluasi kehadiran dan point kinerja ASN di system SIAP dari BKPSDM Kab. Tanah Bumbu
5. Mengevaluasi prestasi kinerja pegawai ASN dan merekap hasil penginputan kinerja per triwulan dan periode akhir tahunan di system E-KINERJA BKN

STRATEGI dan PROGRAM KEGIATAN BIDANG TATA LINGKUNGAN DALAM RANGKA PENINGKATAN :

1. Melaksanakan pendataan, penamaan dan pengkodean melalui system *barcode* terhadap jenis vegetasi di wilayah Hutan Kota sebagai media edukasi kepada masyarakat dan pelajar
2. Melaksanakan verifikasi lahan berdasarkan jenis tutupan lahan dan RTH dengan melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait
3. Memberikan himbauan dan dorongan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk dapat melaksanakan dan meningkatkan kegiatan penghijauan, sehingga dapat meningkatkan nilai indeks tutupan lahan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu
4. Menjalin Kerjasama dengan stakeholder terkait dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang lingkungan hidup.
5. Melaksanakan penyusunan dokumen Rancang Bangun Rinci (*Detail Engineering Design/DED*) Wilayah Median Jalan 30 dan Gunung Tinggi di Kecamatan Batulicin meliputi penyusunan dokumen desain teknis bangunan yang terdiri dari gambar teknis, spesifikasi teknis dan spesifikasi umum, volume serta biaya pekerjaan.

STRATEGI dan PROGRAM KEGIATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN :

1. Mendorong pembentukan minimal 1 kelompok pengelola persampahan di Tiap Desa/Kelurahan Untuk Mengetahui Potensi Timbulan Sampah Yang Dilakukan Pemilahan Selain Juga Bisa Menambah PAD Dari Retribusi Persampahan melalui Surat Edaran dan Instruksi Bupati Tanah Bumbu serta memonitoring eksistensi kelompok pengelola persampahan yang sudah terbentuk baik dalam hal penanganan dan pengurangan sampah dari sumber juga kontribusinya ke daerah
2. Mensosialisasikan Kembali secara massif instruksi bupati dan surat edaran sebagai bentuk implementasi dari Perda No 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah terkait tertib jam buang dan tempat pembuangan sampah khususnya area pertokoan dan perkantoran sehingga diharapkan masyarakat membuang sampah antara jam 18.00 wita s.d. jam 05.00 Wita. Dampak yang diharapkan di area perkotaan maksimal jam 07.00 wita kegiatan layanan angkutan persampahan sudah selesai. Sebagai contoh lokasi pertokoan wilayah Kecamatan Simpang Empat. Dari instruksi bupati dan surat edaran tersebut, ke depannya dengan peningkatan ketaatan masyarakat dan terbentuknya 1 Desa 1 Pengelolaan sampah yang dikelola oleh Desa/Kelurahan maka banyak hal positif yang diperoleh yaitu :

- Berkurangnya sampah yang masuk ke TPA sehingga memperpanjang usia pakai TPA
 - Berkurangnya biaya operasional pengangkutan sampah dari depo menuju ke TPA
 - Berkurangnya tenaga yang diperlukan untuk memuat sampah dan supir truk
 - Penambahan PAD melalui retribusi yang disetorkan
3. Kontinuitas penerapan program ADIPURA dengan pelibatan beberapa instansi terkait dan stakeholder lainnya
 4. Optimalisasi upaya pengurangan sampah dengan langkah :
 - a. Program Si Julpikar's (Aksi Jual, Pilah, Dan Tukar Sampah), dengan Bentuk Penerapannya Adalah Tukar Sampah Ekonomis Dengan Sembako, Sedekah Sampah Oleh Warga Untuk Tempat Ibadah
 - b. Mendorong pembentukan Bank Sampah Unit Baru, mendorong keaktifan/eksistensi Bank Sampah Unit Instansi Pemerintah, Sekolah Dan Tingkat Desa yang sudah terbentuk serta mengoptimalkan kinerja Bank Sampah Induk DLH yang dikelola UPTD Pengelolaan Sampah.
 - c. Meningkatkan upaya pembinaan ke masyarakat dan pelibatan peran swasta untuk pengelolaan persampahan serta publikasi penyebarluasan informasi kegiatan pengelolaan sampah ke masyarakat

STRATEGI DAN PROGRAM KEGIATAN BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN & KERUSAKAN LH

1. Membuat kesepakatan MoU dan Berita Acara dengan pihak masyarakat yang diketahui oleh pihak Desa bahwa area lokasi akan dilakukan Rehabilitasi
2. Mengarahkan Perusahaan Agar dalam program CSR nya disesuaikan Dengan Kebutuhan Desa Proklim Yang Di Dampinginya
3. Melakukan Service Mobil secara berkala

STRATEGI DAN PROGRAM KEGIATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PELATIHAN LINGKUNGAN SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN :

1. Lebih merangkul unit kegiatan/pelaku usaha dalam hal pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di bidang LH
2. Melakukan kegiatan rutin pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan yang berijin
3. Menggandeng akademisi dalam hal pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup

4. Meningkatkan koordinasi dengan Panitia Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait inventarisasi dan identifikasi ISOMHA
5. Melibatkan pihak Kecamatan, desa yang berdampak pada peta wilayah adat yang diusulkan

KEGIATAN LAYANAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dalam pelaksanaan tupoksinya, selain kegiatan rutin, DLH Kab. Tanah Bumbu juga ada kegiatan layanan ke masyarakat melalui UPTD Laboratorium Lingkungan berupa layanan pengambilan dan pengujian sampel, dan UPTD. Pengelolaan Persampahan berupa layanan angkutan persampahan. Dalam melaksanakan layanan tersebut, kedua UPTD menetapkan indikator layanan berupa penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan menyebarkan kuesioner sebagai alat pengukuran keberhasilan layanan berupa Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

SKM adalah kumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat pengguna layanan dengan indikator dan metodologi survei yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah UPTD Laboratorium Lingkungan dan UPTD. Pengelolaan Persampahan, Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Tanah Bumbu.

Berikut target dan capaian layanan kedua UPT tersebut tahun 2023:

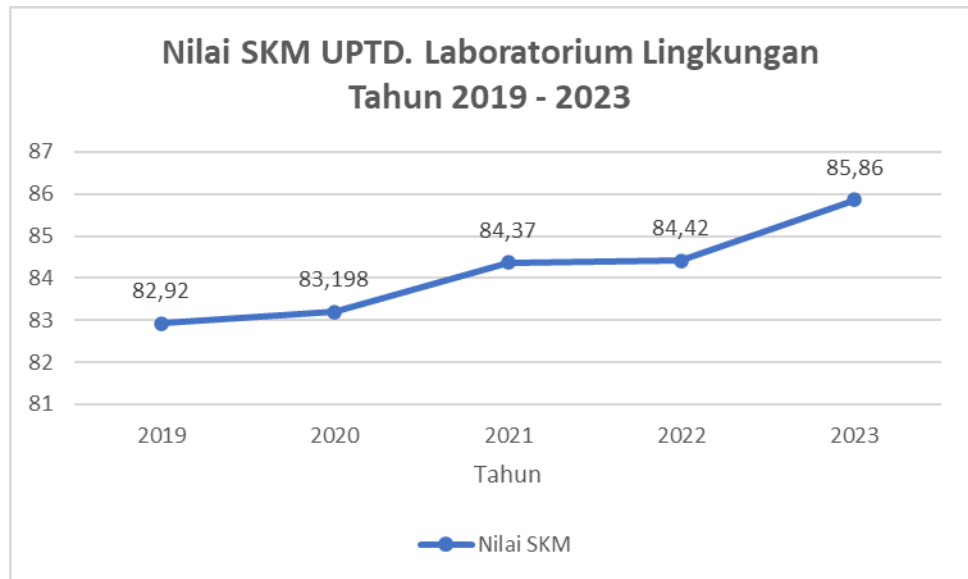
1. UPTD. Laboratorium Lingkungan

- Pengukuran keberhasilan kegiatan dinilai dari nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengujian sampel kualitas lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu kepada 66 responden dengan hasil sebesar 85, 86.

Jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya, nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengujian sampel kualitas lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

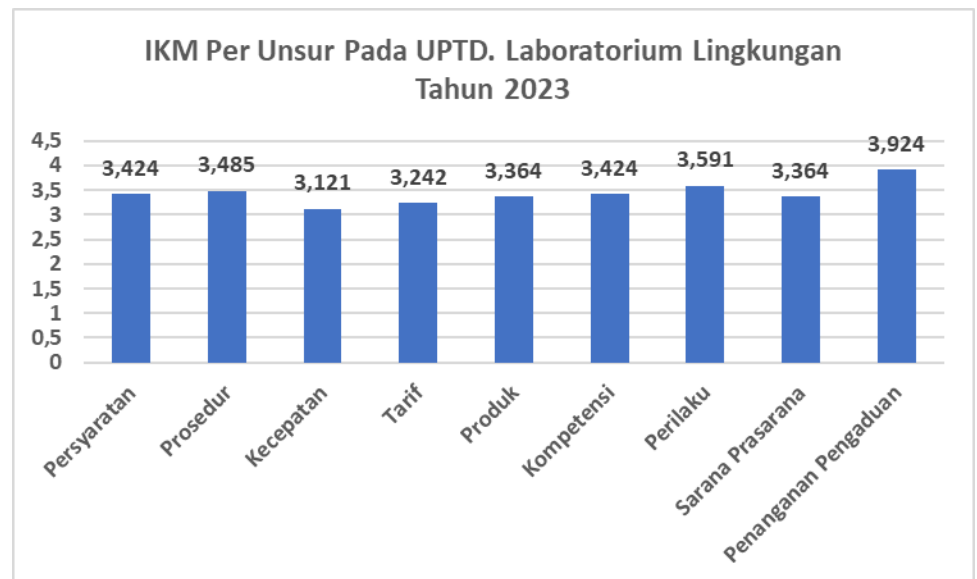
Tabel 3.28 Nilai IKM UPTD Laboratorium Lingkungan Tahun 2019 - 2023

No	Keterangan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,92	83,2	84,37	84,42	85,86



- Jumlah responden pengguna jasa layanan pada UPTD Laboratorium Lingkungan tahun 2023 sebanyak 66 orang, seluruh unsur akan dinilai dengan salah satu nilai yaitu kriteria a (nilai 1), kriteria b (nilai 2), kriteria c (nilai c), dan kriteria d (nilai 4). Data hasil survey selanjutnya diolah dengan menggunakan bobot nilai rata-rata tertimbang yang kemudian nilai SKM tersebut dihitung dengan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus : $SKM = \text{total dari nilai persepsi per unsur} / \text{total unsur yang terisi} \times \text{nilai penimbang}$.
- Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaia tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus : $\text{Nilai SKM unit pelayanan} \times 25$. Hasilnya disebut konversi SKM unit pelayanan, yang selanjutnya ada nilai range untuk kategori kualitas pelayanan yaitu A / SANGAT BAIK, B/BAIK, C/KURANG BAIK DAN D/TIDAK BAIK.
- Dari hasil survey maka didapatkan nilai IKM layanan Laboratorium adalah 85,86 atau dalam kategori **BAIK** sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Pelaksanaan pelayanan publik di UPTD Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Tanah Bumbu, secara umum mencerminkan tingkat kualitas **Baik**;
 - Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu kecepatan pelayanan nilai 3,121; kesesuaian/kewajaran biaya 3,242; dan kesesuaian pelayanan nilai 3,364.
 - Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu penanganan pengaduan mendapatkan nilai tertinggi 3,924 dari unsur layanan;

perilaku petugas pelayanan nilai 3,591; serta prosedur pelayanan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya 3,485.



- Hasil tersebut menggambarkan kekuatan maupun kelemahan dalam pemberian pelayanan publik yang tentunya patut mendapat perhatian serius sehingga perlu dirumuskan kebijakan dan strategi rencana aksi dalam memperbaiki kelemahan dalam pemberian pelayanan publik.
- Meskipun secara umum responden merasa puas dengan kualitas layanan yang diberikan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan, namun responden masih mengharapkan perhatian kepada beberapa unsur, yaitu :
Kecepatan Layanan (kategori sudah baik akan tetapi masih ada beberapa faktor yang membuat kecepatan layanan masih dirasa kurang yaitu kerusakan peralatan, faktor bahan kimia atau reagen penunjang pengujian, *overload* jumlah sampel yang diterima serta kekurangan SDM/analisis dll), Kesesuaian dan kewajaran biaya (kategori sudah baik karena harga atau biaya pengujian kualitas lingkungan masih dianggap murah).
- Beberapa saran yang perlu dilakukan untuk peningkatan tingkat pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Tanah Bumbu, diantaranya adalah :
 1. Menambahkan dan memperlengkapi sarana dan prasarana laboratorium yang masih kurang
 2. Mengajukan anggaran untuk pengadaan mobil lapangan laboratorium

3. Melakukan evaluasi bulanan dengan lebih mendalam terhadap pelaksanaan pengujian dan pelaporan kegiatan pengujian kualitas air, udara, tanah, biota dan pengujian lainnya, untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi sehingga permasalahan yang ada dapat segera di selesaikan.
4. Memperbarui dan menambah fasilitas pelayanan demi kenyamanan masyarakat, sehingga pada saat menunggu proses pelayanan, masyarakat dapat lebih menikmati waktu tersebut dan dapat mengurangi kejenuhan.
5. Memperbarui berbagai peralatan yang sudah mulai aus, sehingga biaya perbaikan terhadap peralatan dapat ditekan, dan kecepatan pengujian dapat meningkat
6. Perluas promosi terkait layanan laboratorium lingkungan BLUD Laboratorium Kab. Tanah Bumbu ke Instansi dan Pelaku Usaha di Lingkup Wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya

2. UPTD. Pengelolaan Persampahan

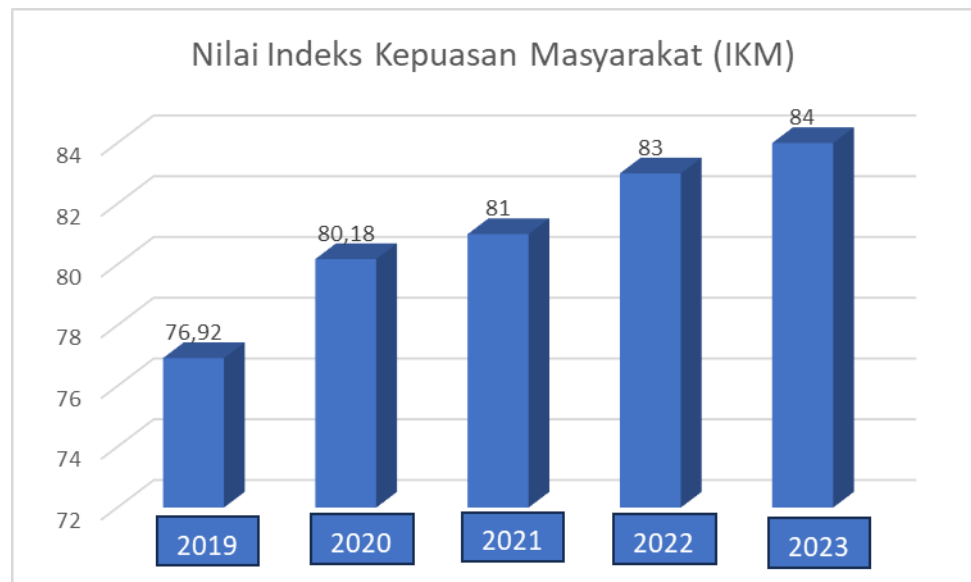
- Sistem pengolahan data SKM untuk mendapatkan nilai IKM sama halnya dengan yang dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan. Capaian untuk tahun 2023 dari target kategori Baik dengan target poin pada range 76,61 – 88,30, capaiannya pada poin 84 dengan kategori Baik. Nilai IKM ini didapatkan dari SKM 100-150 responden di 3 area layanan persampahan meliputi Kecamatan Simpang Empat-Batulicin, Kecamatan Kusan Hilir dan kecamatan Satui. Berdasarkan capaian 2023, dari 9 unsur yang dinilai, ada 2 unsur yang mendapat nilai terendah yaitu kualitas sarana dan prasarana (3,180) dan kesesuaian/kewajaran biaya (poin 3,270).
- Belum maksimalnya nilai kedua unsur tadi akan menjadi bahan evaluasi peningkatan kualitas layanan angkutan persampahan. Mengingat setiap tahunnya, DLH melalui UPTD. Pengelolaan Persampahan melakukan perluasan area layanan dari 8 kecamatan di kurun waktu 2019-2020 menjadi 9 kecamatan di kurun waktu 2021-2023, ditengah kendala belum optimalnya jumlah SDM serta sarana yang dimiliki meliputi jumlah dan kondisi armada serta TPA yang ideal dengan volume produksi sampah harian di tiap wilayah. Untuk penanganan pengaduan terkait permasalahan persampahan, UPTD juga sudah membuat tim khusus dan menyediakan wadah untuk menerima aduan berupa medsos dan kontak WA. Hal lain yang juga diperhatikan yaitu dengan

mengevaluasi klasifikasi objek serta besaran retribusinya sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu Pemendagri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Usulan perubahan tersebut telah diajukan dalam bentuk draft Raperda Pajak dan retribusi dimana salah satu materi didalamnya terkait layanan kebersihan. Ke depannya akan selalu dilakukan pembenahan terkait pengelolaan dan penanganan sampah di Kabupaten Tanah Bumbu yang juga diharapkan di dukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai untuk peningkatan kualitas layanan.

- Jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya, nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.29 Nilai IKM UPTD Pengelolaan Persampahan Tahun 2019 – 2023

No	Keterangan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,92 (BAIK)	80,18 (BAIK)	81 (BAIK)	83 (BAIK)	84 (BAIK)



Dari rangkaian capaian kinerja dan segala permasalahan serta kendala yang ada, beberapa faktor yang menyebabkan pendorong keberhasilan kinerja DLH Kab. Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

1. SDM yang kompeten, meskipun masih ada kebutuhan penambahan SDM yang kompeten

2. Disiplin dan semangat bekerja aparatur yang cepat dan tepat waktu dalam pelaksanaan kegiatan serta kerjasama/koordinasi yang baik dalam satuan kerja DLH Kab. Tanah Bumbu
3. Faktor lainnya adalah pelaksanaan kegiatan berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada RENSTRA DLH Kab. Tanah Bumbu

Dari keberhasilan yang dicapai tersebut, tidak dapat dipungkiri juga ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya :

1. Masih terbatasnya ketersediaan SDM yang kompeten
2. Pemenuhan prasarana dan sarana operasional kegiatan sesuai standard masih terbatas dengan pagu yang ada
3. Kondisi alam (cuaca dll) serta medan/akses jalan yang belum kondusif yang terkadang menyulitkan pelaksanaan kegiatan seperti pengambilan sampel air DAS dan sungai.
4. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah
5. Ketersediaan anggaran untuk memaksimalkan kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor keberhasilan dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan evaluasi perencanaan kegiatan dan anggaran di tahun berikutnya dengan tujuan untuk peningkatan kinerja DLH Kab. Tanah Bumbu

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2023 belanja DLH Kab. Tanah Bumbu terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Uraian pembiayaan belanja langsung dan tidak langsung DLH Kab. Tanah Bumbu TA. 2023 sebagai berikut :

B. 1. Belanja Langsung

Anggaran belanja langsung perubahan DLH Kab. Tanah Bumbu TA. 2023 adalah sebesar Rp. 38.611.938.336,- yang terbagi menjadi :

Tabel 3. 30 Tabel Belanja Langsung DLH Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.323.677.876	16.291.717.699	94,04%
2	Belanja Program Urusan Lingkungan Hidup	21.288.260.460	20.181.338.791	94,80%
Total		38.611.938.336	36.473.056.490	94,46%

Secara rinci untuk realisasi keuangan baik program, kegiatan maupun sub kegiatan tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3. 31 Tabel Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2023

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi Keuangan
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.847.578.362	17.323.677.876	16.291.717.699
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.086.900	24.778.800	24.617.400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.600.400	11.292.300	11.280.900
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.486.500	13.486.500	13.336.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.944.741.106	6.199.999.536	6.120.468.279
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.542.689.462	5.810.821.262	5.733.881.280
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	402.051.644	389.178.274	386.586.999
Administrasi Umum Perangkat Daerah	751.363.500	899.493.500	881.113.233
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	170.285.000	179.185.000	178.085.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.400.000	1.635.000

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi Keuangan
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	578.678.500	717.908.500	701.393.233
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	474.847.500	458.302.500	416.165.584
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.345.000	134.900.000	96.973.084
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	304.502.500	323.402.500	319.192.500
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.025.284.450	3.088.027.450	2.610.324.649
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.025.284.450	3.033.062.450	2.555.359.649
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.965.000	54.965.000	54.965.000
Peningkatan Pelayanan BLUD	4.629.254.906	6.653.076.090	6.239.028.554
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.629.254.906	6.653.076.090	6.239.028.554
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	158.509.800	483.276.200	470.209.918
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	48.786.800	90.889.800	83.850.158
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	48.786.800	90.889.800	83.850.158
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	109.723.000	392.386.400	386.359.760
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	109.723.000	-	-
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	392.386.400	392.386.400	386.359.760
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	669.617.000	645.022.000	637.936.022
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	563.347.000	537.402.000	530.316.022
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	358.315.000	339.715.000	335.804.022
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	205.032.000	197.687.000	194.512.000
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	106.270.000	107.620.000	107.620.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	106.270.000	107.620.000	107.620.000

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi Keuangan
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.678.263.250	5.168.892.500	4.919.037.850
Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.678.263.250	5.168.892.500	4.919.037.850
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.678.263.250	5.168.892.500	4.919.037.850
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	15.514.000	24.694.000	24.694.000
Penyimpanan Sementara Limbah B3	15.514.000	24.694.000	24.694.000
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	15.514.000	24.694.000	24.694.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	189.552.300	209.892.300	204.770.508
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	189.552.300	209.892.300	204.770.508
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	14.009.300	14.009.300	13.709.300
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	175.543.000	195.883.000	191.061.208
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	25.341.500	25.341.500	23.011.500
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	14.171.500	14.171.500	13.401.500
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	14.171.500	14.171.500	13.401.500
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	11.170.000	11.170.000	9.610.000

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi Keuangan
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	11.170.000	11.170.000	9.610.000
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	68.403.700	74.603.700	72.253.700
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68.403.700	74.603.700	72.253.700
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	40.905.000	42.405.000	40.205.000
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	27.498.700	32.198.700	32.048.700
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	17.322.100	17.322.100	13.721.300
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	17.322.100	17.322.100	13.721.300
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	17.322.100	17.322.100	13.721.300
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.515.199.160	14.639.216.160	13.815.703.993
Pengelolaan Sampah	10.515.199.160	14.639.216.160	13.815.703.993
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	8.226.450.760	8.596.550.760	8.292.663.209
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	121.833.000	173.327.000	159.511.214
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.166.915.400	5.869.338.400	5.363.529.570
	30.185.301.172	38.611.938.336	36.473.056.490

B.2. PENDAPATAN

Realisasi pungutan atau penerimaan asli daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023 adalah sebesar Rp. 7.138.360.642 (berasal dari Retribusi Sampah dan Laboratorium Lingkungan). Berikut uraian target dan realisasi penerimaan DLH Tahun Anggaran 2023 :

Tabel 3.32. Realisasi Penerimaan Daerah pada DLH Kab. Tanah Bumbu 2023

NO	URAIAN	TARGET Setelah Perubahan (Rp.)	CAPAIAN (Rp.)	% CAPAIAN Setelah Perubahan
1	RETRIBUSI SAMPAH	1.500.000.000	1.181.656.500	78,77%
2	RETRIBUSI LABORATORIUM	6.250.000.000	5.956.704.142	95,31%
	TOTAL	7.750.000.000	7.138.360.642	92,11%

Sumber : Bendahara Penerima DLH Kabupaten Tanah Bumbu

Perbandingan target dan realisasi pendapatan untuk tahun 2022 – 2023 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.33 Perbandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2022- 2023

No.	Jenis Penerimaan	Target (Rp.)		Realisasi (Rp.)		Persentase (%)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Retribusi Sampah	1.286.994.000	1.500.000.000	1.129.223.500	1.181.656.500	87,74	78,77%
2	Retribusi Laboratorium	4.370.745.094	6.250.000.000	4.739.441.709	5.956.704.142	108,44	95,31%
	JUMLAH	5.657.739.094	7.750.000.000	5.868.665.209	7.138.360.642	103,73	92,11%

- a. Dari sektor Retribusi Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Tanah Bumbu yang sudah terakreditasi dimana pelaksanaannya berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Bumbu No.03 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, pada tabel dapat dilihat realisasi tahun 2022 melebihi target sedangkan di tahun 2023 tidak memenuhi target. Hal ini dikarenakan target di tahun 2023 dinaikkan menjadi Rp. 6.250.000.000. UPT Laboratorium LH Kab. Tanah Bumbu merupakan Laboratorium Lingkungan Hidup dengan parameter terbanyak yang terakreditasi di Kalimantan sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor utama peningkatan jumlah pengujian sampel air dari berbagai kegiatan baik itu oleh pelaku usaha, masyarakat umum dan instansi dari Kab. Tanah Bumbu ataupun luar Kabupaten Tanah Bumbu.
- b. Cakupan pelayanan pengambilan retribusi sampah di tahun 2023 meliputi 9 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Batulicin, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Kuranji,

Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Angsana, Kecamatan Satui, dan Kecamatan Kusan Tengah dan cakupan pelayanan bertambah seluas 8,16 km² sehingga total cakupan pelayanan seluas 1.155,40 km².

Hal hal yang akan dilaksanakan di tahun 2024 untuk peningkatan pengelolaan sampah antara lain :

1. Melakukan Kerjasama dengan PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk sebagai Penyedia Bahan Bakar Alternatif dari Hasil Pengelolaan Sampah
2. Implementasi Program ADIPURA Lokal Tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan dengan Goal terwujudnya lingkungan yang lebih bersih asri sebagai perwujudan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai SERAMBI MADINAH
3. Mensosialisasikan Kembali secara massif instruksi bupati dan surat edaran sebagai bentuk implementasi dari Perda No 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah terkait tertib jam buang dan tempat pembuangan sampah khususnya area pertokoan dan perkantoran sehingga diharapkan masyarakat membuang sampah antara jam 18.00 wita s.d. jam 05.00 Wita
4. Mendorong pembentukan minimal 1 kelompok pengelola persampahan di Tiap Desa/Kelurahan

BAB IV PENUTUP

LAPORAN KINERJA (LKj) DLH KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2023

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran Renstra DLH 2021 – 2026 ada 3 Kinerja Utama dengan 6 Indikator Kinerja Utama. Pada Tahun 2023 capaiannya adalah sebagai berikut :

	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja	Kategori	Nilai Means
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	56,11	58,15	103,64	Sangat Berhasil	95,5
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,48	96,17	105,12	Sangat Berhasil	95,5
		Pemenuhan Data Dukung Pengendalian Emisi GRK	100	100	100	Sangat Berhasil	95,5
2	Meningkatnya Pengelolaan Lahan Sesuai Kewenangan	Peningkatan Pengelolaan Lahan Sesuai Kewenangan	77,27	100	129,41	Sangat Berhasil	95,5
3	Meningkatnya Upaya Penanganan Dan Pengurangan Sampah	Persentase Volume Sampah Terangkut	72%	76,59%	106,37%	Sangat Berhasil	95,5
		Persentase Volume Sampah Yang Direduksi	27%	17,05%	63,15%	Cukup Berhasil	70,5

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama (Sangat Berhasil)} = (5 \times 95,5)/6 = 79,58$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama (Cukup Berhasil)} = (1 \times 70,5)/6 = 11,75$$

$$\text{Total rata-rata capaian Kinerja Utama} = 91,33$$

Secara keseluruhan, capaian kinerja utama Eselon II berada pada kategori SANGAT BAIK/SANGAT BERHASIL

Adapun outcome program – program yang mendukung sasaran ini, juga dapat terealisasi sesuai rencana yaitu :

1. **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**, Indikator outcome program ini adalah Persentase Pemenuhan Data Dokumen Perencanaan LH diperoleh dari perhitungan data Lingkungan Hidup yang terpenuhi dibandingkan total kebutuhan data. Pada program ini ada beberapa penyusunan dokumen perencanaan antara lain IKPLHD, IKLH serta KLHS RPJPD. Dari target 85%, realisasi 96,72% dengan realisasi capaian indikator program sebesar 113,79%.
2. **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH**, Indikator outcome program ini adalah Persentase pemenuhan parameter kualitas Lingkungan diperoleh dari perhitungan Parameter Yang memenuhi baku mutu IKLH dibandingkan total parameter IKLH yang diuji.
Target tahun 2023 adalah 86,67% parameter kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu untuk pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada kondisi BAIK. Pencapaian indicator kinerja utama untuk periode tahun 2023 adalah sebesar 91,67 % dengan realisasi capaian indicator kinerja program sebesar 105,77%.
3. **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**, dengan indikator persentase pengelolaan keanekaragaman hayati diperoleh dari perhitungan Jumlah Kehati yang dikelola dibandingkan total jumlah KEHATI yang ada sesuai dengan kewenangan Lingkungan Hidup. Target 2023 adalah sebesar 77,27 % sudah terealisasi 100 atau dengan capaian 129,41 %
4. **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**
Indikator outcome program ini adalah Persentase pelaku usaha yang memenuhi ijin Pengelolaan Limbah Bahan Beracun (B3) diperoleh dari perhitungan Jumlah Pelaku Usaha Yang Memenuhi Ijin Pengelolaan LB3 dibandingkan dengan Total Pelaku Usaha Yang Menjadi Target Pengawasan.
Target 2023 adalah sebesar 61,67% pelaku usaha dan atau kegiatan yang memenuhi izin pengelolaan LB3 berupa rekomendasi izin penyimpanan sementara limbah B3. Adapun realisasi tahun 2023 sebesar 46,98% yaitu sebanyak 101 pelaku usaha yang memenuhi izin pengelolaan LB3 dibanding

target 215 pelaku usaha yang diawasi dengan realisasi capaian indicator kinerja program sebesar 83,93%.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH),

Indicator outcome program ini adalah Prosentase Pelaku Usaha yang taat dalam pengelolaan LH.

Target 2023 adalah sebesar 100% dengan formulasi adalah jumlah pelaku usaha yang dikategorikan taat dalam pengelolaan LH sesuai aturan yang berlaku dibandingkan dari total pelaku usaha yang dilakukan pengawasan dalam 1 tahun. Capaian tahun 2023 adalah sebesar 96,15%, yaitu sebanyak 125 pelaku usaha yang dikategorikan taat dibandingkan dari 130 pelaku usaha yang diawasi dengan realisasi capaian indicator kinerja program sebesar 96,15%.

6. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH,

Indicator outcome program ini adalah Prosentase Jumlah MHA yang diakui.

Target tahun 2023 adalah 100%, dengan formulasi Jumlah MHA yang diakui / total jumlah lembaga MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA yang teridentifikasi.

Target 2023 adalah sebanyak 1 (satu) Balai Adat yang diakui sebagai MHA dengan SK Penetapan Bupati/Perda. Capaian tahun 2023 adalah sebesar 100% yaitu sudah ditandatangani SK Bupati tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan MHA Timanggung Anggut sehingga terealisasi 1 buah SK Bupati tentang MHA. Realisasi capaian indicator kinerja program sebesar 100 %

7. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT,

Indicator outcome program ini adalah Persentase masyarakat yang aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup diperoleh dengan perhitungan jumlah pelaku yang aktif (sekolah+kelompok/desa+PSM pengelolaan sampah) dibandingkan total jumlah pelaku yang dibina yang telah mengikuti diklat.

Melalui keikutsertaan dalam lomba yang didalamnya juga terdapat kriteria penilaian bidang Lingkungan hidup maupun penerapannya dalam keseharian.

Target tahun 2023 adalah sebesar 80% dengan formulasi jumlah masarakat yang aktif (sekolah+kelompok/desa+PSM pengelolaan sampah) / total jumlah

masyarakat yang dibina yang telah mengikuti diklat. Realisasi tahun 2023 adalah sebesar 100% yaitu ada sebanyak 25 pelaku yang tercatat aktif dalam pengelolaan LH dibandingkan dari 25 pelaku di masyarakat yang telah mengikuti diklat/pelathan bidang lingkungan hidup. Realisasi capaian indicator kinerja program sebesar 125 %

8. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP,

Indicator outcome program ini adalah persentase penyelesaian pengaduan LH tahun berjalan diperoleh dari perhitungan jumlah pengaduan yang selesai ditangani dibandingkan total jumlah pengaduan yang ditangani.

Target Indikator tersebut adalah 100% di tahun 2023. Prosentase tersebut dihitung dari jumlah pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan DLH setiap tahunnya serta dalam status selesai dengan keluarnya rekomendasi penyelesaian yang diinformasikan kepada pihak pengadu dan yang subyek sumber aduan. Realisasi tahun 2023 ada 10 aduan. Capaiannya terhadap total jumlah aduan yang masuk sebesar 100%.

9. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN,

Indicator outcome program ini adalah Persentase Area Layanan Persampahan dengan perhitungan Luas Area Terlayani dibandingkan Total Luas Area Pemukiman.

Pada Tahun 2023 target sebesar 85,80 % atau seluas 1.244,74 Km² dari total target program luas wilayah perkotaan, pemukiman dan ibukota kecamatan seluas 1.451,22 Km², dan realisasi cakupan area pelayanan persampahan yang ditargetkan adalah seluas 1.155,4 Km² (1.147,24 Km² dan ditambah luasan perluasan layanan di tahun 2023 seluas 8,16 Km²) atau dengan angka persentase sebesar 79,62%. Prosentase capaian sebesar 92,79%.

18 (delapan belas) kegiatan penunjang dari program tersebut terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan dalam pelaksanaannya untuk pencapaian indikator. Dapat disimpulkan secara keseluruhan tingkat pencapaian target 3 (tiga) Kinerja Utama dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama pada kategori Sangat Berhasil.

B. Saran

Permasalahan Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan sampah
2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah
3. Minimnya pohon peneduh di kiri dan kanan jalan
4. Rendahnya luasan tutupan lahan dan masih banyaknya lahan kritis dan sangat kritis
5. Belum tepat sasaran kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau CSR Perusahaan
6. Kurangnya minat & semangat desa maupun sekolah dalam upaya penurunan emisi GRK
7. Belum optimalnya penyampaian pelaporan kelola pantau lingkungan hidup oleh pelaku usaha
8. Terkait layanan UPTD Laboratorium :
 - Kurangnya sarana dan prasarana
 - Belum tersedianya mobil lapangan laboratorium

Rencana Aksi untuk meningkatkan pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan adalah sebagai berikut:

Persampahan

1. MoU dengan PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk terkait Bahan Bakar Alternatif Dari Hasil Pengelolaan Sampah Domestik serta penambahan 3 Unit Truck, 4 Mesin Press untuk menunjang kerjasama
2. ADIPURA Lokal Tingkat Kecamatan/Desa/ Kelurahan (MADINAH BERSERI)
3. Pembangunan 6 Unit TPS3R di Tahun 2023 dan 4 Unit TPS3R di Tahun 2024
4. Penambahan 9 Kontainer Sampah untuk meningkatkan pelayanan sampah serta Penambahan 1 Unit Excavator untuk Optimalisasi TPA
5. Mensosialisasikan Kembali Secara Massif Terkait Tertib Jam Buang Dan Tempat Pembuangan Sampah
6. Mendorong Pembentukan Minimal 1 Kelompok Pengelola Persampahan Di Tiap Desa/Kelurahan
7. Penyusunan PERDA Terkait Penebangan Pohon
8. Peningkatan Optimalisasi Penampungan Sampah

Tutupan Lahan dan Lahan Kritis

1. Penghijauan Dan Penanaman Kanan Kiri Jalan Sebagai Kabupaten Penyangga Menuju Ibukota Negara (IKN)
2. Melibatkan Perusahaan Pemegang IPPKH Dalam Kegiatan Penghijauan Dan Penanaman Kanan Kiri Jalan Sebagai Kabupaten Penyangga Ibukota Negara (IKN)
3. Kerjasama Dengan KPH Kusan Terkait Penyediaan Bibit Dalam Rehabilitasi Lahan Sangat Kritis Di Lahan Akses Terbuka
4. Perjalanan Dinas Dalam Kota, Personil DLH Melakukan Penanaman Bibit Di Lokasi Kegiatan
5. Melaksanakan Inventarisasi, Identifikasi, Dan Pengelolaan RTH

Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan CSR

1. Mensinergikan Data Kemiskinan Dengan Sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Atau CSR Perusahaan
2. Mensinergikan PPM/CSR Perusahaan PROKLIM, ADIWIYATA Dan Peningkatan Luasan Tutupan Vegetasi

Gas Rumah Kaca (GRK)

1. Menghimbau pelaku usaha, masyarakat dan instansi untuk mengurangi emisi GRK

Pelaporan RKL-RPL

1. Melakukan Sosialisasi kewajiban pelaporan RKL-RPL berdasarkan sektor usaha

PROGRAM UNGGULAN DINAS KABUPATEN TANAH BUMBU

1. **MADINAH BERSERI** (Masyarakat Peduli Keindahan Berseri)

Kegiatan ini sebagai sarana sosialisasi dan pembinaan ke Desa/Kecamatan tentang bagaimana prinsip pengelolaan sampah sederhana dan Upaya penghijauan agar ada peningkatan terhadap pemenuhan akan indikator tersebut dan tercipta budaya kebersihan yang menyeluruh hingga pada akhirnya Kabupaten Tanah Bumbu menjadi lebih bersih dan hijau.

Indikator penilaian Adipura Lokal ini murni diadopsi dari kriteria yang ada di penilaian Adipura Tingkat Nasional yang disesuaikan levelnya pada Tingkat Kabupaten.

2. SAMBAR (Sampah Bahan Bakar Alternative)

Merupakan Kerjasama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu dengan PT. Indocement Tunggul Prakarsa (PT. ITP) dalam hal penanganan sampah sehingga bernilai finansial dan bermanfaat. Kerjasama ini sebagai uji coba penyediaan bahan bakar alternatif pengganti batubara dari hasil pengolahan sampah domestic yang nantinya akan menjadi peluang finansial bernilai ekonomis, serta akan menjadi peluang usaha baru bagi daerah.

Selain itu untuk pengelolaan sampah yang lebih optimal di Kabupaten Tanah Bumbu khususnya dengan mengurangi sampah yang masuk ke dalam sel aktif sehingga umur TPA akan lebih Panjang.

3. Penghijauan kanan kiri jalan

Penghijauan kanan kiri jalan masuk di kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) untuk meningkatkan luasan area hijau yang akhirnya akan meningkatkan nilai indeks kualitas lahan (IKL) Kabupaten Tanah Bumbu selaku Kabupaten Penyangga Ibukota Negara Baru Nusantara (IKN). Kegiatan penghijauan kanan kiri jalan di akses jalan menuju IKN ini melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan melalui KPH Kusan.



Rahmat Prpto Udoyo, S.Hut., M.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730228 199212 1 004

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA (LKj) DLH KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jalan Dharma Praja Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin
Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos : 72214

Website : <https://dlh.tanahbumbukab.go.id> ,Email : blhd.tanbu@gmail.com

**PENETAPAN KINERJA DAERAH ATAS RPJMD 2021-2026
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kinerja		Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Awal Periode RPJMD (2021)	Target Kinerja						Kondisi Akhir RPJMD (2026)
				Kondisi Awal (2021)	Kondisi Akhir (2026)				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	0.162 - 0.188	0.291 - 0.319	Meningkatnya kualitas air dan udara	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	0.162 - 0.188	0.162 - 0.188	0.189 - 0.210	0.211 - 0.257	0.258 - 0.262	0.263 - 0.290	0.291 - 0.319	0.291 - 0.319
			Indeks	59,00-61,00	62,35-62,65		Indeks Kualitas Air (IKA)	59,00-61,00	59,00-61,00	61,01-61,33	61,34-61,66	61,67-61,99	62,00-62,34	62,35-62,65	62,35-62,65
			Indeks	94.30 - 95.06	96.99 - 97.15		Indeks Kualitas Udara (IKU)	94.30 - 95.06	94.30 - 95.06	95.07 - 95.23	95.24 - 96.02	96.03 - 96.19	96.20 - 96.98	96.99 - 97.15	96.99 - 97.15
			Indeks	57.15 - 59.65	64.80 - 64.86	Meningkatnya Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	57.15 - 59.65	57.15 - 59.65	59.66 - 59.70	59.71 - 62.19	62.20 - 62.26	62.27 - 64.79	64.80 - 64.86	64.80 - 64.86
2	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Infrastruktur yang mantap	%	70.00 - 74.00	96.00 - 98.00	Meningkatnya kualitas air minum dan sanitasi	Cakupan akses sanitasi layak	70.00 - 74.00	70.00 - 74.00	74.01 - 80.00	80.01 - 86.00	86.01 - 92.00	92.01 - 95.99	96.00 - 98.00	96.00 - 98.00

Batulicin, 02 Januari 2023

Kepala Dinas

Rahmat Prpto Udoyo, S.Hut, MP
NIP. 19730228 199212 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jalan Dharma Praja Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Baiulicin
Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos : 72214

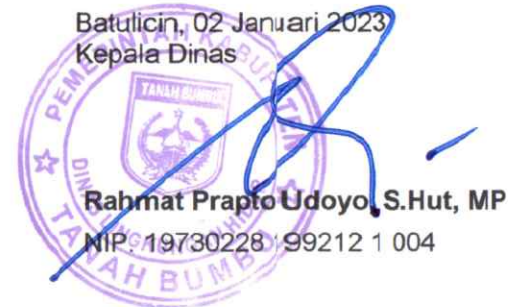
Website : <https://dlh.tanahbumbukab.go.id> ,Email : blhd.tanbu@gmail.com

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kinerja		Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Awal Periode RENSTRA (2021)	Target Kinerja						Kondisi Akhir RENSTRA (2026)
				Kondisi Awal (2021)	Kondisi Akhir (2026)				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	Cukup (55)	Kurang (57,81)	Meningkatnya Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Kurang (55)	Kurang (55)	Kurang (55,55)	Kurang (56,11)	Kurang (56,67)	Kurang (57,23)	Kurang (57,81)	Kurang (57,81)
				Sangat baik (91,27)	Sangat baik (91,79)		2. Indeks Kualitas Udara	Sangat baik (91,27)	Sangat baik (91,38)	Sangat baik (91,48)	Sangat baik (91,59)	Sangat baik (91,69)	Sangat baik (91,79)	Sangat baik (91,79)	
				100	100		3. Pemenuhan data dukung pengendalian emisi GRK	100	100	100	100	100	100	100	
2	Meningkatkan pengendalian kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)		0	95.45	Meningkatnya Pengelolaan Lahan Sesuai Kewenangan	4. Peningkatan pengelolaan Lahan sesuai kewenangan	0	0	72.73	77.27	81.82	95.45	95.45	95.45
3	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan		74	70	Meningkatnya Upaya Penanganan dan Pengurangan Sampah	5. Persentase Volume sampah terangkut	74	74	73	72	71	70	70	70
				24	30		6. Persentase volume sampah yang direduksi	24	24	26	27	28	30	30	30

Batulicin, 02 Januari 2023

Kepala Dinas



Rahmat Prpto Udoyo, S.Hut, MP

NIP. 19730228 199212 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jalan Dharma Praja Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin

Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos : 72214

Website : <https://dlh.tanahbumbukab.go.id> ,Email : blhd.tanbu@gmail.com

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kinerja		Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Awal Periode RENSTRA (2021)	Target Kinerja						Kondisi Akhir RENSTRA (2026)
				Kondisi Awal (2021)	Kondisi Akhir (2026)				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	Cukup (55)	Kurang (57,81)	Meningkatnya Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Kurang (55)	Kurang (55)	Kurang (55,55)	Kurang (56,11)	Kurang (56,67)	Kurang (57,23)	Kurang (57,81)	Kurang (57,81)
				Sangat baik (91,27)	Sangat baik (91,79)		2. Indeks Kualitas Udara	Sangat baik (91,27)	Sangat baik (91,27)	Sangat baik (91,38)	Sangat baik (91,48)	Sangat baik (91,59)	Sangat baik (91,69)	Sangat baik (91,79)	Sangat baik (91,79)
				100	100		3. Pemenuhan data dukung pengendalian emisi GRK	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan pengendalian kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)		0	95.45	Meningkatnya Pengelolaan Lahan Sesuai Kewenangan	4. Peningkatan pengelolaan Lahan sesuai kewenangan	0	0	72.73	77.27	81.82	95.45	95.45	95.45
3	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan		74	70	Meningkatnya Upaya Penanganan dan Pengurangan Sampah	5. Persentase Volume sampah terangkut	74	74	73	72	71	70	70	70
				24	30		6. Persentase volume sampah yang direduksi	24	24	26	27	28	30	30	30

Batulicin, 02 Januari 2024

Kepala Dinas,



Harhat Prpto Udoyo, S.Hut., M.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730228 199212 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jalan Dharma Praja Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin
Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos : 72214
Website : <https://dlh.tanahbumbukab.go.id> ,Email : blhd.tanbu@gmail.com

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kinerja		Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Awal Periode RENSTRA (2021)	Target Kinerja						Kondisi Akhir RENSTRA (2026)
				Kondisi Awal (2021)	Kondisi Akhir (2026)				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	Cukup (55)	Kurang (57,81)	Meningkatnya Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Kurang (55)	Kurang (55)	Kurang (55,55)	Kurang (56,11)	Kurang (56,67)	Kurang (57,23)	Kurang (57,81)	Kurang (57,81)
				Sangat baik (91,27)	Sangat baik (91,79)		2. Indeks Kualitas Udara	Sangat baik (91,27)	Sangat baik (91,27)	Sangat baik (91,38)	Sangat baik (91,48)	Sangat baik (91,59)	Sangat baik (91,69)	Sangat baik (91,79)	Sangat baik (91,79)
				100	100		3. Pemenuhan data dukung pengendalian emisi GRK	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan pengendalian kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)		0	95.45	Meningkatnya Pengelolaan Lahan Sesuai Kewenangan	4. Peningkatan pengelolaan Lahan sesuai kewenangan	0	0	72.73	77.27	81.82	95.45	95.45	95.45
3	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan		74	70	Meningkatnya Upaya Penanganan dan Pengurangan Sampah	5. Persentase Volume sampah terangkut	74	74	73	72	71	70	70	70
				24	30		6. Persentase volume sampah yang direduksi	24	24	26	27	28	30	30	30

Batulicin, 02 Januari 2024
Kepala Dinas



Rahmat Prapio Udoyo, S.Hut, MP
NIP. 19730228 199212 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jalan Dharma Praja Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Balulicin
Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos : 72214

Website : <https://dlh.tanahbumbukab.go.id> ,Email : blhd.tanbu@gmail.com

**PENETAPAN KINERJA DAERAH ATAS RPJMD 2021-2026
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kinerja		Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Awal Periode RPJMD (2021)	Target Kinerja						Kondisi Akhir RPJMD (2026)
				Kondisi Awal (2021)	Kondisi Akhir (2026)				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	0.162 - 0.188	0.291 - 0.319	Meningkatnya kualitas air dan udara	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	0.162 - 0.188	0.162 - 0.188	0.189 - 0.210	0,211 - 0,257	0,258 - 0,262	0,263 - 0,290	0,291 - 0,319	0,291 - 0,319
			Indeks	59,00-61,00	62,35-62,65		Indeks Kualitas Air (IKA)	59,00-61,00	59,00-61,00	61,01-61,33	61,34-61,66	61,67-61,99	62,00-62,34	62,35-62,65	62,35-62,65
			Indeks	94.30 - 95.06	96.99 - 97.15		Indeks Kualitas Udara (IKU)	94.30 - 95.06	94.30 - 95.06	95.07 - 95.23	95.24 - 96.02	96.03 - 96.19	96.20 - 96.98	96.99 - 97.15	96.99 - 97.15
			Indeks	57.15 - 59.65	64.80 - 64.86	Meningkatnya Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	57.15 - 59.65	57.15 - 59.65	59.66 - 59.70	59.71 - 62.19	62.20 - 62.26	62.27 - 64.79	64.80 - 64.86	64.80 - 64.86
2	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Infrastruktur yang mantap	%	70.00 - 74.00	96.00 - 98.00	Meningkatnya kualitas air minum dan sanitasi	Cakupan akses sanitasi layak	70.00 - 74.00	70.00 - 74.00	74.01 - 80.00	80.01 - 86.00	86.01 - 92.00	92.01 - 95.99	96.00 - 98.00	96.00 - 98.00

Batulicin, 02 Januari 2024

Kepala Dinas



Rahmat Prapto Udoyo, S.Hut, MP
NIP. 197302281992121004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jalan Dharma Praja Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin
Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos : 72214

Website : <https://dlh.tanahbumbukab.go.id> ,Email : blhd.tanbu@gmail.com

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	FORMULASI / PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Pengendalian Kualitas Lingkungan	Meningkatnya Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Sangat Kurang (56,11)	<ul style="list-style-type: none">- Indeks Kualitas Air adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Perhitungan IKA didasari dari pembobotan status mutu kualitas air pada setiap titik pantau selama 2 (dua) periode pemantauan dalam 1 (satu) tahun- Parameter yang dijadikan dasar perhitungan IKA sebanyak 8 parameter yaitu pH, TSS, BOD, COD, DO, NH₃, Totak Posfat dan Total Coliform- Baku mutu yang digunakan mengacu Sungai Kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup- Metode perhitungan mengalami perubahan dari metode manual menggunakan aloritmexcel menjadi perhitungan online melalui website https://pkpl.menlhk.go.id dengan aloritmexcel terbaru	<ul style="list-style-type: none">- Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup- Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup- Bidang Tata Lingkungan- UPTD. Laboratorium Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	FORMULASI / PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Indeks Kualitas Udara	Sangat Baik (91,48)	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kualitas Air adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. - Perhitungan IKU didasari dari pembobotan kandungan NO₂ dan SO₂ pada setiap titik pantau selama 2 (dua) periode pemantauan dengan metode passive sampler dalam 1 (satu) tahun. - Pada tahun 2021 metode perhitungan Indeks Kualitas Udar (IKU) mengalami perubahan metode perhitungan mengalami perubahan dari metode manual menggunakan alogaritmas excel menjadi perhitungan secara online melalui website https://ppkl.menlhk.go.id dengan alogaritma terbaru - Lokasi/titik pengambilan contoh mewakili aktivitas: kawasan transportasi, kawasan pemukiman dan Kawasan perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup - Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup - Bidang Tata Lingkungan - UPTD. Laboratorium Lingkungan 	Dinas Lingkungan Hidup
			3. Pemenuhan data dukung pengendalian emisi GRK	100 %	<ul style="list-style-type: none"> - GRK adalah gas-gas di atmosfer yang menyelimuti lapisan atmosfer, sehingga dianalogikan bahwa bumi kita dikelilingi oleh gelas kaca. Oleh karena itu gas-gas tersebut disebut "gas rumah kaca". Gas rumah kaca berfungsi menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra-merah dan ikut menentukan suhu atmosfer. - Inventarisir GRK dilakukan dengan memproyeksikan kondisi <i>business as usual</i> (BAU), yaitu kondisi di mana tidak terdapat aksi mitigasi selain aksi mitigasi yang telah berjalan sebelumnya. Skenario kedua adalah scenario pengembangan yang dipilih untuk menurunkan emisi GRK pada setiap sektor dan sub sektor terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> - OPD - Dinas LH Kabupaten Tanah Bumbu - Badan Usaha. 	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	FORMULASI / PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Meningkatkan pengendalian kualitas Lahan	Meningkatnya pengelolaan lahan sesuai kewenangan	Peningkatan pengelolaan Lahan sesuai kewenangan	77,27 %	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Perhitungan IKL didasari dari lokasi pemantauan kualitas tutupan lahan meliputi kawasan hutan dan areal penggunaan lain. Tutupan Lahan meliputi luasan tutupan hutan dan luasan tutupan vegetasi non hutan. - Metode perhitungan Indeks Kualitas Lahan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rentang waktu 1 (satu) tahun sebelum tahun penghitungan. - Penginputan data tutupan lahan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui website https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/dashbord terkait data wilayah tutupan hutan, wilayah tutupan belukar dan belukar/rawa di kawasan hutan, wilayah tutupan belukar dan belukar/rawa pada kemiringan lereng dengan kelas lebih besar sama dengan 25% (dua puluh lima persen) yang berada di sempadan perairan pada areal penggunaan lain. Sedangkan terkait data ruang terbuka hijau, Tutupan Lahan dari kegiatan rehabilitasi di kawasan hutan, dan tutupan lahan di areal penggunaan lain dilaksanakan masing-masing daerah. 	- Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
3	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Upaya penanganan dan Pengurang	4. Persentase Volume sampah terangkut	72	Perhitungan Volume sampah terangkut dihitung dari $\frac{\sum \text{Volume sampah yang dapat ditangani (m}^3\text{)}}{\sum \text{Volume timbunan sampah kabupaten/kota (m}^3\text{)}} \times 100 \%$	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 - UPTD Pengelolaan Persampahan 	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	FORMULASI / PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
			5. Persentase volume sampah yang direduksi	27 %	Perhitungan persentase volume sampah yang direduksi dihitung dari $\frac{\Sigma \text{Volume Sampah yang direduksi (TPS/TPST/3R)}}{\Sigma \text{Volume Sampah yang harusnya direduksi (TPS/TPST/3R)}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 - UPTD Pengelolaan Persampahan 	Dinas Lingkungan Hidup

Batulicin, 02 Januari 2023

Mengetahui
Kepala Dinas



Bahmat Prapto Udoyo, S.Hut, MP
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19730228 199212 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jalan Dharma Praja Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin
Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos : 72214

Website : <https://dlh.tanahbumbukab.go.id> ,Email : blhd.tanbu@gmail.com

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	FORMULASI / PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Pengendalian Kualitas Lingkungan	Meningkatnya Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Sangat Kurang (56,67)	<ul style="list-style-type: none">- Indeks Kualitas Air adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Perhitungan IKA didasari dari pembobotan status mutu kualitas air pada setiap titik pantau selama 2 (dua) periode pemantauan dalam 1 (satu) tahun- Parameter yang dijadikan dasar perhitungan IKA sebanyak 8 parameter yaitu pH, TSS, BOD, COD, DO, NH₃, Totak Posfat dan Total Coliform- Baku mutu yang digunakan mengacu Sungai Kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup- Metode perhitungan mengalami perubahan dari metode manual menggunakan aloritmexcel menjadi perhitungan online melalui website https://ppkl.menlhk.go.id dengan aloritmexcel terbaru	<ul style="list-style-type: none">- Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup- Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup- Bidang Tata Lingkungan- UPTD. Laboratorium Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	FORMULASI / PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Indeks Kualitas Udara	Sangat Baik (91,59)	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kualitas Air adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. - Perhitungan IKU didasari dari pembobotan kandungan NO₂ dan SO₂ pada setiap titik pantau selama 2 (dua) periode pemantauan dengan metode passive sampler dalam 1 (satu) tahun. - Pada tahun 2021 metode perhitungan Indeks Kualitas Udar (IKU) mengalami perubahan metode perhitungan mengalami perubahan dari metode manual menggunakan algoritmas excel menjadi perhitungan secara online melalui website https://ppkl.menlhk.go.id dengan algoritma terbaru - Lokasi/titik pengambilan contoh mewakili aktivitas: kawasan transportasi, kawasan pemukiman dan Kawasan perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup - Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup - Bidang Tata Lingkungan - UPTD. Laboratorium Lingkungan 	Dinas Lingkungan Hidup
			3. Pemenuhan data dukung pengendalian emisi GRK	100 %	<ul style="list-style-type: none"> - GRK adalah gas-gas di atmosfer yang menyelubungi lapisan atmosfer, sehingga dianalogikan bahwa bumi kita dikelilingi oleh gelas kaca. Oleh karena itu gas-gas tersebut disebut "gas rumah kaca". Gas rumah kaca berfungsi menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra-merah dan ikut menentukan suhu atmosfer. - Inventarisir GRK dilakukan dengan memproyeksikan kondisi <i>business as usual</i> (BAU), yaitu kondisi di mana tidak terdapat aksi mitigasi selain aksi mitigasi yang telah berjalan sebelumnya. Skenario kedua adalah scenario pengembangan yang dipilih untuk menurunkan emisi GRK pada setiap sektor dan sub sektor terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> - OPD - Dinas LH Kabupaten Tanah Bumbu - Badan Usaha. 	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	FORMULASI / PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Meningkatkan pengendalian kualitas lahan	Meningkatnya pengelolaan lahan sesuai kewenangan	Peningkatan pengelolaan Lahan sesuai kewenangan	81,82 %	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Perhitungan IKL didasari dari lokasi pemantauan kualitas tutupan lahan meliputi kawasan hutan dan areal penggunaan lain. Tutupan Lahan meliputi luasan tutupan hutan dan luasan tutupan vegetasi non hutan. - Metode perhitungan Indeks Kualitas Lahan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rentang waktu 1 (satu) tahun sebelum tahun penghitungan. - Penginputan data tutupan lahan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui website https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/dashbord terkait data wilayah tutupan hutan, wilayah tutupan belukar dan belukar/rawa di kawasan hutan, wilayah tutupan belukar dan belukar/rawa pada kemiringan lereng dengan kelas lebih besar sama dengan 25% (dua puluh lima persen) yang berada di sempadan perairan pada areal penggunaan lain. Sedangkan terkait data ruang terbuka hijau, Tutupan Lahan dari kegiatan rehabilitasi di kawasan hutan, dan tutupan lahan di areal penggunaan lain dilaksanakan masing-masing daerah. 	- Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
3	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Upaya penanganan dan Pengurang	4. Persentase Volume sampah terangkut	71	Perhitungan Volume sampah terangkut dihitung dari $\frac{\sum \text{Volume sampah yang dapat ditangani (m}^3\text{)}}{\sum \text{Volume timbunan sampah kabupaten/kota (m}^3\text{)}} \times 100 \%$	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 - UPTD Pengelolaan Persampahan 	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	FORMULASI / PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
			5. Persentase volume sampah yang direduksi	28 %	Perhitungan persentase volume sampah yang direduksi dihitung dari $\frac{\Sigma \text{Volume Sampah yang direduksi (TPS/TPST/3R)}}{\Sigma \text{Volume Sampah yang harusnya direduksi (TPS/TPST/3R)}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 - UPTD Pengelolaan Persampahan 	Dinas Lingkungan Hidup

Batulicin, 02 Januari 2024

Mengetahui
Kepala Dinas,



Rahmat Ripto Udoyo, S.Hut, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19730228 199212 1 004

**LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2023**

SKPD/INSTANSI : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 FUNGSI : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 SUB FUNGSI : -
 KABUPATEN : TANAH BUMBU

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN		PERSENTASE
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	100	0	0,00%	14.847.578.362	2.590.537.794	17,45%
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (%)	100	25	25,00%	22.086.900	8.325.900	37,70%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun (Dokumen)	2	1	50,00%	8.600.400	4.275.900,00	49,72%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun (Laporan)	5	1	20,00%	13.486.500	4.050.000,00	30,03%
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselesaikan dengan baik (%)	100	25	25,00%	5.944.741.106	1.099.589.996	18,50%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Org/bulan)	44	44	100,00%	5.542.689.462	1.030.484.996,00	18,59%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	0	0,00%	402.051.644	69.105.000,00	17,19%
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	25	25,00%	751.363.500	122.687.012	16,33%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	5	1	20,00%	170.285.000	26.505.000,00	15,57%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan (Media)	2	1	50,00%	2.400.000	90.000,00	3,75%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)	203	81	39,90%	578.678.500	96.092.012,00	16,61%
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	25	0,25	474.847.500	64.052.330	13,49%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia (Laporan)	12	3	25,00%	170.345.000	23.942.330,00	14,06%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan (Laporan)	12	3	25,00%	304.502.500	40.110.000	13,17%

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN		PERSENTASE
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	25	25,00%	3.025.284.450	228.137.250	7,54%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	56	0	0,00%	3.025.284.450	228.137.250,00	7,54%
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD		Akreditasi Badan Layanan Usaha Daerah (Nilai)	236	0	0,00%	4.629.254.906	1.067.745.306	23,07%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jenis BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan (Unit Kerja)	1	0,00	0,00%	4.629.254.906	1.067.745.306,00	23,07%
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Persentase Pemenuhan data dok perencanaan LH (%)	85	0	0,00%	158.509.800	9.818.000	6,19%
Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Data Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (%)	100	0	0,00%	48.786.800	9.818.000	20,12%
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	0,00%	48.786.800	9.818.000	20,12%
Kegiatan: Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Data Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (%)	100	0	0,00%	109.723.000	0	0,00%
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	0	0,00%	109.723.000	0	0,00%
Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase pemenuhan parameter kualitas Lingkungan (%)	86,67	0	0,00%	669.617.000	37.460.000	5,59%
Kegiatan: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Data Kualitas Air, Udara dan Tanah (%)	67	0	0,00%	563.347.000	36.555.000	6,49%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut (Dokumen)	1	0	0,00%	358.315.000	32.955.000,00	9,20%
	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup Yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	0	0,00%	205.032.000	3.600.000,00	1,76%

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN		PERSENTASE
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Kegiatan: Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase lahan sangat kritis di sempadan sungai yang dipulihkan (%)	40	0	0,00%	106.270.000	905.000	0,85%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi (Dokumen)	1	0	0,00%	106.270.000	905.000,00	0,85%
Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)		Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (%)	77,27	17,37	22,48%	3.678.263.250	375.320.000	10,20%
Kegiatan: Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Jumlah Keaneekaragaman Hayati yang dikelola sesuai dengan kewenangan (lokasi)	18	18	100,00%	3.678.263.250	375.320.000	10,20%
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	100	15	15,00%	3.678.263.250	375.320.000,00	10,20%
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Persentase pelaku usaha yang memenuhi ijin Pengelolaan Limbah Bahan Beracun (%)	61,67	39,90	64,70%	15.514.000	1.714.000	11,05%
Kegiatan: Penyimpanan Sementara Limbah B3		Persentase Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 (LB3) yang disediakan oleh Pelaku Usaha (%)	100	39,90	39,90%	15.514.000	1.714.000	11,05%
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara LB3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan)	1	0	0,00%	15.514.000	1.714.000,00	11,05%
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Persentase pelaku usaha yang taat pengelolaan LH (%)	100	38,46	38,46%	189.552.300	29.889.000	15,77%
Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pelaksanaan Pengawasan terhadap ijin lingkungan (%)	100	0	0,00%	189.552.300	29.889.000	15,77%
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	1	0	0,00%	14.009.300	1.350.000,00	9,64%
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	0	0,00%	175.543.000	28.539.000,00	16,26%
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Persentase jumlah MHA yang diakui (%)	100	0	0,00%	25.341.500	2.926.500	11,55%

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN		PERSENTASE
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Kegiatan: Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah Pengakuan Lembaga MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang di akui (lokasi)	1	0	0,00%	14.171.500	2.926.500	20,65%
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA KearifanLokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Usulan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA KearifanLokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH (Dokumen)	1	0	0,00%	14.171.500	2.926.500,00	20,65%
Kegiatan : Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH		Persentase Peningkatan kapasitas MHA dan Kearifan lokal, Pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (%)	50	0	0,00%	11.170.000	0	0,00%
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	1	0	0,00%	11.170.000	0	0,00%
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		Persentase pelaku yang aktif dalam pengelolaan LH (%)	80	8	10,00%	68.403.700	12.728.700	18,61%
Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/ Kota		Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi bidang Lingkungan Hidup (%)	33,33	72	216,02%	68.403.700	12.728.700	18,61%
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok masyarakat/Institusi yang terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH (Lembaga)	35	5	14,29%	40.905.000	7.680.000,00	18,78%
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	1	0	0,00%	27.498.700	5.048.700,00	18,36%
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Persentase penyelesaian pengaduan LH tahun berjalan (%)	100	20	20,00%	17.322.100	2.742.100	15,83%
Kegiatan: Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	100	20	20,00%	17.322.100	2.742.100	15,83%
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani (Dokumen)	1	0	0,00%	17.322.100	2.742.100,00	15,83%

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN		PERSENTASE
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Program Pengelolaan Persampahan		Persentase Area Pelayanan Persampahan (%)	85,80	0	0,00%	10.515.199.160	1.783.562.809	16,96%
Kegiatan: Pengelolaan Sampah		Persentase sampah yang dikelola (%)	99	34,10	34,44%	10.515.199.160	1.783.562.809	16,96%
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA, TPST, SPA Kab/ Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Ton)	53416,77	11.282	21,12%	8.226.450.760	1.201.498.120,00	14,61%
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat (Kelompok)	6	1	16,67%	121.833.000	36.385.046,00	29,86%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2	1	50,00%	2.166.915.400	545.679.643,00	25,18%
TOTAL					30,92%	30.185.301.172	4.846.698.903	16,06%

Batulicin, 05 April 2023

Mengetahui

Kepala Dinas,



Prpto Uoyo, S.Hut., M.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730228 199212 1 004

**LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023**

SKPD/INSTANSI : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 FUNGSI : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 SUB FUNGSI : -
 KABUPATEN : TANAH BUMBU

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN		PERSENTASE
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	100	0	0.00%	14,847,578,362	7,119,976,755	47.95%
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (%)	100	50	50.00%	22,086,900	18,362,400	83.14%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun (Dokumen)	2	1	50.00%	8,600,400	7,275,900.00	84.60%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun (Laporan)	5	1	20.00%	13,486,500	11,086,500.00	82.20%
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik (%)	100	50	50.00%	5,944,741,106	3,115,824,774	52.41%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Org/bulan)	44	44	100.00%	5,542,689,462	2,915,453,474.00	52.60%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	0	0.00%	402,051,644	200,371,300.00	49.84%
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	50	50.00%	751,363,500	318,113,513	42.34%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	5	2	40.00%	170,285,000	90,575,000.00	53.19%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan (Media)	2	1	50.00%	2,400,000	450,000.00	18.75%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)	203	135	66.50%	578,678,500	227,088,513.00	39.24%

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN		PERSENTASE
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	50	50%	474,847,500	205,263,994	43.23%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia (Laporan)	12	6	50.00%	170,345,000	46,981,494.00	27.58%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan (Laporan)	12	6	50.00%	304,502,500	158,282,500	51.98%
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	50	50.00%	3,025,284,450	1,228,455,317	40.61%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	56	32	57.14%	3,025,284,450	1,228,455,317.00	40.61%
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD		Akreditasi Badan Layanan Usaha Daerah (Nilai)	236	0	0.00%	4,629,254,906	2,233,956,757	48.26%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jenis BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan (Unit Kerja)	1	0.00	0.00%	4,629,254,906	2,233,956,757.00	48.26%
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Persentase Pemenuhan data dok perencanaan LH (%)	85	0	0.00%	158,509,800	20,073,000	12.66%
Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Data Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (%)	100	0	0.00%	48,786,800	20,073,000	41.14%
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	0.00%	48,786,800	20,073,000	41.14%
Kegiatan: Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Data Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (%)	100	0	0.00%	109,723,000	0	0.00%
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	0	0.00%	109,723,000	0	0.00%

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN		PERSENTASE
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase pemenuhan parameter kualitas Lingkungan (%)	86.67	0	0.00%	669,617,000	151,135,394	22.57%
Kegiatan: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Data Kualitas Air, Udara dan Tanah (%)	67	0	0.00%	563,347,000	146,915,394	26.08%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut (Dokumen)	1	0	0.00%	358,315,000	126,295,394.00	35.25%
	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup Yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	0	0.00%	205,032,000	20,620,000.00	10.06%
Kegiatan: Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase lahan sangat kritis di sempadan sungai yang dipulihkan (%)	40	0	0.00%	106,270,000	4,220,000	3.97%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi (Dokumen)	1	0	0.00%	106,270,000	4,220,000.00	3.97%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (%)	77.27	74.25	96.09%	3,678,263,250	1,349,810,000	36.70%
Kegiatan: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Jumlah Keanekaragaman Hayati yang dikelola sesuai dengan kewenangan (lokasi)	18	18	100.00%	3,678,263,250	1,349,810,000	36.70%
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	100	61	61.00%	3,678,263,250	1,349,810,000.00	36.70%
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Persentase pelaku usaha yang memenuhi ijin Pengelolaan Limbah Bahan Beracun (%)	61.67	41.63	67.50%	15,514,000	3,814,000	24.58%
Kegiatan: Penyimpanan Sementara Limbah B3		Persentase Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 (LB3) yang disediakan oleh Pelaku Usaha (%)	100	41.63	41.63%	15,514,000	3,814,000	24.58%
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara LB3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan)	1	0	0.00%	15,514,000	3,814,000.00	24.58%

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN		PERSENTASE
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Persentase pelaku usaha yang taat pengelolaan LH (%)	100	51.54	51.54%	189,552,300	92,492,300	48.80%
Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pelaksanaan Pengawasan terhadap ijin lingkungan (%)	100	0	0.00%	189,552,300	92,492,300	48.80%
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	1	0	0.00%	14,009,300	6,959,300.00	49.68%
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	0	0.00%	175,543,000	85,533,000.00	48.72%
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Persentase jumlah MHA yang diakui (%)	100	0	0.00%	25,341,500	4,576,500	18.06%
Kegiatan: Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah Pengakuan Lembaga MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang di akui (lokasi)	1	0	0.00%	14,171,500	4,576,500	32.29%
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA KearifanLokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Usulan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA KearifanLokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH (Dokumen)	1	0	0.00%	14,171,500	4,576,500.00	32.29%
Kegiatan : Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH		Persentase Peningkatan kapasitas MHA dan Kearifan lokal, Pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (%)	50	0	0.00%	11,170,000	0	0.00%
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	1	0	0.00%	11,170,000	0	0.00%
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		Persentase pelaku yang aktif dalam pengelolaan LH (%)	80	32	40.00%	68,403,700	31,553,700	46.13%

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN		PERSENTASE
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/ Kota		Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi bidang Lingkungan Hidup (%)	33.33	0	0.00%	68,403,700	31,553,700	46.13%
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok masyarakat/Institusi yang terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH (Lembaga)	35	17	48.57%	40,905,000	19,905,000.00	48.66%
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	1	0	0.00%	27,498,700	11,648,700.00	42.36%
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Persentase penyelesaian pengaduan LH tahun berjalan (%)	100	40	40.00%	17,322,100	5,671,300	32.74%
Kegiatan: Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	100	40	40.00%	17,322,100	5,671,300	32.74%
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani (Dokumen)	1	0	0.00%	17,322,100	5,671,300.00	32.74%
Program Pengelolaan Persampahan		Persentase Area Pelayanan Persampahan (%)	85.80	0	0.00%	10,515,199,160	5,558,806,995	52.86%
Kegiatan: Pengelolaan Sampah		Persentase sampah yang dikelola (%)	99	69.19	69.89%	10,515,199,160	5,558,806,995	52.86%
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA, TPST, SPA Kab/ Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Ton)	53416.77	23,432	43.87%	8,226,450,760	4,148,348,120.00	50.43%
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat (Kelompok)	6	3	50.00%	121,833,000	48,353,952.00	39.69%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2	1	50.00%	2,166,915,400	1,362,104,923.00	62.86%
TOTAL					49.65%	30,185,301,172	14,337,909,944	47.50%

Batulicin, 08 Juli 2023

Mengetahui
Kepala Dinas,



Primat Prapto Udoyo, S.Hut., M.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730228 199212 1 004

**LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2023**

SKPD/INSTANSI : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 FUNGSI : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 SUB FUNGSI : -
 KABUPATEN : TANAH BUMBU

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN		PERSENTASE
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	100	0	0.00%	14,847,578,362	10,206,023,192	68.74%
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (%)	100	75	75.00%	22,086,900	20,762,400	94.00%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun (Dokumen)	2	1	50.00%	8,600,400	7,875,900.00	91.58%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun (Laporan)	5	3	60.00%	13,486,500	12,886,500.00	95.55%
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselesaikan dengan baik (%)	100	75	75.00%	5,944,741,106	4,456,094,271	74.96%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Org/bulan)	44	44	100.00%	5,542,689,462	4,171,805,971.00	75.27%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	0	0.00%	402,051,644	284,288,300.00	70.71%
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	75	75.00%	751,363,500	524,379,300	69.79%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	5	3	60.00%	170,285,000	133,185,000.00	78.21%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan (Media)	2	1	50.00%	2,400,000	950,000.00	39.58%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)	203	203	100.00%	578,678,500	390,244,300.00	67.44%

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN		PERSENTASE
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	75	0.75	474,847,500	314,550,483	66.24%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia (Laporan)	12	9	75.00%	170,345,000	71,552,983.00	42.00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan (Laporan)	12	9	75.00%	304,502,500	242,997,500	79.80%
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	75	75.00%	3,025,284,450	1,631,394,879	53.93%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	56	32	57.14%	3,025,284,450	1,631,394,879.00	53.93%
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD		Akreditasi Badan Layanan Usaha Daerah (Nilai)	236	0	0.00%	4,629,254,906	3,258,841,859	70.40%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jenis BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan (Unit Kerja)	1	0.00	0.00%	4,629,254,906	3,258,841,859.00	70.40%
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Persentase Pemenuhan data dok perencanaan LH (%)	85	96.72	113.79%	158,509,800	29,779,000	18.79%
Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Data Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (%)	100	96.72	96.72%	48,786,800	29,779,000	61.04%
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	0.00%	48,786,800	29,779,000	61.04%
Kegiatan: Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Data Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (%)	100	0	0.00%	109,723,000	0	0.00%
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	0	0.00%	109,723,000	0	0.00%
Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase pemenuhan parameter kualitas Lingkungan (%)	86.67	0	0.00%	669,617,000	252,411,224	37.69%
Kegiatan: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Data Kualitas Air, Udara dan Tanah (%)	86.67	95.73	110.45%	563,347,000	243,076,224	43.15%

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN		PERSENTASE
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut (Dokumen)	1	0	0.00%	358,315,000	201,469,224.00	56.23%
	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup Yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	0	0.00%	205,032,000	41,607,000.00	20.29%
Kegiatan: Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase lahan sangat kritis di sempadan sungai yang dipulihkan (%)	40	0	0.00%	106,270,000	9,335,000	8.78%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi (Dokumen)	1	0	0.00%	106,270,000	9,335,000.00	8.78%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (%)	77.27	97.60	126.31%	3,678,263,250	2,671,491,750	72.63%
Kegiatan: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Jumlah Keanekaragaman Hayati yang dikelola sesuai dengan kewenangan (lokasi)	18	18	100.00%	3,678,263,250	2,671,491,750	72.63%
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	100	60	60.00%	3,678,263,250	2,671,491,750.00	72.63%
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Persentase pelaku usaha yang memenuhi ijin Pengelolaan Limbah Bahan Beracun (%)	61.67	44.08	71.48%	15,514,000	9,664,000	62.29%
Kegiatan: Penyimpanan Sementara Limbah B3		Persentase Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 (LB3) yang disediakan oleh Pelaku Usaha (%)	100	44.08	44.08%	15,514,000	9,664,000	62.29%
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara LB3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan)	1	0	0.00%	15,514,000	9,664,000.00	62.29%
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Persentase pelaku usaha yang taat pengelolaan LH (%)	100	66.77	66.77%	189,552,300	129,643,300	68.39%
Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pelaksanaan Pengawasan terhadap ijin lingkungan (%)	100	0	0.00%	189,552,300	129,643,300	68.39%

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN		PERSENTASE
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	1	0	0.00%	14,009,300	8,459,300.00	60.38%
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	0	0.00%	175,543,000	121,184,000.00	69.03%
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Persentase jumlah MHA yang diakui (%)	100	0	0.00%	25,341,500	18,686,500	73.74%
Kegiatan: Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah Pengakuan Lembaga MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang di akui (lokasi)	1	0	0.00%	14,171,500	11,301,500	79.75%
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA KearifanLokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Usulan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA KearifanLokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH (Dokumen)	1	0	0.00%	14,171,500	11,301,500.00	79.75%
Kegiatan : Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH		Persentase Peningkatan kapasitas MHA dan Kearifan lokal, Pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (%)	50	0	0.00%	11,170,000	7,385,000	66.11%
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	1	0	0.00%	11,170,000	7,385,000.00	66.11%
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		Persentase pelaku yang aktif dalam pengelolaan LH (%)	80	96	120.00%	68,403,700	59,653,700	87.21%
Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/ Kota		Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi bidang Lingkungan Hidup (%)	33.33	0	0.00%	68,403,700	59,653,700	87.21%
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok masyarakat/Institusi yang terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH (Lembaga)	35	35	100.00%	40,905,000	32,155,000.00	78.61%
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	1	0	0.00%	27,498,700	27,498,700.00	100.00%

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN		PERSENTASE
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Persentase penyelesaian pengaduan LH tahun berjalan (%)	100	80	80.00%	17,322,100	7,271,300	41.98%
Kegiatan: Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	100	80	80.00%	17,322,100	7,271,300	41.98%
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani (Dokumen)	1	0	0.00%	17,322,100	7,271,300.00	41.98%
Program Pengelolaan Persampahan		Persentase Area Pelayanan Persampahan (%)	85.80	0	0.00%	10,515,199,160	7,785,328,995	74.04%
Kegiatan: Pengelolaan Sampah		Persentase sampah yang dikelola (%)	99	104.76	105.82%	10,515,199,160	7,785,328,995	74.04%
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA, TPST, SPA Kab/ Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Ton)	53416.77	35,765	66.96%	8,226,450,760	6,104,168,120.00	74.20%
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat (Kelompok)	6	4	66.67%	121,833,000	67,055,952.00	55.04%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2	1	50.00%	2,166,915,400	1,614,104,923.00	74.49%
TOTAL					57.12%	30,185,301,172	21,169,952,961	70.13%

Batulicin, 07 Oktober 2023

Mengetahui

Kepala Dinas,



Pratomo Prapto Udoyo, S.Hut., M.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730228 199212 1 004

**LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023**

SKPD/INSTANSI : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 FUNGSI : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 SUB FUNGSI : -
 KABUPATEN : TANAH BUMBU

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN		PERSENTASE
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	100	78.73	78.73%	17,323,677,876	16,291,717,699	94.04%
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100.00%	24,778,800	24,617,400	99.35%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun (Dokumen)	2	2	100.00%	11,292,300	11,280,900.00	99.90%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun (Laporan)	5	5	100.00%	13,486,500	13,336,500.00	98.89%
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselesaikan dengan baik (%)	100	100	100.00%	6,199,999,536	6,120,468,279	98.72%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Org/bulan)	44	45	102.27%	5,810,821,262	5,733,881,280.00	98.68%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	100.00%	389,178,274	386,586,999.00	99.33%
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	100	100.00%	899,493,500	881,113,233	97.96%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	5	5	100.00%	179,185,000	178,085,000.00	99.39%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan (Media)	2	2	100.00%	2,400,000	1,635,000.00	68.13%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)	341	341	100.00%	717,908,500	701,393,233.00	97.70%

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN		PERSENTASE
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	1.00	458,302,500	416,165,584	90.81%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia (Laporan)	12	12	100.00%	134,900,000	96,973,084.00	71.89%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan (Laporan)	12	12	100.00%	323,402,500	319,192,500	98.70%
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	100	100.00%	3,088,027,450	2,610,324,649	84.53%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	56	44	78.57%	3,033,062,450	2,555,359,649.00	84.25%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	100.00%	54,965,000	54,965,000.00	100.00%
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD		Akreditasi Badan Layanan Usaha Daerah (Nilai)	236	270	114.41%	6,653,076,090	6,239,028,554	93.78%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jenis BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan (Unit Kerja)	1	1	100.00%	6,653,076,090	6,239,028,554.00	93.78%
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Persentase Pemenuhan data dok perencanaan LH (%)	85	96.72	113.79%	483,276,200	470,209,918	97.30%
Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Data Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (%)	100	96.72	96.72%	90,889,800	83,850,158	92.25%
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	100.00%	90,889,800	83,850,158	92.25%
Kegiatan: Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Data Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (%)	100	100	100.00%	392,386,400	386,359,760	98.46%
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun (Dokumen)	1	1	100.00%	392,386,400	386,359,760	98.46%
Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase pemenuhan parameter kualitas Lingkungan (%)	86.67	91.67	105.77%	645,022,000	637,936,022	98.90%
Kegiatan: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Data Kualitas Air, Udara dan Tanah (%)	67	96.57	144.13%	537,402,000	530,316,022	98.68%

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN		PERSENTASE
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut (Dokumen)	1	1	100.00%	339,715,000	335,804,022.00	98.85%
	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup Yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	100.00%	197,687,000	194,512,000.00	98.39%
	Kegiatan: Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase lahan sangat kritis di sempadan sungai yang dipulihkan (%)	40	54	135.00%	107,620,000	107,620,000	100.00%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi (Dokumen)	1	1	100.00%	107,620,000	107,620,000.00	100.00%
	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (%)	77.27	119.76	154.99%	5,168,892,500	4,919,037,850	95.17%
	Kegiatan: Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Keaneekaragaman Hayati yang dikelola sesuai dengan kewenangan (lokasi)	18	18	100.00%	5,168,892,500	4,919,037,850	95.17%
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	100	100	100.00%	5,168,892,500	4,919,037,850.00	95.17%
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha yang memenuhi ijin Pengelolaan Limbah Bahan Beracun (%)	61.67	46.98	76.18%	24,694,000	24,694,000	100.00%
	Kegiatan: Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 (LB3) yang disediakan oleh Pelaku Usaha (%)	100	46.98	46.98%	24,694,000	24,694,000	100.00%
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara LB3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan)	1	1	100.00%	24,694,000	24,694,000.00	100.00%
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat pengelolaan LH (%)	100	96.15	96.15%	209,892,300	204,770,508	97.56%
	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan terhadap ijin lingkungan (%)	100	100	100.00%	209,892,300	204,770,508	97.56%

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN		PERSENTASE
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	1	1	100.00%	14,009,300	13,709,300.00	97.86%
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	100.00%	195,883,000	191,061,208.00	97.54%
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Persentase jumlah MHA yang diakui (%)	100	100	100.00%	25,341,500	23,011,500	90.81%
Kegiatan: Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah Pengakuan Lembaga MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang di akui (lokasi)	1	1	100.00%	14,171,500	13,401,500	94.57%
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA KearifanLokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Usulan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA KearifanLokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH (Dokumen)	1	1	100.00%	14,171,500	13,401,500.00	94.57%
Kegiatan : Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH		Persentase Peningkatan kapasitas MHA dan Kearifan lokal, Pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (%)	50	54	108.00%	11,170,000	9,610,000	86.03%
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	1	1	100.00%	11,170,000	9,610,000.00	86.03%
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		Persentase pelaku yang aktif dalam pengelolaan LH (%)	80	100	125.00%	74,603,700	72,253,700	96.85%
Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/ Kota		Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi bidang Lingkungan Hidup (%)	33.33	121.33	364.03%	74,603,700	72,253,700	96.85%
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok masyarakat/Institusi yang terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH (Lembaga)	35	35	100.00%	42,405,000	40,205,000.00	94.81%
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	100.00%	32,198,700	32,048,700.00	99.53%
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Persentase penyelesaian pengaduan LH tahun berjalan (%)	100	100	100.00%	17,322,100	13,721,300	79.21%
Kegiatan: Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100.00%	17,322,100	13,721,300	79.21%
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani (Dokumen)	1	1	100.00%	17,322,100	13,721,300.00	79.21%

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN		PERSENTASE
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Program Pengelolaan Persampahan		Persentase Area Pelayanan Persampahan (%)	85.80	79.62	92.80%	14,639,216,160	13,815,703,993	94.37%
Kegiatan: Pengelolaan Sampah		Persentase sampah yang dikelola (%)	99	140.09	141.51%	14,639,216,160	13,815,703,993	94.37%
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA, TPST, SPA Kab/ Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Ton)	53416.77	47,882	89.64%	8,596,550,760	8,292,663,209.00	96.47%
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat (Kelompok)	6	6	100.00%	173,327,000	159,511,214.00	92.03%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2	2	100.00%	5,869,338,400	5,363,529,570.00	91.38%
TOTAL					96.21%	38,611,938,336	36,473,056,490	94.46%

Batulicin, 29 Desember 2023

Mengetahui

Kepala Dinas,



Rahmat Prpto Udoyo, S.Hut., M.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730228 199212 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jalan Dharma Praja Gunung Tinggi Tepe. (Fax) : 0618-4076050.
Web : www.dit.tanahbumbuab.go.id Email : ditl.tanbub@gmail.com

Kecamatan Batuicin Kabupaten Tanah Bumbu - Kalimantan Selatan Kode Pos : 72214

KESELARASAN KINERJA - OUTPUT - PENGANGGARAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS (SARGIS)	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)*	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)*	IKU / BUKAN IKU	NO	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN (Rp.)		KET			
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)*	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)*	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		SUB KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)*	TERKAIT	TIDAK TERKAIT
Meningkatnya Uptu Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Y	1. Indeks Kualitas Air (IKA)		Y	IKU		PENECAANAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya pemenuhan data Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Data Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Y	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersedianya Data RPPLH	Persentase Pemenuhan Data RPPLH	Y	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Telaah Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaah Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Y	48,786,800	Y	APBD
										Y	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tersedianya Data KLHS	Persentase Pemenuhan Data KLHS	Y	Pembuatan dan Pelaksanaan RPPLH Rencana Tata Ruang	Tersusunnya Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Y	109,723,000	Y	APBD
										Y	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya pemenuhan data kualitas air, udara dan tanah	Persentase pemenuhan data kualitas air, udara dan tanah	Y	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Y	358,315,000	Y	APBD	
										Y	Pemulihan dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Lahan sangat kritis di sempadan Sungai yang dipulihkan	Persentase Lahan sangat kritis di sempadan Sungai yang dipulihkan	Y	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Y	205,032,000	Y	APBD	
										Y	Pemulihan dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Lahan sangat kritis di sempadan Sungai yang dipulihkan	Persentase Lahan sangat kritis di sempadan Sungai yang dipulihkan	Y	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Y	106,270,000	Y	APBD	
										Y	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya Pelaku Usaha yang memenuhi izin Pengelolaan Limbah Bahan Beracun	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi izin Pengelolaan Limbah Bahan Beracun	Y	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Tersedianya tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang disediakan oleh pelaku usaha	Persentase tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang disediakan oleh pelaku usaha	Y	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Tersedianya Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3
Y	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya Pelaku Usa yang Taat pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku Usa yang Taat pengelolaan Lingkungan Hidup	Y	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah	Terlaksananya pengawasan terhadap Izin Lingkungan	Persentase pelaksanaan pengawasan terhadap izin Lingkungan	Y	Facilitasi Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Tersedianya Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelulusan Operasi yang Dibenarkan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelulusan Operasi yang Dibenarkan	Y	14,008,300	Y	APBD						

NO	SASARAN STRATEGIS (SARGIS)	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU / BUKAN IKU	NO	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	KEGIATAN			KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	SUB KEGIATAN			ANGGARAN (Rp.)		KET	
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TERKAIT	TIDAK TERKAIT		
	Meningkatnya Upaya penanganan dan Pengurang	Y	5. Persentase Volume sampah terangkut	Y	IKU		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya Area Pelayanan Persampahan	Persentase Area Pelayanan Persampahan	Y	Pengelolaan Sampah	Meningkatnya sampah yang dikelola	Persentase sampah yang dikelola	Y	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Y	8.228.450,760	Y	APBD
		Y	6. Persentase volume sampah yang direduksi	Y	IKU										Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Y	121.833.000	Y	APBD
		Y		Y											Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Y	2.166.915.400	Y	APBD
Jumlah															15.337.722,810						





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jalan Dharma Praja Gunung Tinggi Telp. (Fas) : 0519-8078050,

Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos : 72214

Web: www.dh.tanahbumbukab.go.id Email : bhd.tanbu@gmail.com

KESELARASAN KINERJA - OUTPUT - PENGANGGARAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS (SARGIS)	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU/BUKAN IKU	NO	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	KEGIATAN			KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	SUB KEGIATAN			SUB KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	ANGGARAN (Rp.)		KET			
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT				
	Meningkatnya Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Y	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Y	IKU		PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya pemenuhan data Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Data Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Y	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPPLH) Kabupaten/Kota	Tersedianya Data RPPPLH	Persentase Pemenuhan Data RPPPLH	Y	Pengendalian Pelaksanaan RPPPLH Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Telah Mengakomodir RPPPLH Kabupaten/Kota	Y	186,016,000	Y	APBD			
										Y	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tersedianya Data KLHS	Persentase Pemenuhan Data KLHS	Y	Peninjauan Kembali terhadap RPPPLH Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Beryolensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Y	474,452,000	Y	APBD			
										Y	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Pemenuhan Parameter kualitas lingkungan	Persentase pemenuhan parameter kualitas lingkungan	Y	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya pemenuhan data kualitas air, udara dan tanah	Persentase pemenuhan data kualitas air, udara dan tanah	Y	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Y	367,805,900	Y
									Y	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Y	207,915,800	Y	APBD								
									Y	Pemulihan dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Lahan sangat kritis di sempadan Sungai yang dipulihkan	Persentase Lahan sangat kritis di sempadan Sungai yang dipulihkan	Y	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Y	1,235,837,900	Y	APBD				
									Y	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya Pelaku Usaha yang memenuhIzin Pengelolaan Limbah Bahan Beracun	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhIzin Pengelolaan Limbah Bahan Beracun	Y	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Tersedianya tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang disediakan oleh pelaku usaha	Persentase tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang disediakan oleh pelaku usaha	Y	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Tersedianya Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Y	20,360,800	Y	APBD
									Y	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya Pelaku Usa yang Taat pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku Usa yang Taat pengelolaan Lingkungan Hidup	Y	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah	Tertaksananya a pengawasan terhadap Izn Lingkungan	Persentase pelaksanaan pengawasan terhadap Izn Lingkungan	Y	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izn Lingkungan dan/atau Izn PPLH	Tersedianya Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Y	20,128,800	Y	APBD

NO	SASARAN STRATEGIS (SARGIS)	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU / BUKAN IKU	NO	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			SUB KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	ANGGARAN(Rp.)		KET
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT	
																	237.588.500	Y	APBD
																	22.448.800	Y	APBD
																	123.880.300	Y	APBD
																	102.945.000	Y	APBD
																	63.103.700	Y	APBD
																	19.253.900	Y	APBD

NO	SASARAN STRATEGIS (SARGIS)	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)'	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)'	IKU/ BUKAN IKU	NO	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)'	KEGIATAN			KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)'	SUB KEGIATAN			ANGGARAN (Rp.)		KET	
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TERKAIT	TIDAK TERKAIT		
	Meningkatnya pengelolaan lahan sesuai kewenangan	Y	4. Peningkatan Pengelolaan Lahan sesuai kewenangan	Y	IKU		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Y	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Tertelolnya Kehati yang sesuai dengan kewenangan	Jumlah Kehati yang dikelola sesuai dengan kewenangan	Y	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Y	7.750.119,800	Y	APBD
	Meningkatnya Upaya penanganan dan Pengurangan	Y	5. Persentase Volume sampah terangkut	Y	IKU		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya Area Pelayanan Persampahan	Persentase Area Pelayanan Persampahan	Y	Pengelolaan Sampah	Meningkatnya sampah yang dikelola	Persentase sampah yang dikelola	Y	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Y	11.251.418,200	Y	APBD
		Y	6. Persentase volume sampah yang direduksi	Y	IKU									Y	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Y	420.729,800	Y	APBD
		Y		Y										Y	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Y	9.239.849,200	Y	APBD
JUMLAH																		31.772.638,800			





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jalan Dharma Praja Gunung Tinggi Telp. (Fax) : 0518-6076050,
Web: www.dlh.tanahbumbukab.go.id Email : blhd.tanbu@gmail.com

Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu - Kalimantan Selatan Kode Pos : 72214

RENCANA AKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023

NO	TUJUAN			SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN	RENCANA AKSI	JADWAL KEGIATAN				PENANGGUNG	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	(Rp.)			TW	TW	TW	TW	JAWAB
																1			2	3	4		
	Meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,22	Meningkatnya Upaya Pencegahan Pencemaran LH	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,55	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase Pemenuhan data dok perencanaan LH	83,33%	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan data RPPLH	100	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi LH	1	48.786.800	Melakukan evaluasi terhadap dokumen RPPLH	√	√	√	√	Kepala Bidang Tata Lingkungan	
										Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan data KLHS	100	Penyusunan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota Yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota Yang Disusun	1	109.723.000	Melakukan penyusunan dokumen KLHS Detail Tata Ruang	√	√	√	√	Kepala Bidang Tata Lingkungan	
					Pemenuhan Data Dukung Pengendalian Emisi GRK	100	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase pemenuhan parameter kualitas Lingkungan	86,25%	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Data Kualitas Air, Udara dan Tanah	86	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uj Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	1	358.315.000	Melakukan pemantauan kualitas air, udara dan tanah sebanyak 2 periode untuk mewakili pemantauan pada musim hujan dan musim kemarau	√	√	√	√	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
													Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup Yang Dilaksanakan	1	205.032.000	Melakukan verifikasi terhadap lokasi yang diusulkan menjadi kampung iklim Mendaftarkan lokasi yang diusulkan menjadi kampung iklim Melakukan pembinaan secara intensif terhadap lokasi yang diusulkan menjadi kampung iklim	√	√	√	√	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
									Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase lahan sangat kritis di sempadan sungai yang dipulihkan	20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1	106.270.000	Menyusun kebutuhan data untuk laporan IKLH dan IKPLHD. Rapat koordinasi dengan instansi terkait penentuan kewenangan pemegang data, Pengumpulan data, Penyusunan draft laporan, Rapat koordinasi pembahasan draft laporan, Penyusunan Laporan	√	√	√	√	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
									PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memenuhi ijin Pengelolaan Limbah Bahan Beracun (B3)	53%	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah b3 (LB3) yang disediakan oleh Pelaku Usaha	100	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Peryaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah E3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1	15.514.000	Inventarisasi data jumlah peleku usaha yang menjadi target kegiatan, Menyusun jadwal kegiatan penyelesaian Perizinan Bidang LH, Pelaksanaan Kegiatan, Pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan	√	√	√	√

NO	TUJUAN			SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN	RENCANA AKSI	JADWAL KEGIATAN				PENANGGUNG
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	(Rp.)		TW	TW	TW	TW	JAWAB
																1		2	3	4		
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat pengelolaan LH	100%	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Ijin Lingkungan dan Ijin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan terhadap ijin lingkungan	100	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Ijin Lingkungan dan/atau Ijin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi Yang Diberikan	1	14.009.300	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan serta koordinasi secara aktif dengan pelaku usaha terkait pelaksanaan ketataan masing-masing pelaku usaha	√	√	√	√	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH
													Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Ijin Lingkungan Hidup, Ijin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ijin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	175.543.000	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan serta koordinasi secara aktif dengan pelaku usaha terkait pelaksanaan ketataan masing-masing pelaku usaha	√	√	√	√	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH
							PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase jumlah MHA yang diakui	100%	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Pengakuan Lembaga MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang diakui	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Usulan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1	14.171.500	Koordinasi dengan instansi lain terkait usulan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH	√	√	√	√	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH
													Pemberdayaan, Kemiraan, Pendampingan dan Penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemiraan, Pendampingan dan Penguatan	1	11.170.000	Melakukan pembinaan terhadap lembaga MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA	√	√	√	√	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH
							PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang aktif dalam pengelolaan LH	69,63%	Penyelenggaraan Pendidikan, dan Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi bidang Lingkungan Hidup	30,65	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah Lembaga/Kelompok masyarakat/Institusi yang terdaftar Yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	35 lembaga	40.905.000	Menjalin kerjasama dengan lintas sektor dan tim terpadu tentang masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan LH	√	√	√	√	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH
													Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 dokumen	27.498.700	Menjalin kerjasama dengan lintas sektor dan tim terpadu tentang masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan LH					Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH
							PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian pengaduan LH tahun berjalan	100	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota Yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota Yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 dokumen	17.322.100	Melakukan koordinasi dari tingkat pemerintah desa, pemerintah Kecamatan dan instansi terkait secara aktif untuk akur koordinasinya materi aduan	√	√	√	√	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH

NO	TUJUAN			SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN (Rp.)	RENCANA AKSI	JADWAL KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			1	2	3	4	
																TW	TW					TW
	Meningkatkan Pengendalian kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	63,5	Meningkatnya Pengelolaan Lahan Sesuai Kewenangan	Peningkatan Pengelolaan Lahan Sesuai Kewenangan	72,73	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan KEHATI	72,73%	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah KEHATI yang dikelola sesuai dengan kewenangan	16 lokasi	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Ha	3.678.263.250	Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan RTH	√	√	√	√	Kepala Bidang Tata Lingkungan
	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	65	Meningkatnya Upaya Penanganan Dan Pengurangan Sampah	Persentase Volume sampah terangkut	73%	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Area Pelayanan Persampahan	81,87%	Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang dikelola	99	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	53416,77 ton	8.226.450.760	Program Si Julpikar's (aksi jual, pilah, dan tukar sampah), dengan bentuk penerapan rya acalah tukar sampah ekonomis dengan sembako, sedekah sampah oleh warga untuk tempat ibadah	√	√	√	√	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3
													Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat	6 kelompok	121.833.000	Menghidupkan bank sampah instansi pemerintah, sekolah dan tingkat desa membentuk minimal 1 KSM di tiap Desa/Kelurahan untuk mengetahui potensi timbulan sampah yang dilakukan pemilahan selain juga bisa menambah PAD dari retribusi persampahan	√	√	√	√	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3
													Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	2 unit	2.166.915.400	Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan persampaha	√	√	√	√	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3
																15.337.722.810						



Batulicin, 2 Januari 2023
Mengetahui
Rahmat Prpto Udoyo, S.Ht, MP
NIP. 19730228 199212 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jalan Dharma Praja Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin
Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos : 72214

Website : <https://dlh.tanahbumbukab.go.id> Email : blhd.tanbu@gmail.com

RENCANA AKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024

NO	TUJUAN			SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN	RENCANA AKSI	JADWAL KEGIATAN				PENAUNGGUNG	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	(Rp.)			TW	TW	TW	TW	JAWAB
																			1	2	3	4	
	Meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	89,22	Meningkatnya Upaya Pencegahan Pencemaran LH	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,55	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan data dok perencanaan LH	83,13%	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan data RPPLH	86,67	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2	186.019.000	Meakukan evaluasi terhadap dokumen RPPLH	√	√	√	√	Kepala Bidang Tata Lingkungan	
					Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,38				Penyeleenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan data KLHS	86,67	Peningjauan Kembali terhadap RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	1	474.452.000	Meakukan penyusunan dokumen KLHS Detail Tela Ruang	√	√	√	√	Kepala Bidang Tata Lingkungan	
					Pemenuhan Data Dukung Pengendalian Emisi GRK	100	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan parameter kualitas lingkungan	86,25%	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Data Kualitas Air, Udara dan Tanah	87,08	Koordinas, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Li Kualitas Lingkungan Hidup Diaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	1	387.805.900	Meakukan pemantauan kualitas air, udara dan tanah sebanyak 2 periode untuk mewakili pemantauan pada musim hujan dan musim kemarau	√	√	√	√	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
										Koordinas dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup Yang Dilaksanakan	1	207.915.600	Meakukan verifikasi terhadap lokasi yang disusukan menjadi kampung iklim Mendaftarkan lokasi yang disusukan menjadi kampung iklim Meakukan pembinaan secara intensif terhadap lokasi yang disusukan menjadi kampung iklim	√	√	√	√	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
						Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase lahan sangat kritis di sempadan sungai yang dipulihkan	20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Ha	1.235.637.900	Menyusun kebutuhan data untuk laporan IKLH dan IKPLHD, Rapat koordinasi dengan instansi terkait penentuan kewenangan pemegang data, Pengumpulan data, Penyusunan draft laporan, Rapat koordinasi pembahasan draft laporan, Penyusunan Laporan	√	√	√	√	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					
						PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memenuhi Ijin Pengelolaan Limbah Bahan Beracun (B3)	53%	Penyempaan Sementara Limbah B3	Persentase Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 (LB3) yang disediakan oleh Pelaku Usaha	100	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/zin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1	20.360.600	Inventarisasi data jumlah pelaku usaha yang menjadi target kegiatan, Menyusun jadwal kegiatan penyelesaian Perizinan Bidang LH, Pelaksanaan Kegiatan, Pembuatan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	√	√	√	√	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3		

NO	TUJUAN			SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN	RENCANA AKSI	JADWAL KEGIATAN				PENANGGUB	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	(Rp.)			TW	TW	TW	TW	JAWAB
																			1	2	3	4	
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang fast pengelolaan LH	100%	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan terhadap Ijin lingkungan	100	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi Yang Diberikan	1	20.128.800	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan serta koordinasi secara aktif dengan pelaku usaha terkait pelaksanaan ketataan masing-masing pelaku usaha	√	√	√	√	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH	
													Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	135 Bahan Usaha	237.588.500	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan serta koordinasi secara aktif dengan pelaku usaha terkait pelaksanaan ketataan masing-masing pelaku usaha	√	√	√	√	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH	
							PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase jumlah MHA yang diakui	100%	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Pengakuan Lembaga MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang diakui	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1	22.448.800	Koordinasi dengan instansi lain terkait usulan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH	√	√	√	√	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH	
													Pemberdayaan, Kerjasama, Pendampingan dan Penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1	123.880.300	Melakukan pembinaan terhadap lembaga MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA	√	√	√	√	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH	
							PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang aktif dalam pengelolaan LH	69,63%	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi bidang Lingkungan Hidup	30,65	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga masyarakat/Komunitas/Kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	35 lembaga	102.945.000	Menjalin kerjasama dengan lintas sektor dan tim terpadu tentang masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan LH	√	√	√	√	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH	
													Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Gerakan Peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 dokumen	63.103.700	Menjalin kerjasama dengan lintas sektor dan tim terpadu tentang masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan LH	√	√	√	√	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH	
							PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian pengaduan LH tahun berjalan	100	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10 Pengaduan	19.253.900	Melakukan koordinasi dari tingkat pemerintah desa, pemerintah Kecamatan dan instansi terkait secara aktif untuk alur koordinasi dan terselesaikannya materi aduan	√	√	√	√	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH	
	Meningkatkan Pengendalian kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	63,5	Meningkatnya Pengelolaan Lahan Sesuai Kewenangan	Peningkatan Pengelolaan Lahan Sesuai Kewenangan	72,73	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan KEHATI	72,73%	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah KEHATI yang dikelola sesuai dengan kewenangan	19 lokasi	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kabupaten/Kota	120 Ha	7.759.119.600	Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan RTH	√	√	√	√	Kepala Bidang Tata Lingkungan	

NO	TUJUAN			SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN	RENCANA AKSI	JADWAL KEGIATAN				PENANGGUNG	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	(Rp.)			TW	TW	TW	TW	JAWAB
																1			2	3	4		
	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	65	Meningkatnya Upaya Penanganan Dan Pengurangan Sampah	Persentase Volume sampah terangkut	73%	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Area Pelayanan Persampahan	81.87%	Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang dikelola	99	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	54169,02 ton	11.251.418.200	Program Si Jupikar's (aksi jual, pilah, dan tukar sampah) dengan bentuk penerapannya adalah tukar sampah ekonomis dengan sembako, sedekah sampah oleh warga untuk tempat ibadah	√	√	√	√	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3	
													Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat	8 kelompok	420.729.800	Menghimpunkan bank sampah instansi pemerintah, sekolah dan tingkat desa memberituk minimal 1 KSM di tiap Desa/Kelurahan untuk mengetahui potensi timbuan sampah yang dilakukan pemilahan selain juga bisa menambah PAD dari retribusi persampahan	√	√	√	√	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3	
													Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	2 unit	9.238.849.200	Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	√	√	√	√	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3	
																31.772.636.800							

Batulicin, 18 Januari 2024
Mengetahui
Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

Rahmat Pripto Udoyo, S.Hut, MP
NIP. 19730228 199212 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jalan Dharma Praja Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin
Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos : 72214

Website : <https://dlh.tanahbumbukab.go.id> ,Email : blhd.tanbu@gmail.com

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Upaya Pencegahan Pencemaran lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Sangat Kurang (56,11)	Sedang (58,15)	103,63
		2. Indeks Kualitas Udara	Sangat Baik (91,48)	Sangat Baik (96,17)	105,12
		3. Pemenuhan data dukung pengendalian emisi GRK	100%	100%	100
2	Meningkatkan Pengendalian Kualitas Lahan	4. Peningkatan Pengelolaan Lahan Sesuai Kewenangan	72,27 %	100 %	138,37
3	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5. Persentase Volume Sampah Terangkut	72 %	76,59 %	106,37 %
		6. Persentase Volume Sampah Yang Direduksi	27 %	17,05 %	63,15 %

Capaian Indikator Kinerja Utama (Sangat Berhasil)	= (5 x 95,5)/6	= 79,58
Capaian Indikator Kinerja Utama (Cukup Berhasil)	= (1 x 70,5)/6	= 11,75
Total rata-rata capaian Kinerja Utama	= 91,33	

Secara keseluruhan, capaian kinerja utama Eselon II berada pada kategori SANGAT BAIK/SANGAT BERHASIL

Batulicin, 02 Januari 2024

Mengetahui
Kepala Dinas



Rahmat Prapto Udoyo, S.Hut, MP
NIP. 19730228 199212 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jalan Dharma Praja Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin
Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos : 72214

Website : <https://dlh.tanahbumbukab.go.id>, Email : blhd.tanbu@gmail.com

DAFTAR PENGHARGAAN TAHUN 2023 :

1. Penghargaan ADIPURA Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 yang diterima tahun 2023

2. Penghargaan Sekolah Adiwiyata :

Nama Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Kabupaten (SAK) Tahun 2023:

1. SMP Gunung Sari Estate Kec. Angsana
2. SMPN 2 Kusan Hilir Kec. Kusan Hilir
3. SMPN 7 Satu Atap Satui Kec. Satui
4. SMPN 2 Kusan Hulu Kec. Teluk Kepayang
5. SMPN 5 Simpang Empat Kec. Simpang Empat
6. SDN 1 Harapan Maju Kec. Karang Bintang

Nama Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Propinsi (SAP) Tahun 2023 :

1. SDN Kerta Buwana Kec. Sungai Loban
2. SMPN 1 Kusan Hulu
3. SDN Bayansari Kec. Angsana
4. SMPN 1 Kusan Hilir
5. SMPN 1 Satui

3. Penghargaan Program Kampung Iklim

Penghargaan Program Kampung Iklim sebanyak 4 penghargaan yaitu :

1. Penerima Kategori Tropi Utama diberikan kepada :
 - a. Desa Al Kautsar Kecamatan Satui
2. Penerima Sertifikat Proklamasi Utama diberikan kepada :
 - a. Desa Pulau Burung Kecamatan Simpang Empat,
 - b. Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin,
3. Penerima Sertifikat Proklamasi Kategori Madya diberikan kepada :
 - a. Kelurahan Gunung Tinggi

4. Penghargaan Madinah Berseri :

Untuk Kategori Terlayani Oleh DLH :

1. Kelurahan Batulicin, Kec. Batulicin
2. Desa Kersik Putih, Kec. Batulicin
3. Desa Sebamban Lama, Kec. Sungai Loban
4. Desa Sepunggur, Kec. Kusan Tengah

Untuk Kategori Non Layanan Oleh DLH :

1. Desa Mustika, Kec. Kuranji
2. Desa Sidomulyo, Kec. Mantewe
3. Desa Sepakat, Kec. Mantewe
4. Desa Tegal Sari, Kec. Satui

Juara Umum Penghargaan Madinah Berseri : Kelurahan Batulicin, Kec. Batulicin

Plakat Adipura : Desa Batulicin Irigasi, Kec. Karang Bintang

5. Penghargaan Kepada Petugas Kebersihan Yang Berdedikasi Terhadap Pekerjaan:

1. Mahyudin
2. Hendra Saputra
3. Hardi

6. Penghargaan Kepada Petugas Pengelola Ruang Terbuka Hijau Yang Berdedikasi Terhadap Pekerjaan :

1. Muhtar
2. Buding
3. Kasmah

Batulicin, 02 Januari 2024

Kepala Dinas,



Rahmat Prpto Udoyo, S.Hut., M.P.
Pembina Utama Muda

NIP. 19730228 199212 1 004

**FOTO PENERIMAAN PENGHARGAAN SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN
TAHUN 2023**



**FOTO PENERIMAAN PENGHARGAAN SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI TAHUN 2023
GEDUNG IDHAM CHALID BANJARBARU TANGGAL 12 DESEMBER 2023**

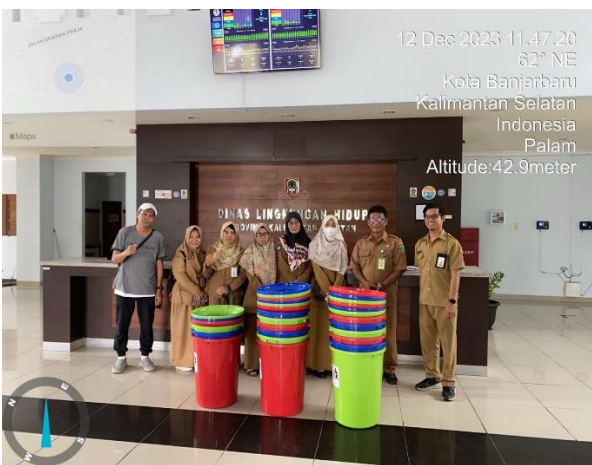


FOTO PIAGAM SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI TA 2023 SEBANYAK 5 SEKOLAH



FOTO PENERIMAAN PENGHARGAAN APRESIASI THROPY UTAMA KEPADA DESA AL KAUTSAR, KEC. SATUI



**FOTO PENERIMAAN PENGHARGAAN PROKLIM UTAMA KEPADA KELURAHAN
BATULICIN, KEC. BATULICIN DAN DESA PULAU BURUNG KEC. SIMPANG EMPAT**

